



LAPORAN KINERJA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

**LKJ
2024**



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim

Assalamualaikum wr. wb.

Dengan memanjatkan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga tersusunnya Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2024, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024.

Laporan Kinerja (LKJ) disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Dokumen Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2024 ini disusun dengan tujuan sebagai dokumen bahan pencapaian target/perencanaan jangka pendek yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta ketersediaan anggaran yang ada pada DPA Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah dapat berjalan tepat waktu serta tepat guna.

Demikian Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2024 ini dibuat dan dijadikan pedoman dalam peningkatan kinerja aparatur dimasa mendatang.

Semoga penyusunan LKjIP Tahun 2024 ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi peningkatan capaian kinerja pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah di masa mendatang serta bermanfaat bagi instansi lain.

Terima kasih.

Palu, Februari 2025

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Yudiawati V Windarrusliana, SKM., M.Kes

Pembina Utama Muda

Nip. 19670712 199003 2 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Cascading Kinerja	1
1.2	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
1.3	Isu-Isu Strategis	17
1.4	Dukungan SDM, Sarana Prasarana	17
1.5	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023	23

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah	28
2.2	Strategi Arah Kebijakan	31
2.3	Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024	34
2.4	Indikator Kinerja Utama (IKU)	39
2.5	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024	39

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024	41
3.1.1	Perbandingan antara realisasikinerja tahun 2024 dengan tahun 2023	41
3.1.2	Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan tahun 2023	43
3.1.3	Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah	45
3.1.4	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional	69
3.1.5	Analisis Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.	71
3.1.6	Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya	78
3.1.7	Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	79
3.1.4	Program dan kegiatan yang mendukung dalam peningkatan standar pelayanan minimum	82
3.2	Realisasi Anggaran	89
3.3	Inovasi	94
3.4	Penghargaan	98

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

103

Lampiran

DAFTAR TABEL

1.1	Cascading Kinerja	2
1.2	Rekap Pegawai per golongan ruang dan jenis kelamin tahun 2024	3
1.3	Rekap pegawai perjabatan dan jenis kelamin tahun 2024	3
1.4	Rekap PPPK pergolongan dan jenis kelamin	4
1.5	Rekap pendidikan pejabat struktural	18
1.6	Rekap sarana dan prasarana berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	19
1.7	Tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi AKIP Tahun 2023	23
2.1	Tujuan, sasaran dan indicator kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah	30
2.2	Strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah	33
2.3	Pagu Program/Kegiatan/Subkegiatan sebelum dan sesudah Perubahan Tahun Anggaran 2024	35
2.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah	39
2.5	Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	40
3.1.1	Skala Nilai Perangkat Kinerja	40
3.1.2	Capaian Kinerja Tahun 2024	42
3.1.3	Capaian kinerja tahun 2023 dan tahun 2024	44
3.1.4	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan strandar nasional	70
3.1.5	Perbandingan capaian realisasi tahun 2023, tahun 2024 dengan standard nasional	70
3.1.6	Evaluasi nilai SAKIP dan Evaluasi terhadap RKPD Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	71
3.1.7	Program, kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024	80
3.1.8	Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Standar pelayanan Minimum (SPM) Tahun 2024	84
3.1.9	Indeks pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	88
3.2.1	Rencana Belanja Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024	90
3.2.2	Realisasi berdasarkan belanja operasional dan belanja modal Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024	91
3.2.3	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Tahun Anggaran 2024	92

DAFTAR GAMBAR

1.1	Cascading Kinerja	1
1.2	Jumlah pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	2
1.3 ^a	Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah	16
1.3 ^b		
1.4	Rekap pendidikan pejabat structural tahun 2024	18



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Cascading Kinerja

MA **RA**

Sasaran Strategis Rencana PD (Dinamiskan Outcome Strategis) (Dinas)

Meningkatnya Akses Pendidikan

Indikator Sasaran Strategis Rencana PD (Dinamiskan Outcome Strategis) (Dinas)

(APS Usia 16-18 thn)

Anggaran: Rp400 Dinar Pendidikan



RA RRA

Sasaran Strategis Renstra PD (Intermediate Outcome Bidang Urusan)

Meningkatnya Aksesibilitas, Mutu Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Inovasi Pendidikan

Indikator Sasaran Strategis Renstra PD (Intermediate Outcome Bidang Urusan)

(APS Usia 4-18 thn Penyandang Disabilitas)

Pengampu:

Kepala Dinas Pendidikan

Sasaran Program (Intermediate Outcome):

MENINGKATNYA PEMERATAAN DAN PERLUASAN AKSES PENDIDIKAN KHUSUS YANG BERMUTU DAN BERKEADILAN

Indikator Program (Intermediate Outcome):

(Persentase Peningkatan Anak Disabilitas yang Mengenyam Pendidikan)

Nama Program:

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Pengampu:

KEPALA BIDANG PROFUL DAN INOVASI PENDIDIKAN

Sasaran Program (Intermediate Outcome):

MENINGKATNYA NILAI RAPOR PENDIDIKAN MENENGAH KEJUJURAN

Indikator Program (Intermediate Outcome):

(Persentase Peningkatan Nilai Raport Pendidikan Menengah Kejujuran)

Nama Program:

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Pengampu:

KEPALA BIDANG PEMBINAAN SMK

Sasaran Program (Intermediate Outcome):

MENINGKATNYA KUALITAS DAN CAKUPAN PEMERATAAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SMA, SMK DAN SLB

Indikator Program (Intermediate Outcome):

(Persentase Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA, SMK dan SLB)

Nama Program:

PROGRAM PENODIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pengampu:

KEPALA BIDANG PENODIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Sasaran Program (Intermediate Outcome):

MENINGKATNYA NILAI RAPOR PENDIDIKAN MENENGAH ATAS

Indikator Program (Intermediate Outcome):

(Persentase Peningkatan Nilai Raport Pendidikan Menengah Atas)

Nama Program:

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Pengampu:

KEPALA BIDANG PEMBINAAN SMA

Sasaran Program (Intermediate Outcome):

MENINGKATNYA PROGRAM KURIKULUM MERDEKA PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN KHUSUS

Indikator Program (Intermediate Outcome):

(Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Melaksanakan Kurikulum Merdeka Belajar)

Nama Program:

PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM

Pengampu:

KEPALA BIDANG PENODIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Sasaran Program (Intermediate Outcome):

MEWUJUDKAN URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN LAYANAN PUBLIK DINAS PENDIDIKAN

Indikator Program (Intermediate Outcome):

(Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan)

Nama Program:

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Pengampu:

KEPALA SEKRETARIAT

Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome):

MENINGKATNYA AKSES TERHADAP LAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Indikator Kegiatan (Immediate Outcome):

(Persentase Peningkatan Akses Terhadap Layanan Pendidikan Khusus)

Nama Kegiatan:

Pengelolaan Pendidikan Khusus

Pengampu:

KEPALA BIDANG PROFUL DAN INOVASI PENDIDIKAN

Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome):

MENINGKATNYA KUALITAS LULUSAN SEKOLAH MENENGAH KEJUJURAN (SMK)

Indikator Kegiatan (Immediate Outcome):

(Persentase Lulusan SMK yang Diterima Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI))

Nama Kegiatan:

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

Pengampu:

KEPALA BIDANG PEMBINAAN SMK

Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome):

MENINGKATNYA PEMENUHAN KEBUTUHAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SMA, SMK DAN SLB YANG BERKUALITAS

Indikator Kegiatan (Immediate Outcome):

(Persentase Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan SMA, SMK dan SLB)

Nama Kegiatan:

Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi

Pengampu:

KEPALA BIDANG PENODIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome):

MENINGKATNYA KUALITAS LULUSAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

Indikator Kegiatan (Immediate Outcome):

(Persentase Peningkatan Literasi dan Numerasi)

Nama Kegiatan:

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

Pengampu:

KEPALA BIDANG PEMBINAAN SMA

Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome):

MENINGKATNYA PEMENUHAN KEBUTUHAN SILABUS KURIKULUM MERDEKA

Indikator Kegiatan (Immediate Outcome):

(Persentase Pemenuhan Kebutuhan Silabus Kurikulum Merdeka)

Nama Kegiatan:

Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah

Pengampu:

KEPALA BIDANG PENODIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome):

MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN, PENGUKURAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Indikator Kegiatan (Immediate Outcome):

(Nilai SAKIP Perangkat Daerah)

Nama Kegiatan:

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pengampu:

KEPALA SEKRETARIAT

Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome):

TERTIBNYA PENGELOLAAN DAN PELAPORAN KEUANGAN

Indikator Kegiatan (Immediate Outcome):

(Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP))

Nama Kegiatan:

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pengampu:

KEPALA SEKRETARIAT

Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome):

MENINGKATNYA TERTIB ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH

Indikator Kegiatan (Immediate Outcome):

(Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah)

Nama Kegiatan:

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Pengampu:

KEPALA SEKRETARIAT

Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome):

TERPENUHINYA ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Indikator Kegiatan (Immediate Outcome):

(Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi)

Nama Kegiatan:

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pengampu:

KEPALA SEKRETARIAT

Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome):

MENINGKATNYA KELANCARAN DAN PELAKSANAAN TUGAS

Indikator Kegiatan (Immediate Outcome):

(Persentase Sarana Prasarana Aparatur yang Terpelihara)

Nama Kegiatan:

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pengampu:

KEPALA SEKRETARIAT

SA **PSA**

Sasaran Strategis Rencana RPJMD (Strategi Dasar Rincian)

Meningkatnya Aksesibilitas, Mutu Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Inovasi Pendidikan

Indikator Sasaran Strategis Rencana RPJMD (Strategi Dasar Rincian)

(Nilai Rapor Pendidikan)

Pengapa Kepala Dinas Pendidikan

Sasaran Program (Termediasi Outcome)

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK CABANG DINAS WILAYAH I

Indikator Program (Termediasi Outcome)

(Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Palu dan Sigi)

Nama Program

PROGAM PENUNJANG URUSAN PENERIMAAN DAERAH PROSUD

Pengapa

KAPALA CABANG DINAS PEKERJAAN HENDEK WILAYAH I KOTA PALU DAN KAB. SIGI

Sasaran Program (Termediasi Outcome)

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK CABANG DINAS WILAYAH II

Indikator Program (Termediasi Outcome)

(Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kab. Banggai dan Kab. Parigi Moutong)

Nama Program

PROGAM PENUNJANG URUSAN PENERIMAAN DAERAH PROSUD

Pengapa

KAPALA CABANG DINAS PEKERJAAN HENDEK WILAYAH II KAB. BANGGAI DAN KAB. PARIGI MOUTONG

Sasaran Program (Termediasi Outcome)

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK CABANG DINAS WILAYAH III

Indikator Program (Termediasi Outcome)

(Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kab. Poso dan Kab. Tojo Una-Una)

Nama Program

PROGAM PENUNJANG URUSAN PENERIMAAN DAERAH PROSUD

Pengapa

KAPALA CABANG DINAS PEKERJAAN HENDEK WILAYAH III KAB. POSO DAN KAB. TOJO UNA-UNA

Sasaran Program (Termediasi Outcome)

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK CABANG DINAS WILAYAH VI

Indikator Program (Termediasi Outcome)

(Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kab. Toli-toli dan Kab. Buol)

Nama Program

PROGAM PENUNJANG URUSAN PENERIMAAN DAERAH PROSUD

Pengapa

KAPALA CABANG DINAS PEKERJAAN HENDEK WILAYAH VI KAB. BANGGAI KAB. BANGGAI KEPULAUAN DAN KAB. BANGGAI LAUT

Sasaran Program (Termediasi Outcome)

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK CABANG DINAS WILAYAH IV

Indikator Program (Termediasi Outcome)

(Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kab. Morowali dan Morowali Utara)

Nama Program

PROGAM PENUNJANG URUSAN PENERIMAAN DAERAH PROSUD

Pengapa

KAPALA CABANG DINAS PEKERJAAN HENDEK WILAYAH IV KAB. MOROWALI DAN KAB. MOROWALI UTARA

Sasaran Program (Termediasi Outcome)

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK CABANG DINAS WILAYAH V

Indikator Program (Termediasi Outcome)

(Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kab. Banggai, Kab. Banggai Kepulauan dan Kab. Banggai Laut)

Nama Program

PROGAM PENUNJANG URUSAN PENERIMAAN DAERAH PROSUD

Pengapa

KAPALA CABANG DINAS PEKERJAAN HENDEK WILAYAH V KAB. BANGGAI, KAB. BANGGAI KEPULAUAN DAN KAB. BANGGAI LAUT

Sasaran Program (Termediasi Outcome)

MENINGKATNYA NILAI RAPOR PENDIDIKAN PADA PENDIDIKAN KHUSUS

Indikator Program (Termediasi Outcome)

(Persentase Peningkatan Nilai Rapor Pendidikan pada Pendidikan Khusus)

Nama Program

PROGAM PENINGKATAN PENDIDIKAN KHUSUS

Pengapa

KAPALA DINAS PRODUKSI DAN INOVASI PENDIDIKAN

Sasaran Kegiatan (Termediasi Outcome)

TERLAKSANYA PENYEDIAAN JASA PENUNJANG CABANG DINAS WILAYAH I

Indikator Kegiatan (Termediasi Outcome)

(Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Cabang Dinas Wilayah Kota Palu dan Kab. Sigi yang Tersedia)

Nama Kegiatan

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pengapa

KAPALA CABANG DINAS PEKERJAAN HENDEK WILAYAH I KOTA PALU DAN KAB. SIGI

Sasaran Kegiatan (Termediasi Outcome)

TERPENUHINYA ADMINISTRASI UMUM CABANG DINAS WILAYAH I

Indikator Kegiatan (Termediasi Outcome)

(Persentase Laporan Administrasi Umum Cabang Dinas Wilayah Kota Palu dan Kab. Sigi yang Terpenuhi)

Nama Kegiatan

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pengapa

KAPALA CABANG DINAS PEKERJAAN HENDEK WILAYAH I KOTA PALU DAN KAB. SIGI

Sasaran Kegiatan (Termediasi Outcome)

TERLAKSANYA PENYEDIAAN JASA PENUNJANG CABANG DINAS WILAYAH II

Indikator Kegiatan (Termediasi Outcome)

(Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Cabang Dinas Wilayah Kab. Banggai dan Kab. Parigi Moutong yang Tersedia)

Nama Kegiatan

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pengapa

KAPALA CABANG DINAS PEKERJAAN HENDEK WILAYAH II KAB. BANGGAI DAN KAB. PARIGI MOUTONG

Sasaran Kegiatan (Termediasi Outcome)

TERPENUHINYA ADMINISTRASI UMUM CABANG DINAS WILAYAH III

Indikator Kegiatan (Termediasi Outcome)

(Persentase Laporan Administrasi Umum Cabang Dinas Wilayah Kab. Poso dan Kab. Tojo Una-Una yang Terpenuhi)

Nama Kegiatan

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pengapa

KAPALA CABANG DINAS PEKERJAAN HENDEK WILAYAH III KAB. POSO DAN KAB. TOJO UNA-UNA

Sasaran Kegiatan (Termediasi Outcome)

TERBENTYU PENGELOLAAN DAN PELAPORAN KEUANGAN CABANG DINAS WILAYAH III

Indikator Kegiatan (Termediasi Outcome)

(Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Cabang Dinas Wilayah Kab. Poso dan Kab. Tojo Una-Una yang Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP))

Nama Kegiatan

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pengapa

KAPALA CABANG DINAS PEKERJAAN HENDEK WILAYAH III KAB. POSO DAN KAB. TOJO UNA-UNA

Sasaran Kegiatan (Termediasi Outcome)

TERLAKSANYA PENYEDIAAN JASA PENUNJANG CABANG DINAS WILAYAH III

Indikator Kegiatan (Termediasi Outcome)

(Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Cabang Dinas Wilayah Kab. Poso dan Kab. Tojo Una-Una yang Tersedia)

Nama Kegiatan

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pengapa

KAPALA CABANG DINAS PEKERJAAN HENDEK WILAYAH III KAB. POSO DAN KAB. TOJO UNA-UNA

Sasaran Kegiatan (Termediasi Outcome)

TERPENUHINYA ADMINISTRASI UMUM CABANG DINAS WILAYAH VI

Indikator Kegiatan (Termediasi Outcome)

(Persentase Laporan Administrasi Umum Cabang Dinas Wilayah Kab. Toli-toli dan Kab. Buol yang Terpenuhi)

Nama Kegiatan

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pengapa

KAPALA CABANG DINAS PEKERJAAN HENDEK WILAYAH VI KAB. BANGGAI KAB. BANGGAI KEPULAUAN DAN KAB. BANGGAI LAUT

Sasaran Kegiatan (Termediasi Outcome)

TERBENTYU PENGELOLAAN DAN PELAPORAN KEUANGAN CABANG DINAS WILAYAH VI

Indikator Kegiatan (Termediasi Outcome)

(Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Cabang Dinas Wilayah Kab. Toli-toli dan Kab. Buol sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP))

Nama Kegiatan

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pengapa

KAPALA CABANG DINAS PEKERJAAN HENDEK WILAYAH VI KAB. BANGGAI KAB. BANGGAI KEPULAUAN DAN KAB. BANGGAI LAUT

Sasaran Kegiatan (Termediasi Outcome)

TERLAKSANYA PENYEDIAAN JASA PENUNJANG CABANG DINAS WILAYAH VI

Indikator Kegiatan (Termediasi Outcome)

(Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Cabang Dinas Wilayah Kab. Toli-toli dan Kab. Buol yang Tersedia)

Nama Kegiatan

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pengapa

KAPALA CABANG DINAS PEKERJAAN HENDEK WILAYAH VI KAB. BANGGAI KAB. BANGGAI KEPULAUAN DAN KAB. BANGGAI LAUT

Sasaran Kegiatan (Termediasi Outcome)

TERBENTYU PENGELOLAAN DAN PELAPORAN KEUANGAN CABANG DINAS WILAYAH IV

Indikator Kegiatan (Termediasi Outcome)

(Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Cabang Dinas Wilayah Kab. Morowali dan Kab. Morowali Utara sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP))

Nama Kegiatan

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pengapa

KAPALA CABANG DINAS PEKERJAAN HENDEK WILAYAH IV KAB. MOROWALI DAN KAB. MOROWALI UTARA

Sasaran Kegiatan (Termediasi Outcome)

TERPENUHINYA ADMINISTRASI UMUM CABANG DINAS WILAYAH V

Indikator Kegiatan (Termediasi Outcome)

(Persentase Laporan Administrasi Umum Cabang Dinas Wilayah Kab. Banggai, Kab. Banggai Kepulauan dan Kab. Banggai Laut yang Terpenuhi)

Nama Kegiatan

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pengapa

KAPALA CABANG DINAS PEKERJAAN HENDEK WILAYAH V KAB. BANGGAI, KAB. BANGGAI KEPULAUAN DAN KAB. BANGGAI LAUT

Sasaran Kegiatan (Termediasi Outcome)

TERBENTYU PENGELOLAAN DAN PELAPORAN KEUANGAN CABANG DINAS WILAYAH V

Indikator Kegiatan (Termediasi Outcome)

(Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Cabang Dinas Wilayah Kab. Banggai, Kab. Banggai Kepulauan dan Kab. Banggai Laut sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP))

Nama Kegiatan

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pengapa

KAPALA CABANG DINAS PEKERJAAN HENDEK WILAYAH V KAB. BANGGAI, KAB. BANGGAI KEPULAUAN DAN KAB. BANGGAI LAUT

Sasaran Kegiatan (Termediasi Outcome)

TERLAKSANYA PENYEDIAAN JASA PENUNJANG CABANG DINAS WILAYAH V

Indikator Kegiatan (Termediasi Outcome)

(Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Cabang Dinas Wilayah Kab. Banggai, Kab. Banggai Kepulauan dan Kab. Banggai Laut yang Tersedia)

Nama Kegiatan

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pengapa

KAPALA CABANG DINAS PEKERJAAN HENDEK WILAYAH V KAB. BANGGAI, KAB. BANGGAI KEPULAUAN DAN KAB. BANGGAI LAUT

Sasaran Kegiatan (Termediasi Outcome)

MENINGKATNYA KEMAMPUAN LITERASI PESERTA DIDIK PENDIDIKAN KHUSUS

Indikator Kegiatan (Termediasi Outcome)

(Peningkatan Ketrapan Siswa Pendidikan Khusus)

Nama Kegiatan

Penyediaan Pendidikan Khusus

Pengapa

KAPALA DINAS PRODUKSI DAN INOVASI PENDIDIKAN

1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

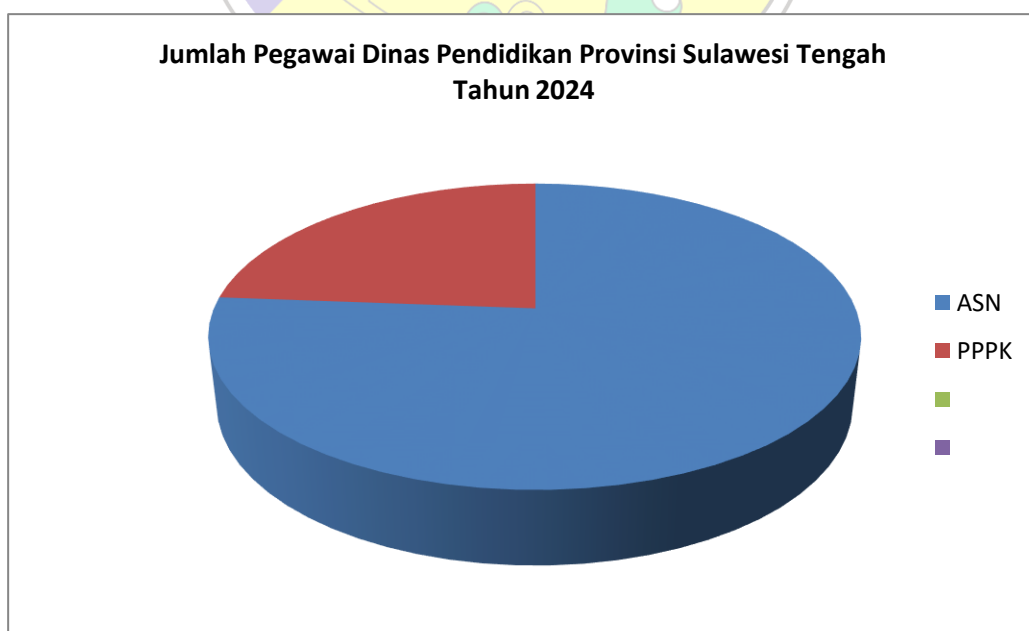
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah didukung dengan sumberdaya yang ada sesuai dengan tugasnya masing-masing yaitu sumber daya aparatur dan sumber daya sarana dan prasarana.

Tabel 1.1
Data Jumlah Pegawai berdasarkan
Jenis Kelamin Tahun 2024

NO	URAIAN	JENIS KELAMIN		TOTAL
		PRIA	WANITA	
1	2	3		4
1	PNS	124	113	237
2	PPPK	42	32	74
TOTAL		166	145	311

Sumber Data : Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum 2024

Pegawai Aparatur Sipil Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah berjumlah 311 orang terdiri dari 237 Orang ASN yang terdiri dari 124 berjenis kelamin Laki-Laki dan 113 orang pegawai berjenis kelamin perempuan, serta 74 PPPK yang terdiri dari 42 orang berjenis kelamin laki-laki dan 32 orang berjenis kelamin wanita.



Tabel 1.2
Rekap Pegawai
Per Golongan Ruang dan Jenis Jelamin

NO	GOLRU	JENIS KELAMIN		JMLH
		PRIA	WANITA	
1	2	3		4
1	II/a	3		3
2	II/b	10	6	16
3	II/c	5	1	6
4	II/d	4	2	6
5	III/a	14	15	29
6	III/b	17	19	36
7	III/c	11	14	25
8	III/d	22	36	58
9	IV/a	15	9	24
10	IV/b	22	9	31
11	IV/c	1	1	2
12	IV/d		1	1
13	IX	42	32	74
TOTAL		166	145	311

Sumber Data : Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 terdapat jumlah Aparatur Sipil Negara yang cukup dan memenuhi semua Bidang sesuai Tugas Pokok dan Fungsi, dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Tabel 1.3
Rekap Pegawai Per Jabatan dan Jenis Kelamin

NO	JABATAN	JENIS KELAMIN		JMLH
		PRIA	WANITA	
1	2	3		4
1	Struktural	21	13	34
2	Fungsional	33	14	47
3	Pelaksana	69	87	156
4	PPPK	42	32	74
TOTAL		165	146	311

Sumber Data : Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum 2024

Tebal 1.4
Rekap PPPK Per Golongan Ruang dan Jenis Jelamin

NO	GOLRU	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		PRIA	WANITA	
1	2	3		4
1	IX	42	32	74
TOTAL		42	32	74

Sumber Data : Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum 2024

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi sesuai Peraturan Gubernur Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf d angka 1 dan Pasal 5 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun Urusan dan Susunan Organisasi yang tertuang dalam Peraturan Gubernur no. 54 Tahun 2016 Pasal 2 dan 38 yaitu :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris membawahi :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Bidang Pembinaan SMA membawahi :
 1. Seksi Pembinaan Peserta Didik SMA;
 2. Seksi Kelembagaan dan Kurikulum SMA; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana SMA;
- d. Bidang Pembinaan SMK membawahi :
 1. Seksi Pembinaan Peserta Didik SMK;

2. Seksi Kelembagaan dan Kurikulum SMK; dan
3. Seksi Sarana dan Prasarana SMK;

e. Bidang Pembinaan PKPLK membawahi :

1. Seksi Pembinaan Peserta Didik PKPLK;
2. Seksi Kelembagaan Kurikulum PKPLK; dan
3. Seksi Sarana dan Prasarana PKPLK;

f. Bidang PTK dan Fasilitasi Tugas Pembantuan membawahi:

1. Seksi PTK SMA;
2. Seksi PTK SMK dan PKPLK; dan
3. Seksi Fasilitasi Tugas Pembantuan;

g. UPT Dinas;

h. Cabang Dinas;

i. Satuan Pendidikan Formal; dan k. Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian Tugas dan Fungsi Dinas yaitu (1) Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :

a. Kepala Dinas mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pembinaan SMA, Pembinaan SMK, Pembinaan PKPLK, PTK, Fasilitasi Tugas Pembantuan dan Kebudayaan;
2. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pembinaan SMA, Pembinaan SMK, Pembinaan PKPLK, PTK, Fasilitasi Tugas Pembantuan dan Kebudayaan;

3. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Pembinaan SMA, Pembinaan SMK, Pembinaan PKPLK, PTK, dan Fasilitasi Tugas Pembantuan dan Kebudayaan;
4. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Dinas. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat.

Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- b. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- c. Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- d. Pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- e. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- f. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada sekretariat yang di pimpin langsung oleh sekretaris terdapat 3 (Tiga) Sub.

Bagian yaitu :

(1) Sub Bagian Perencanaan dan program

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi dalam rangka penyiapan bahan penyusunan program, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Uraian tugas Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Program;
- b. Melaksanakan penghimpunan peraturan perundang- undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dengan pihak dan unit kerja terkait;
- d. Melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
- e. Melaksanakan penyiapan tugas teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
- f. Memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil penyusunan program;
- g. Melaksanakan penyiapan laporan seluruh proses perencanaan program;
- h. Melaksanakan penyusunan RENJA, LAKIP, LKPJ, LPPD, RPJMD dan

Renstra di lingkungan Dinas;

- i. Melaksanakan peyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja di lingkungan Sub Bagian Program;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan, data dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Program dan Dinas; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2.) Sub Bagian Keuangan dan Aset

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi, pengelolaan keuangan dan aset. Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan keuangan dan aset dengan pihak lain dan unit kerja terkait;
- d. Melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
- e. Melakukan urusan perbendaharaan, verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
- f. Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
- g. Melaksanakan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
- h. Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;

- i. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Dinas;
- j. Memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan dan aset;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3.) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat. Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum, dan Korpri;
- c. melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas;
- d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
- e. melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, Pensiun, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, SKP, persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum;
- f. melaksanakan penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
- g. melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan; dan
- j. melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta Dinas.

3. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas

Bidang Pembinaan SMA mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Pembinaan Peserta Didik SMA, Kelembagaan dan Kurikulum SMA dan Sarana dan Prasarana SMA.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pembinaan SMA mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pembinaan Peserta Didik SMA, Kelembagaan dan Kurikulum SMA dan Sarana dan Prasarana SMA;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di pembinaan peserta didik SMA, Kelembagaan dan Kurikulum SMA dan Sarana dan Prasarana SMA;
- c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Pembinaan Peserta Didik SMA, Kelembagaan dan Kurikulum SMA dan Sarana dan Prasarana SMA;
- d. penyiapan kebutuhan pendidik SMA bidang pembinaan peserta didik SMK, kelembagaan, kurikulum SMA, sarana dan prasarana SMA
- e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang Pembinaan Peserta Didik SMA, Kelembagaan dan Kurikulum SMA dan Sarana dan Prasarana SMA;
- f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan

g. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan SMA.

4. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.

Bidang Pembinaan SMK mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi pembinaan peserta didik SMK, kelembagaan, kurikulum SMK, sarana dan prasarana SMK. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan SMK mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan peserta didik SMK, kelembagaan, kurikulum SMK, sarana dan prasarana SMK;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan peserta didik SMK, kelembagaan, kurikulum SMK, sarana dan prasarana SMK;
- c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang pembinaan peserta didik SMK, kelembagaan, kurikulum SMK, sarana dan prasarana SMK;
- d. penyiapan kebutuhan pendidik SMK bidang pembinaan peserta didik SMK, kelembagaan, kurikulum SMK, sarana dan prasarana SMK;
- e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang pembinaan peserta didik SMK, kelembagaan, kurikulum SMK, sarana dan prasarana SMK;
- f. penyiapan penyelarasan kejuruan dan kerjasama dunia usaha dan industri;
- g. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan SMK; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Inovasi Pendidikan

Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Inovasi Pendidikan mempunyai tugas

penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi pembinaan peserta didik Pembinaan Pendidikan Khusus dan Inovasi Pendidikan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Inovasi Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi bidang pembinaan peserta didik Pendidikan Khusus dan Inovasi Pendidikan, kelembagaan, kurikulum Pendidikan Khusus dan Inovasi Pendidikan, sarana dan prasarana Pembinaan Pendidikan Khusus dan Inovasi Pendidikan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan peserta didik Pendidikan Khusus dan Inovasi Pendidikan, kelembagaan, kurikulum Pendidikan Khusus dan Inovasi Pendidikan, sarana dan prasarana Pembinaan Pendidikan Khusus dan Inovasi Pendidikan;
- c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang pembinaan peserta didik Pendidikan Khusus dan Inovasi Pendidikan, kelembagaan, kurikulum Pendidikan Khusus dan Inovasi Pendidikan, sarana dan prasarana Pembinaan Pendidikan Khusus dan Inovasi Pendidikan;
- d. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang pembinaan peserta didik Pendidikan Khusus dan Inovasi Pendidikan, kelembagaan, kurikulum Pendidikan Khusus dan Inovasi Pendidikan, sarana dan prasarana Pembinaan Pendidikan Khusus dan Inovasi Pendidikan;
- e. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan

pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Inovasi Pendidikan;

- f. pelaksanaan pendataan dan validasi data SMP Terbuka;
- g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Inovasi Pendidikan.

6. Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Bidang PTK mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi PTK SMA, PTK SMK, PTK PKPLK.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang PTK mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang PTK SMA, PTK SMK, PTK Pendidikan Khusus dan Inovasi Pendidikan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang PTK SMA, PTK SMK, PTK Pendidikan Khusus dan Inovasi Pendidikan;
- c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang PTK SMA, PTK SMK, PTK Pendidikan Khusus dan Inovasi Pendidikan;
- d. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang PTK SMA, PTK SMK, PTK Pendidikan Khusus dan Inovasi Pendidikan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan

f. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menurut jenis dan jenjang Jabatan Fungsional.

8. Kepegawaian

Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas diangkat sejumlah PNS sesuai dengan formasi dan syarat jabatan. Ketentuan mengenai formasi dan syarat jabatan struktural dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.

- (1) Pengangkatan PNS dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urut kepangkatan dan syarat jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai pola karier PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil analisis jabatan.

9. Keuangan

Untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas, dialokasikan sejumlah anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PNS yang disertai tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara khusus untuk mengelola

keuangan. Pengelola anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usul Kepala Dinas dari PNS yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Masa kerja jabatan pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling lama 5 (lima) tahun dihitung sejak pengangkatannya.

10. Perlengkapan Kantor dan Aset

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas, masing-masing unit organisasi dan PNS, dilengkapi dengan perlengkapan kantor yang meliputi alat, perkakas dan perlengkapan kerja. Ketentuan mengenai penentuan kebutuhan dan standarisasi perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan hasil analisis jabatan.

Pengadaan dan pengelolaan perlengkapan kantor dilakukan sesuai dengan pedoman ketentuan peraturan perundang-undangan. Mutasi jabatan PNS tidak mengakibatkan mutasi perlengkapan kantor. Setiap PNS wajib menjaga dan memelihara perlengkapan kantor yang berada dalam penguasaannya.

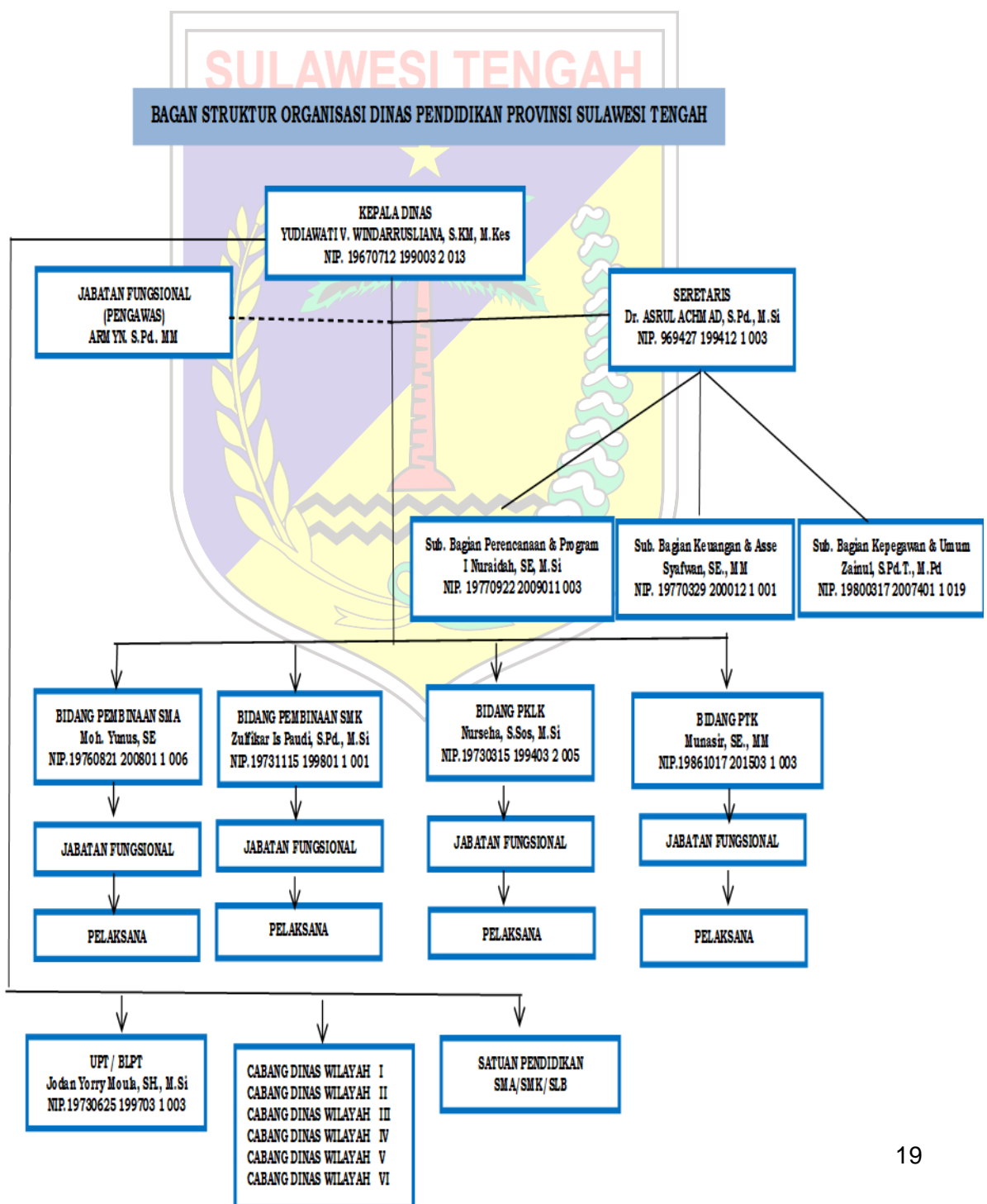
11. Satuan Organisasi

Satuan Organisasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari 1 Sekertaris, 5 Bidang dan 15 seksi serta 3 sub bagian . Uraian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah .

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah dipimpin oleh *Yudiawati V Windarrusliana, SKM., M.Kes* yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

SULAWESI TENGAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH



1.1 Isu -Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan, mengenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal.

Ada 5 (Lima) Isu Strategis strategis yang tengah mendapatkan perhatian khusus yang saat ini menjadi fokus Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah yakni:

- Platform merdeka Belajar (PMM)
- Anak tidak sekolah/ Drop out
- Pendidikan Inklusi,
- Pendidik dan tenaga Kependidikan
- Kesetaraan

1.2 Dukungan SDM, Sarana Prasarana

Salah satu yang dapat menunjang karir dalam dunia pemerintahan yaitu Pendidikan formal dimana Permen pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi RI Nomor 38 Tahun 2018 Pasal 3 dan pasal 4 yaitu Intansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya pada bulan April, Indeks

Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin dan UUD nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional bab I pasal I ayat 11 yaitu Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara dan Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Tebal 1.5
Rekap Pendidikan Pejabat Struktural

NO	PDDKN	ESELON				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	2	3				4
1	D.I – D.III		2	12		14
2	S1 / D.IV	1	8	10		19
3	S2			1		1
	TOTAL	0	1	10	23	34

Sumber Data : Subag Kepegawaian dan Umum Disdik Prov. Sulteng Tahun 2024

Dapat kita simpulkan pendidikan merupakan hal yang penting dalam menunjang karier sebagai ASN. Dimana pendidikan adalah sebuah proses pembelajaran bagi setiap individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai objek tertentu dan spesifik. Pengetahuan yang diperoleh secara formal berakibat pada setiap individu yaitu memiliki pola pikir, perilaku, dan akhlak yang sesuai dengan pendidikan yang diperolehnya. Berikut kami sajikan data pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan pendidikan.



Disamping potensi sumber daya manusia dalam pelayanan kepada Masyarakat juga didukung dengan potensi sarana dan prasarana berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan memiliki sumber daya dan ketersediaan Sarana dan Prasarana seperti:

Tabel 1.6
Rekap sarana dan prasarana berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan


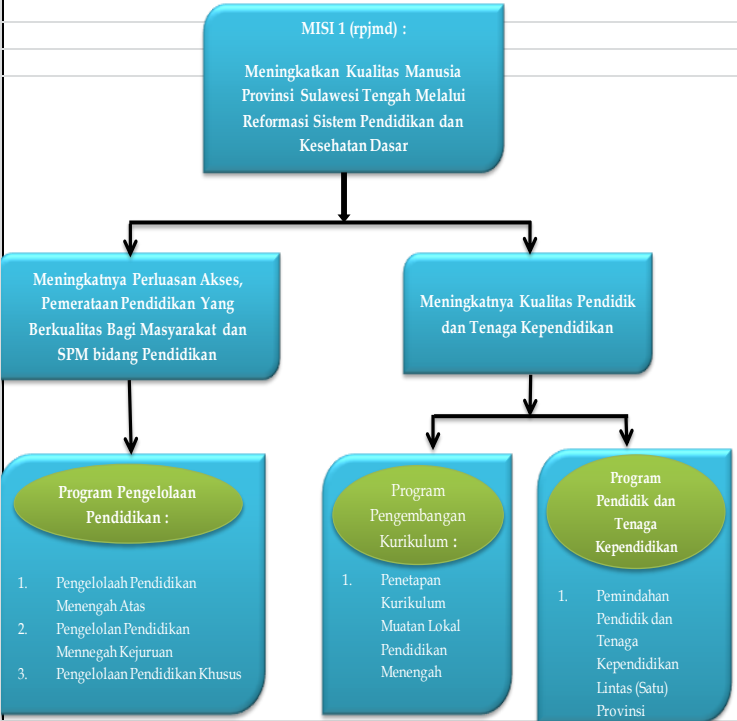
NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	2	3
1	A.C. Window	14
2	alat angkutan darat bermotor lainnya (dst)	1
3	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	1
4	Alat Kantor Lainnya	9
5	Alat Musik Tradisional/Daerah	1
6	alat pelindung lainnya (dst)	1
7	Alat Pembantu Kebakaran	3
8	Alat Pembersih lainnya	2
9	alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak lainnya (dst)	1
10	alat pengangkat lainnya (dst)	1
11	alat peraga kejuruan lainnya (dst)	20
12	alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa dasar lainnya (dst)	2
13	alat peraga praktek sekolah bidang studi : kesenian lainnya (dst)	1
14	alat peraga praktek sekolah bidang studi : olah raga lainnya (dst)	6
15	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2
16	Alat Selam	4
17	Amplifier	2
18	Aset Renovasi	1
19	Audio Tape Reel Recorder	1
20	Bak Air	2
21	Bangku Sekolah	6
22	Bangku Tunggu	4
23	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	3
24	Bangunan Gedung Kantor Permanen	21
25	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	112
26	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	3
27	Bangunan Gedung Perpustakaan Semi Permanen	1
28	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	7
29	Bangunan Gedung Pertemuan Semi Permanen	1
30	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	4
31	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	6
32	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1
33	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lain-lain (dst)	13
34	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	2
35	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	2
36	Bangunan Jembatan (Bangunan Pelengkap Irigasi)	1
37	Bangunan Klinik/Puskesmas	1
38	Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Minum	1
39	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	1
40	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	1
41	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	2
42	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain (dst)	1
43	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain	4

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	2	3
51	CCTV – Camera Control Television System	10
52	Cold Storage (Alat Pendingin)	1
53	Compact Disc Player	1
54	Computer Compatible	2
55	Dispenser	10
56	External/ Portable Hardisk	4
57	Filing Cabinet Besi	13
58	Focusing Screen/Layar LCD Projector	3
59	Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	4
60	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	2
61	Gedung Pos Jaga Permanen	2
62	Gedung Pos Jaga Semi Permanen	3
63	Genset	2
64	Global Positioning System	1
65	Gordyin/Kray	7
66	Handy Cam	5
67	Handy Talky (HT)	1
68	Hard Disk	2
69	Head Set	2
70	Ilmu Pengetahuan Umum	27
71	Instalasi Benteng	4
72	Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Kecil	9
73	Instalasi PLTS Kapasitas Kecil	1
74	Instalasi PLTU Kapasitas Kecil	1
75	Jalan Khusus Lainnya	5
76	Jam Mekanis	2
77	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	1
78	Jaringan Pembawa Kapasitas Sedang	2
79	Jeep	2
80	Karpets	4
81	Kasur/Spring Bed	4
82	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	2
83	Ketel Pemasakan	1
84	Keyboard (Peralatan Mainframe)	3
85	Keyboard (Peralatan Mini Komputer)	2
86	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	2
87	Kipas Angin	6
88	Kit Bahasa A	6
89	Kompors Gas (Alat Dapur)	1
90	Komputer Jaringan lainnya	4
91	Kursi Besi/Metal	9
92	Kursi Biasa	15
93	Kursi Fiber Glas/Plastik	7
94	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	1
95	Kursi Kayu	5
96	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2
97	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4
98	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	3
99	Kursi Kerja Pejabat lainnya	10
100	Kursi Lipat	3
101	Kursi Putar	31
102	Kursi Rapat	11
103	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	2
104	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	1
105	Kursi Tamu	11
106	Lambang Instansi	1
107	Lap Top	360
108	Layar Film/Projector	15
109	LCD Projector/Infocus	1
110	Lemari Besi/Metal	5

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	2	3
111	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	23
112	Lemari Es	5
113	Lemari Kaca	3
114	Lemari Kayu	20
115	Loudspeaker	4
116	Maket & Foto Dokumen Lain-lain	1
117	Megaphone	1
118	Meja 1/2 Biro	20
119	Meja Bundar	2
120	Meja Kerja	13
121	Meja Kerja Kayu	12
122	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1
123	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3
124	Meja Komputer	3
125	Meja Makan Besi	1
126	Meja Rapat	7
127	Meja Rapat Pejabat Eselon II	1
128	Meja Rapat Pejabat Eselon III	1
129	Meja Rapat Pejabat lainnya	1
130	Meja Resepsionis	2
131	Meja Sekolah	15
132	Meja Tamu Biasa	1
133	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	1
134	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon III	2
135	Mesin Absensi	2
136	Mesin Fotocopy Folio	1
137	Mesin Fotocopy Lainnya	1
138	Mesin Giling Bumbu	1
139	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1
140	Mesin Pembuat Es	3
141	Mesin Pemotong Biasa	4
142	Mesin Pemotong Rumput	7
143	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	5
144	Mesin Penghitung Uang	2
145	mesin proses lainnya (dst)	1
146	Meubeleur lainnya	7
147	Microphone	1
148	Microphone/Boom Stand	1
149	Microphone/Wireless MIC	1
150	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	4
151	Mixer PVC	1
152	Monitor	3
153	Monomen/Bangunan Bersejarah Lainnya	1
154	Note Book	29
155	Overhead Projector	2
156	P.C Unit	96
157	Pagar Permanen	1
158	Papan Nama Instansi	2
159	Papan Tulis	6
160	Papan Visual/Papan Nama	1
161	Pengetahuan Bahasa Inggris	1
162	Peralatan Fitnes	1
163	Peralatan Jaringan lainnya	1
164	Peralatan Komputer lainnya	1
165	Peralatan Minikomputer lainnya	1
166	Peralatan Olahraga lainnya (dst)	1
167	Peralatan Personal Komputer lainnya	30
168	peralatan studio audio lainnya (dst)	9
169	peralatan umum lainnya (dst)	1

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	2	3
170	perkakas bengkel service lainnya (dst)	1
171	Pesawat Telephone	2
172	Pianika	1
173	Pita Ukuran (Meteran)	2
174	Pompa Air	1
175	Printer (Peralatan Personal Komputer)	74
176	Rak Piring Alumunium	1
177	recorder display lainnya (dst)	3
178	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	1
179	Saluran Induk (Bangunan Pembawa Irigasi)	1
180	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1
181	Scanner (Universal Tester)	2
182	Sepeda Motor	66
183	Server	5
184	Sofa	6
185	Software Conf Off-Line Computer	1
186	Sound System	4
187	Stabilisator	1
188	Station Wagon	9
189	Stationary Generating Set	1
190	Step Up/Down (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2
191	Sumur Artetis	3
192	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi)	2
193	Tablet PC	4
194	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3
195	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1
196	Telephone Mobile	10
197	Televisi	30
198	Tempat Tidur Besi	1
199	Tempat Tidur Kayu	2
200	Termometer Standar	1
201	Tiang Bendera	2
202	Timbangan Barang	2
203	Timbangan Orang	2
204	Transportable Generating Set	1
205	Treng Air/Tandon Air	2
206	Tripod Camera	1
207	TV Monitor	1
208	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1
209	Unit Power Supply	1
210	Vertikal Blind	2
211	Video Printer	20
212	White Board	4
213	Wireless Access Point	1
Total		1709

1.7 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023

NO	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Bukti Dukung	Status/ Progres Penyelesaian
1	2	3	4	5
1	<p>Dalam melaksanakan evaluasi internal yang berkualitas Dinas Pendidikan diharapkan dapat melakukan evaluasi internal dengan didukung oleh daftar hadir, notulen dan dokumentasi</p>	<p>Evaluasi Internal telah di lakukan di Tahun 2024 dan dilengkapi dengan daftar hadir dan dokumentasi</p>		<p>Selesai</p>
2	<p>Membuat dokumen atau bagan crosscutting kinerja internal yang bersinggungan antara sub bidang satu dengan lainnya serta bidang satu dengan bidang lainnya</p>	<p>Bagan crosscutting kinerja internal telah kami buat dan kami masukkan dalam Bab II LKJ 2024</p>		<p>Selesai</p>

NO	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Bukti Dukung	Status/ Progres Penyelesaian
1	2	3	4	5
3	Membuat laporan monitoring dan evaluasi rencana aksi per tri wulan dan didokumentasikan, serta rencana Aksi	Telah dilaksanakan kegiatan desk yang berkaitan dengan rencana aksi		Selesai
4	Laporan kinerja dapat menginformasikan realisasi capaian kinerja dari rencana aksi kinerja	Telah dilaksanakan kegiatan desk yang berkaitan dengan realisasi dari rencana aksi kinerja		Selesai
6	Melakukan pemantauan terhadap rencana aksi per triwulan	Telah dilaksanakan kegiatan desk yang berkaitan dengan rencana aksi		Selesai
7	Membuat reuiu internal laporan kinerja dan didokumentasikan	dilaksanakan 4 kali di tahun 2024		Selesai

NO	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Bukti Dukung	Status/ Progres Penyelesaian																																																									
1	2	3	4	5																																																									
8	Laporan Kinerja dapat menginformasikan capaian dan perbandingan indikator kinerja utama dari 2 tahun sebelumnya	Dilaksanakan dan masukkan pada LKJ Tahun 2024	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Indikator Kinerja</th> <th colspan="2">Capaian Kinerja</th> </tr> <tr> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td colspan="2">3</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td rowspan="3">Meningkatnya Kualitas Pendidikan</td> <td>Nilai Rapor Pendidikan</td> <td>41,98</td> <td>78,225</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Nilai APS Usia 16 – 18</td> <td>75,84</td> <td>76,29</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Nilai APS Usia 4 – 18</td> <td>75,84</td> <td>56,24</td> </tr> </tbody> </table>	No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		2023	2024	1		3		1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Nilai Rapor Pendidikan	41,98	78,225	2	Nilai APS Usia 16 – 18	75,84	76,29	3	Nilai APS Usia 4 – 18	75,84	56,24	Selesai																																		
No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja																																																											
		2023	2024																																																										
1		3																																																											
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Nilai Rapor Pendidikan	41,98	78,225																																																									
2		Nilai APS Usia 16 – 18	75,84	76,29																																																									
3		Nilai APS Usia 4 – 18	75,84	56,24																																																									
9	Membuat pedoman teknis atau Standar Operasional Pelayanan (SOP) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (AKI)	telah dibuat SOP Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dan dimasukkan pada LKJ Tahun 2024	<p>Prosedur Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Kegiatan</th> <th rowspan="2">Kasubbag perencanaan dan Program</th> <th rowspan="2">Sekretaris</th> <th rowspan="2">Kepala Dinas</th> <th colspan="3">Mutu Baku</th> </tr> <tr> <th>Kegiatan Utama</th> <th>Output</th> <th>Pelaksana</th> <th>Ket</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Perencanaan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Penetapan Tim Evaluasi, dan penyusunan jadwal</td> <td>SK</td> <td>Disposisi Surat</td> <td>SOP alur surat masuk dan surat keluar</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengumpulan Data</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Pengumpulan data dari laporan, memverifikasi dan validasi data</td> <td>5 Hari</td> <td>Data Kinerja yang tervalidasi</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Sekretaris Menganalisis dan Mengevaluasi Informasi yang sdh terkumpul</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Analisis capaian Kinerja, identifikasi hambatan</td> <td>5 Hari</td> <td>Analisis dan rekomendasi Kinerja</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pelaporan Hasil</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Menyusun laporan Hasil Evaluasi dan menyampaikan kepada pimpinan</td> <td>5 Hari</td> <td>laporan dan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Dinas Pendidikan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Tindak Lanjut</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Penetapan Rencana Aksi dan Pemantauan Implementasi Perbaikan</td> <td>1 hari</td> <td>Rencana Aksi Perbaikan AKI</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Kegiatan	Kasubbag perencanaan dan Program	Sekretaris	Kepala Dinas	Mutu Baku			Kegiatan Utama	Output	Pelaksana	Ket	1	Perencanaan				Penetapan Tim Evaluasi, dan penyusunan jadwal	SK	Disposisi Surat	SOP alur surat masuk dan surat keluar	2	Pengumpulan Data				Pengumpulan data dari laporan, memverifikasi dan validasi data	5 Hari	Data Kinerja yang tervalidasi		3	Sekretaris Menganalisis dan Mengevaluasi Informasi yang sdh terkumpul				Analisis capaian Kinerja, identifikasi hambatan	5 Hari	Analisis dan rekomendasi Kinerja		4	Pelaporan Hasil				Menyusun laporan Hasil Evaluasi dan menyampaikan kepada pimpinan	5 Hari	laporan dan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Dinas Pendidikan		5	Tindak Lanjut				Penetapan Rencana Aksi dan Pemantauan Implementasi Perbaikan	1 hari	Rencana Aksi Perbaikan AKI		Selesai
No	Kegiatan	Kasubbag perencanaan dan Program	Sekretaris						Kepala Dinas	Mutu Baku																																																			
				Kegiatan Utama	Output	Pelaksana	Ket																																																						
1	Perencanaan				Penetapan Tim Evaluasi, dan penyusunan jadwal	SK	Disposisi Surat	SOP alur surat masuk dan surat keluar																																																					
2	Pengumpulan Data				Pengumpulan data dari laporan, memverifikasi dan validasi data	5 Hari	Data Kinerja yang tervalidasi																																																						
3	Sekretaris Menganalisis dan Mengevaluasi Informasi yang sdh terkumpul				Analisis capaian Kinerja, identifikasi hambatan	5 Hari	Analisis dan rekomendasi Kinerja																																																						
4	Pelaporan Hasil				Menyusun laporan Hasil Evaluasi dan menyampaikan kepada pimpinan	5 Hari	laporan dan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Dinas Pendidikan																																																						
5	Tindak Lanjut				Penetapan Rencana Aksi dan Pemantauan Implementasi Perbaikan	1 hari	Rencana Aksi Perbaikan AKI																																																						

NO	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Bukti Dukung	Status/ Progres Penyelesaian
1	2	3	4	5
10	Menyusun Standar Operasional Pelayanan (SOP) pengumpulan data	telah dibuat Menyusun Standar Operasional Pelayanan (SOP) pengumpulan data	<p style="text-align: center;">PROSEDUR SINKRONISASI DAPODIK SATUAN PENDIDIKAN</p> <p style="text-align: center;">PROSEDUR PERBAIKAN DATA SERTIFIKASI</p>	Selesai

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya Misi dan tercapainya Visi. Sasaran adalah untuk mengukur tingkat ketercapaian Tujuan Strategis pembangunan pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah. Arah Kebijakan dan Strategi adalah suatu tindakan berdasarkan pemikiran-pemikiran yang sangat analitis, konseptual, rasional dan bersifat komprehensif berbagai langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Visi dan Misi.

Sebagai Dinas yang mengemban amanat mengendalikan pembangunan SDM untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan kebudayaan, Dinas Pendidikan dalam menentukan visi dinas berdasarkan pada capaian kinerja, potensi dan permasalahan, Visi Gubernur dan Wakil Gubernur pada RPJMD Tahun 2021-2026.

Adapun visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 adalah:

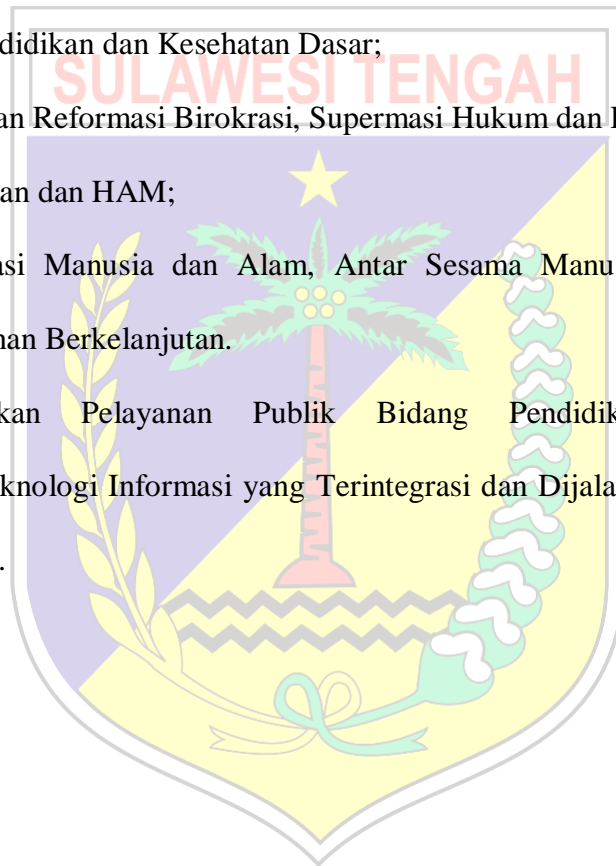
“Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah MENDUKUNG Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur untuk mewujudkan GERAK CEPAT MENUJU SULTENG LEBIH SEJAHTERA DAN LEBIH MAJU“

Visi tersebut di atas menggambarkan komitmen Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah mendukung terwujudnya visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki secara konsisten, bertanggungjawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian

Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, Kemendikbud dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan, bekerja bersama untuk memajukan pendidikan sesuai dengan Visi dan Misi Presiden tersebut.

Untuk mendukung pencapaian Visi Gubernur dan Wakil Gubernur, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur, yaitu menjabarkan **MISI** nomor :

- (1) Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah Melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar;
- (2) Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM;
- (6) Harmonisasi Manusia dan Alam, Antar Sesama Manusia Sebagai Wujud Pembangunan Berkelanjutan.
- (8) Meningkatkan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan dan Kesehatan Berbasis Teknologi Informasi yang Terintegrasi dan Dijalankan secara Sistematis dan Digital.

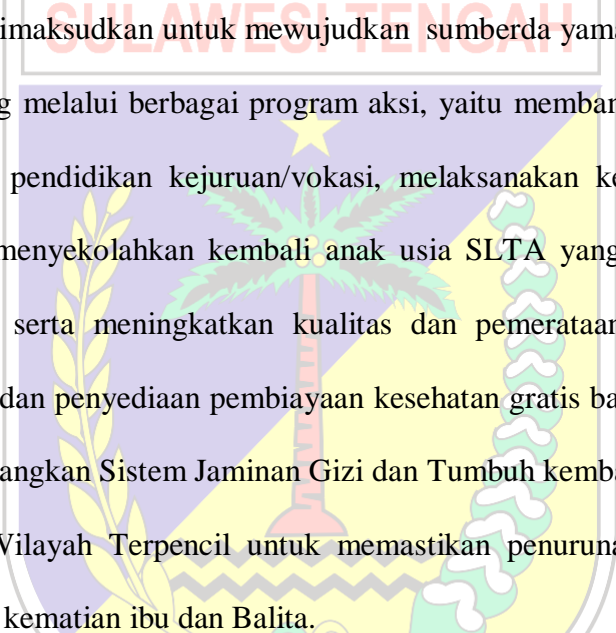


Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahunke:						
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Peningkatan Pendidikan Vokasi Yang Berkualitas dan Diakui Industri	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	1	APK SMK	85.50	86.50	87.50	88.50	89.50	90.95
			2	APM SMK	66.50	67.50	68.50	69.50	70.50	71.50
2	Peningkatan Kepastian Akses dan Layanan Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus yang Bermutu sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat		1	APK SMA	70.50	86.50	87.50	88.50	89.50	90.95
			2	APM SMA	66.50	67.50	68.50	69.50	70.50	71.50
			3	Angka rata-rata Lama Sekolah	8.80	8.85	8.75	9.00	9.50	9.75
			4	Angka Kelulusan (AL) SMA	97.75	98.00	98.25	98.50	98.75	99.00
			5	Angka Putus Sekolah SMA	2.25	2.00	1.75	1.50	1.25	1.00
			6	Angka Kelulusan (AL) SMK	97.75	98.00	98.25	98.50	98.75	99.00
			7	Angka Putus Sekolah SMK	2.25	2.00	1.75	1.50	1.25	1.00
			8	Persentase SMA berakreditasi minimal B	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00	75.00
9	Persentase paket keahlian SMK berakreditasi minimal B	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00	75.00			
		Meningkatnya pelayanan pendidikan kesetaraan dan penyandang disabilitas	1	APM SLB	66.25	66.50	66.75	67.00	66.25	60.00
			2	APK SLB/Paket C	74.25	74.50	74.75	75.00	75.25	60.00
	Meningkatkan Pengadaan dan	Meningkatny	1	Rasio ketersediaan sekolah pendidikan menengah (SMA/MA) per 10000 penduduk usia sekolah menengah	60.25	60.50	60.75	70.00	70.25	70.50

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah dengan misi yang tertuang dalam RPJMN dan RENSTRA KEMENDIKBUD, sebagaimana disajikan pada Tabel sebagai berikut :



Misi 1 ini dimaksudkan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui berbagai program aksi, yaitu membangun sistem pendidikan terpadu berbasis pendidikan kejuruan/vokasi, melaksanakan kegiatan retrieval, yaitu menelusuri dan menyekolahkan kembali anak usia SLTA yang putus sekolah karena alasan ekonomi, serta meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan melalui fasilitasi dan penyediaan pembiayaan kesehatan gratis bagi keluarga miskin dan rentan, mengembangkan Sistem Jaminan Gizi dan Tumbuh kembang Anak di Perkotaan, Perdesaan dan Wilayah Terpencil untuk memastikan penurunan angka stunting dan penurunan angka kematian ibu dan Balita.

Misi 2 ini dimaksudkan untuk menciptakan kelembagaan birokrasi yang kuat, sehingga mampu memberikan pelayanan prima dan berkualitas, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan kepada masyarakat, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Peningkatan sumber daya manusia aparatur pemerintah melalui berbagai pendidikan dan pelatihan teknis untuk meningkatkan kompetensi aparatur yang profesional melalui inovasi berbasis Iptek, sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efisien, efektif dan akuntabel. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan melalui penegakan supremasi hukum sehingga seluruh masyarakat memperoleh pelayanan yang adil dan merata sebagai

perwujudan azas kesamaan di hadapan hukum (equality before the law) serta menjunjung tinggi penegakan Hukum. Program Utama yang hendak dijalankan adalah Membangun Aparatur Sipil negara yang profesional, Reformasi Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Birokrasi yang bertransformasi dari Money Follow Function menjadi Money Follow Program, Reformasi Kelembagaan Birokrasi yang efektif dan efisien, serta Reformasi Pelayanan Publik yang berkualitas melalui digitalisasi dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi secara optimal.

Misi 6 ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup sehingga tercipta suatu kehidupan harmonis dan bahagia, melalui peningkatan kualitas penyediaan air bersih, listrik, perumahan dan penataan lingkungan kumuh. Misi ini akan diwujudkan melalui Program Penataan Ruang Terintegrasi, penataan permukiman dan manajemen pengelolaan sampah, penyediaan ruang terbuka hijau, Mitigasi Perubahan Iklim dan Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup, serta memastikan agar seluruh aktivitas kegiatan masyarakat ramah lingkungan.

Misi 8 ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik terutama bidang pendidikan dan kesehatan dan pelayanan publik pada semua bidang kepada masyarakat melalui pengembangan system terintegrasi dan digitalisasi, guna mewujudkan pelayanan prima, efisien dan efektif.

Strategi dan arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah akan mencapai tujuan dan sasaran Renstra SKPD dengan efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, maka dapat disusun strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2	3	3	3
VISI : GERAK CEPAT MENUJU SULAWESI TENGAH LEBIH SEJAHTERA DAN LEBIH MAJU			
MISI KE-1 : Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah Melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.			
Meningkatnya akses serta kuantitas dan kualitas pendidikan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan SMA	Pembangunan sarana dan prasarana SMA yang berkualitas dan merata	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana SMA
		Pemeliharaan sarana dan prasarana SMA guna menunjang pemerataan pendidikan menengah	
		Memanfaatkan Sekolah Penggerak untuk mendorong dan membina penguatan proses pembelajaran di sekolah-sekolah lain	Meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan menengah umum
		Menyekolahkan kembali anak usia SLTA yang putus sekolah karena alasan ekonomi	Melaksanakan Fasilitasi Bantuan Sosial Fakir Miskin
	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Khusus	Pembangunan sarana dan prasarana Pendidikan Khusus yang berkualitas dan merata	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan Khusus
		Menyediakan materi ajar dan perlengkapan belajar peserta didik sesuai ragam disabilitas	Meningkatkan penyediaan perlengkapan dasar dan pembiayaan pendidikan peserta didik disabilitas dan pendidikan kesetaraan
		Menyediakan modul belajar dan perlengkapan belajar peserta didik kesetaraan	
		Melaksanakan rehabilitasi penyandang Disabilitas dan anak terlantar	
	Meningkatnya Kualitas Pendidikan SMK	Pembangunan sarana dan prasarana SMK yang berkualitas dan merata	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana SMK
		Pemeliharaan sarana dan prasarana SMK guna menunjang pemerataan pendidikan menengah	
		Menyelenggarakan pendidikan vokasi	

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024

Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan sebanyak 4 program, 10 kegiatan, dan 43 sub kegiatan yang ada di Sekretariat dan Bidang, diikuti dengan Cabang Dinas Wilayah 1 (Satu) sebanyak 2 Program, 4 Kegiatan dan 8 Sub Kegiatan, Cabang Dinas Wilayah 2 (Dua) sebanyak 2 Program, 3 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan, Cabang Dinas Wilayah 3 (Tiga) sebanyak 2 Program, 4 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan, Cabang Dinas Wilayah 4 (Empat) sebanyak 2 Program, 3 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan, Cabang Dinas Wilayah 5 (Lima) sebanyak 2 Program, 5 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan, diikuti oleh Cabang Dinas Wilayah 6 (Enam) sebanyak 2 Program, 5 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2024 sejumlah Rp 1.289.892.767.425,- (satu triliun dua ratus delapan puluh sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) yang total anggaran sebelumnya sebesar Rp. 1.322.343.081.742,- (satu triliun tiga ratus dua puluh dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta delapan puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) dengan pengurangan anggaran sebesar Rp. 32.450.314.317,- (tiga puluh dua milyar empat ratus lima puluh juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh belas rupiah), dapat dilihat secara rinci pada tabel 2.3.1 sebagai berikut:

Tabel 2.3.1
Pagu Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan
Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun Anggaran 2024

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU		BERTAMBAH/ BERKURANG
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	
1	2	3	3	4
Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	TOTAL KESELURUHAN	1,322,343,081,742.00	1,289,892,767,425.24	(32,450,314,317)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	850,362,334,362.00	802,675,554,216.24	(47,686,780,145.76)
	- Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,948,520,435.00	2,967,856,794.00	19,336,359
	- Sub. Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,065,770,850.00	2,066,356,950	586,100
	- Sub. Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	35,250,000.00	44,000,000	8,750,000
	- Sub. Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30,000,000.00		(30,000,000)
	- Sub. Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SPD	817,499,585.00	857,499,844	40,000,259
	- Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	839,938,946,566.00	792,183,655,161.24	(47,755,291,405)
	- Sub. Kegiatan : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	372,999,650.00	507,469,850	134,470,200
	- Sub. Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	410,214,380.00	426,059,080	15,844,700
	- Sub. Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2,094,598,000.00	2,175,908,880	81,310,880
	- Sub. Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	836,411,135,021.00	788,221,393,451	(48,189,741,570)
	- Sub. Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	649,999,515.00	852,823,900	202,824,385
	- Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7,185,287,361.00	7,125,942,261.00	(59,345,100)
	- Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7,185,287,361.00	7,125,942,261	(59,345,100)
	- Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	289,580,000.00	398,100,000.00	108,520,000
- Sub. Kegiatan : Penyediaan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	233,580,000.00	340,880,000	107,300,000	
- Sub. Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56,000,000.00	57,220,000	1,220,000	

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU		BERTAMBAH/ BERKURANG
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	
1	2	3		4
Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	468,329,935,582.00	483,406,403,059.00	15,076,467,477.00
	- Kegiatan : Pengelola Pendidikan Menengah Atas	219,459,482,773.00	229,678,941,360.00	10,219,458,587
	- Sub. Kegiatan : Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	6,149,729,958.00	6,149,729,958	-
	- Sub. Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen sekolah menengah Atas (paket C)	1,999,999,700.00	4,099,999,700	2,100,000,000
	- Sub. Kegiatan : Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	699,999,950.00	699,999,950	-
	- Sub. Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	200,000,000.00	200,000,000	-
	- Sub. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah	66,015,720,850.00	71,722,736,534	5,707,015,684
	- Sub. Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1,636,999,875.00	1,636,999,875	-
	- Sub. Kegiatan : Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	750,000,000.00	810,000,000	60,000,000
	- Sub. Kegiatan : Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	142,007,032,440.00	144,359,475,343	2,352,442,903
	- Kegiatan : Pengelola Pendidikan Menengah Kejuruan	232,794,752,664.00	237,272,582,307.00	4,477,829,643
	- Sub. Kegiatan : PEMBANGUNAN RUANG PRAKTIK SISWA	141,860,455,000.00	145,939,276,643	4,078,821,643
	- Sub. Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	354,109,900.00	354,109,900	-
	- Sub. Kegiatan : Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan	330,573,250.00	330,573,250	-
	- Sub. Kegiatan : Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	953,433,925.00	953,433,925	-
	- Sub. Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1,461,592,516.00	1,661,592,516	200,000,000
	- Sub. Kegiatan : Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	204,685,000.00	204,685,000	-
	- Sub. Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah	3,998,605,100.00	3,998,605,100	-
	- Sub. Kegiatan : Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	203,199,950.00	203,199,950	-
	- Sub. Kegiatan : Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa	498,317,000.00	698,317,000	200,000,000
	- Sub. Kegiatan : Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	901,811,963.00	901,811,963	-
	- Sub. Kegiatan : Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	303,671,050.00	302,679,050	(992,000)
	- Sub. Kegiatan : Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	81,724,298,010.00	81,724,298,010	-
	- Kegiatan : pengelolaan pendidikan Khusus dan Inovasi Pendidikan	16,075,700,145.00	16,454,879,392.00	379,179,247
	- Sub. Kegiatan : Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	674,099,850.00	792,626,561	118,526,711
	- Sub. Kegiatan : Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	340,899,995.00	349,050,831	8,150,836
	- Sub. Kegiatan : Pengembangan Karir pendidik dan Tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	172,835,200.00	172,835,200	-
	- Sub. Kegiatan : Penyediaan pendidik dan tenaga Kependidikan bagi Satuan pendidikan Khusus	162,416,650.00	176,741,650	14,325,000
	- Sub. Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	5,611,514,300.00	5,849,511,800	237,997,500
	- Sub. Kegiatan : Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	313,130,250.00	313,130,250	-
	- Sub. Kegiatan : Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	214,533,900.00	214,533,900	-
	- Sub. Kegiatan : Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	8,586,270,000.00	8,586,449,200	179,200
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	106,984,400.00	106,984,400.00
- Kegiatan : PTK MULO	106,984,400.00	106,984,400.00	-	
- Sub. Kegiatan : Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	106,984,400.00	106,984,400	-	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1,088,135,550.00	1,188,135,550.00	100,000,000.00
- Kegiatan : PTK PENATAAN	600,000,000.00	700,000,000.00	100,000,000	
- Sub. Kegiatan : Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan	600,000,000.00	700,000,000	100,000,000	
- Kegiatan : PERITUNGAN	488,135,550.00	488,135,550.00	-	
- Sub. Kegiatan : Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan	488,135,550.00	488,135,550	-	

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU		BERTAMBAH/BE RKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN		
1	2	3		4	
Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	CABDIS 1				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	580,560,730.00	590,539,674.00	9,978,944.00	
	- Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	260,422,500.00	268,942,500.00	8,520,000	
	- Sub. Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260,422,500.00	268,942,500	8,520,000	
	- Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	320,138,230.00	321,597,174.00	1,458,944	
	- Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	320,138,230.00	321,597,174	1,458,944	
	Program Pengelolaan Pendidikan	68,439,000.00	68,459,000.00	20,000.00	
	- Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	34,219,500.00	34,229,500.00	10,000	
	- Sub. Kegiatan : Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	9,800,000.00	9,810,000	10,000	
	- Sub. Kegiatan : Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah	19,969,500.00	19,969,500	-	
	- Sub. Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	4,450,000.00	4,450,000	-	
	- Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	34,219,500.00	34,229,500.00	10,000	
	- Sub. Kegiatan : Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	9,800,000.00	9,810,000	10,000	
	- Sub. Kegiatan : Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah	19,969,500.00	19,969,500	-	
	- Sub. Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	4,450,000.00	4,450,000	-	
	CABDIS 2		424,452,900.00	424,452,900.00	-
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		301,659,200.00	301,659,200.00	-
	- Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		301,659,200.00	301,659,200.00	-
	- Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		301,659,200.00	301,659,200	-
	Program Pengelolaan Pendidikan		122,793,700.00	122,793,700.00	-
	- Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		61,709,150.00	61,709,150.00	-
	- Sub. Kegiatan : Kegiatan Rakor SMA Kab. Donggala		20,565,600.00	20,565,600	-
	- Sub. Kegiatan : Kegiatan Rakor SMA Kab. Parigi Moutong		23,741,100.00	23,741,100	-
	- Sub. Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas		17,402,450.00	17,402,450	-
	- Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		61,084,550.00	61,084,550.00	-
	- Sub. Kegiatan : Kegiatan Rakor SMK Kab. Donggala		21,162,800.00	21,162,800	-
	- Sub. Kegiatan : Kegiatan Rakor SMK Kab. Parigi Moutong		21,797,900.00	21,797,900	-
	- Sub. Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan		18,123,850.00	18,123,850	-
	CABDIS 3		195,549,400.00	195,549,400.00	-
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		37,777,250.00	37,777,250.00	-
	- Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		37,777,250.00	37,777,250.00	-
	- Sub. Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		37,777,250.00	37,777,250	-
	- Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		221,510,450.00	221,510,450.00	-
	- Sub. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		47,747,900.00	47,747,900	-
	- Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		173,762,550.00	173,762,550	-
	Program Pengelolaan Pendidikan		157,772,150.00	157,772,150.00	-
	- Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		78,063,250.00	78,063,250.00	-
	- Sub. Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas		78,063,250.00	78,063,250	-
	- Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		79,708,900.00	79,708,900.00	-
	- Sub. Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan		79,708,900.00	79,708,900	-

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU		BERTAMBAH/BE RKURANG
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	
1	2	3		4
Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	CABDIS 4	379,268,850.00	301,847,850	(77,421,000)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	251,847,850.00	301,847,850.00	50,000,000.00
	- Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	251,847,850.00	301,847,850.00	50,000,000
	- Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	251,847,850.00	301,847,850	50,000,000
	Program Pengelolaan Pendidikan	127,421,000.00	127,421,000.00	-
	- Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	63,558,500.00	63,558,500.00	-
	- Sub. Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	63,558,500.00	63,558,500	-
	- Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	63,862,500.00	63,862,500.00	-
	- Sub. Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	63,862,500.00	63,862,500	-
	CABDIS 5	379,114,545.00	379,114,295.00	(250.00)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	337,316,545.00	337,316,295.00	(250.00)
	- Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121,680,000.00	121,650,000.00	(30,000)
	- Sub. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	121,680,000.00	121,650,000	(30,000)
	- Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36,484,000.00	36,513,750.00	29,750
	- Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36,484,000.00	36,513,750	29,750
	- Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	179,152,545.00	179,152,545.00	-
	- Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	179,152,545.00	179,152,545	-
	Program Pengelolaan Pendidikan	41,798,000.00	41,798,000.00	-
	- Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	20,899,000.00	20,899,000.00	-
	- Sub. Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	20,899,000.00	20,899,000	-
	- Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	20,899,000.00	20,899,000.00	-
	- Sub. Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	20,899,000.00	20,899,000	-
	CABDIS 6	428,306,423.00	428,306,081.00	-342.00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	328,676,423.00	328,676,081.00	-342.00
	- Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	219,872,423.00	219,872,081.00	(342)
	- Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	219,872,423.00	219,872,081	(342)
	- Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27,296,000.00	27,296,000.00	-
	- Sub. Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	27,296,000.00	27,296,000	-
	- Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	81,508,000.00	81,508,000.00	-
	- Sub. Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81,508,000.00	81,508,000	-
	Program Pengelolaan Pendidikan	99,630,000.00	99,630,000.00	-
	- Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	49,815,000.00	49,815,000.00	-
	- Sub. Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	49,815,000.00	49,815,000	-
- Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	49,815,000.00	49,815,000.00	-	
- Sub. Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	49,815,000.00	49,815,000	-	

Sumber data : Subag Perencanaan dan Program Disdik Prov.Sulteng Tahun 2024

2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dituangkan dalam Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

Tabel 2.4
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	PENJELASAN	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Aksesibilitas, Mutu Pendidikan menengah dan pendidikan khusus dan Inovasi Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16-18 Tahun	Jumlah usia 16 s.d 18 yang bersekolah / jumlah penduduk (usia 16 s.d 18) yang bersekolah (APS berguna untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan; BPS)	BPS/Kemendikbud	1. Bidang Pembinaan menengah Atas 2. Bidang Pembinaan menengah Kejuruan 3. Bidang PTK 4. Cabang Dinas Wilayah 1 5. Cabang Dinas Wilayah 2 6. Cabang Dinas Wilayah 3 7. Cabang Dinas Wilayah 4 8. Cabang Dinas Wilayah 5 9. Cabang Dinas Wilayah 6
2		Angka Partisipasi Sekolah (APS)	Jumlah Anak Disabilitas Usia 4- (APS merupakan proporsi dari	BPS/Kemendikbud	Bidang PKLK dan Inovasi Pendidikan
3		Nilai Raport Pendidikan	Sekumpulan capaian pendidikan yang dapat dijadikan petunjuk dan refleksi diri bagi satuan pendidikan, berdasarkan Asesmen Nasional (PP No. 57 tahun 2021 dan Permendikbudristek No. 09 tahun 2022)	Raport Pendidikan/Kemendikbud	1. Bidang Pembinaan menengah Atas 2. Bidang Pembinaan menengah Kejuruan 3. Bidang PTK 4. Bidang PKLK dan Inovasi Pendidikan 5. Cabang Dinas Wilayah 1 6. Cabang Dinas Wilayah 2 7. Cabang Dinas Wilayah 3 8. Cabang Dinas Wilayah 4 9. Cabang Dinas Wilayah 5 10. Cabang Dinas Wilayah 6

Sumber data : Sub.Bagian Perencanaan dan Program

2.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

Perjanjian Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk

melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahunan bersangkutan, tetapi termasuk kinerja sasaran strategis yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 seperti dibawah ini:

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI
TENGAH**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1.1 Nilai Rapor Pendidikan 1.2 Nilai APS Usia 16 - 18 1.3 Nilai APS Usia 4 - 18	80.00 100.00 100.00

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 802.676.454.216	APBN, APBD
2.	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 483.185.884.609	APBN, APBD
3.	Program Pengembangan Kurikulum	Rp. 106.984.400	APBD
4.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 1.188.135.550	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar dalam prinsip good governance, adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Kaitannya dengan pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah bahwa pembangunan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang pada pelaksanaannya menjadi tanggung jawab OPD.

Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil hingga akhirnya dapat memberikan dampak. Sehingga, pengendalian dan pertanggung jawaban program/ kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Dalam hal ini, laporan kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.1.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	INTERVAL NILAI		KRITERIA PENILAIAN	KODE
	REALISASI KINERJA		REALISASI KINERJA	
1	2		3	4
1	91	≤ 100%	Sangat Tinggi	ST
2	76	≤ 90%	Tinggi	T
3	66	≤ 75%	Sedang	ST
4	51	≤ 65%	Rendah	R
5	≤	50%	Sangat Rendah	SR

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.1.1 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024. Pencapaian Indikator tahun 2024 secara ringkas ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1.2
Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Kinerja		2024			Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
			Target	Realisasi	Capaian	
			(%)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Nilai Rapor Pendidikan	80	62,58	78,23	Tinggi
2		Nilai APS Usia 16 – 18	100	76,29	76,29	Tinggi
3		Nilai APS Usia 4 – 18	100	56,24	56,24	Rendah

Sumber data : Subag Perencanaan dan program Disdik Prov. Sulteng Tahun 2024

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa capaian kinerja tahun 2024 pada 3 (tiga indikator) diatas yaitu Nilai Raport Pendidikan, Nilai APS Usia 16-18 dan Nilai APS Usia 4-18 Tahun. Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Di tahun 2024 ada pada skala Tinggi dan rendah dimana target Nilai Raport Pendidikan dengan target 80% capaian sebesar 78.23% posisi kriteria penilaian dalam skala nilai peringkat kerja “Tinggi”, selanjutnya Nilai APS Usia 16-18 Tahun dengan target kinerja 100% dan capaian sebesar 76.29% masuk dalam kategori “Tinggi” sedangkan Nilai APS Usia 4-18 Tahun dengan target kinerja 100% dengan capaian sebesar 56.24% masih masuk dalam posisi kriteria penilaian pada skala nilai perngkat kinerja “Rendah”, rata-rata capaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah dengan tiga indikator kinerja sebesar 69.68%.

Pada beberapa indikator utama diatas, akan tetapi yang perlu kita perhatikan yaitu penyebab dari rendahnya nilai APS usia 4-18 tahun,dimana ada beberapa faktor sehingga Pendidikan inklusi di Provinsi Sulawesi Tengah masih rendah.

Faktor hambatan yang pertama adalah tenaga pengajar atau guru, yang berperan penting dalam melatarbelakangi pendidikan inklusi, sementara realitasnya, guru belum memiliki pengetahuan maupun keterampilan mumpuni dalam menangani ABK. Selain belum sensitif dan proaktif terhadap permasalahan yang dihadapi ABK, belum terdapat kejelasan aturan tentang peran, tugas, dan tanggung jawab setiap guru.

Faktor hambatan yang kedua, merupakan terbatasnya sarana dan prasarana yang baik. Hal ini berkaitan dengan faktor biaya, karena diperlukan anggaran lebih besar untuk memfasilitasi kebutuhan ABK yang beragam, misalnya alat bantu dengar, buku timbul, dan lainnya yang harus disesuaikan dengan kondisi ABK. Karena itu, keterbatasan sarana dan prasarana memengaruhi kemampuan sekolah dalam melayani dan mendampingi ABK, sehingga kegiatan belajar mengajar belum dapat dilakukan maksimal.

Faktor hambatan yang ketiga datang dari rendahnya kesadaran orang tua, dan masyarakat terhadap ABK, orang tua yang tidak mendukung pendidikan inklusi dapat memengaruhi pembentukan sikap dan perilaku anaknya secara negatif. Sementara ABK akan mencapai potensi maksimalnya, apabila orang tua memberikan dukungan penuh, misalnya dukungan dari ibu, membuat anak merasa dirinya berharga. Atau dukungan dari ayah dapat mengembangkan potensi anak. Selain orang tua, masyarakat juga berperan penting dalam menangani ABK. Hal ini dikarenakan keduanya merupakan lingkungan terdekat yang punya peranan penting dengan menerima dan memberikan dukungan, ABK akan lebih berkembang, akan tetapi saat ini orang tua masih ragu menyekolahkan anaknya dengan berbagai alasan. Seperti khawatir anaknya tidak mampu mengikuti pelajaran, dan menghadapi diskriminasi, disamping itu, masyarakat pun kerap membedakan ABK dengan anak lainnya yang dianggap normal. Perilaku ini merupakan tindakan diskriminatif yang menghambat ABK.

Dengan penjelasan beberapa faktor hambatan diatas maka perlu adanya berbagai upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan untuk mencapai pendidikan inklusi yang lebih baik.

Pertama, mengembangkan kemampuan dan model mengajar guru lewat pelatihan. Pelatihan tersebut dapat membantu guru untuk memiliki sikap yang lebih positif

terhadap ABK.

Kedua, memenuhi keterbatasan sarana dan prasarana sekolah. Hal ini menjadi peran pemerintah, untuk memberikan bantuan dana guna mendukung penyediaan fasilitas. Harapannya, ABK pun dapat belajar dengan baik dan mengembangkan kemampuannya.

Ketiga, memberikan wawasan tentang hak setiap anak dalam belajar termasuk ABK, pada orang tua dan masyarakat.

Secara umum Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra 2021-2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 sebanyak 3 (Tiga) sasaran.

1. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan
2. Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Kesetaraan dan Penyandang Disabilitas
3. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pendidikan

3.1.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Dari Tiga Komponen Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, pada Tahun 2024 ketiganya mengalami peningkatan realisasi dibandingkan dengan Tahun 2023. Untuk tiga komponen Indikator Sasaran.

Peningkatan realisasi sebagai upaya perbaikan untuk terus meningkatkan kinerja secara berkelanjutan.

Berikut tabel perbandingan antara realisasi Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2023 sebelumnya:

Tabel 3.1.2
Capaian Kinerja Tahun 2023 dan 2024

No	Indikator Kinerja		Capaian Kinerja	
			2023	2024
			(%)	(%)
1	2		3	
1	Meningkatnya	Nilai Rapor Pendidikan	41,98	78,225
2	Kualitas	Nilai APS Usia 16 - 18	75,84	76,29
3	Pendidikan	Nilai APS Usia 4 - 18	75,84	56,24

Sumber Data : Subag Perencanaan dan Program Tahun 2024

Dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada 3 (tiga) indikator diatas yaitu :

1. Nilai Raport Pendidikan pada tahun 2023 sebesar 41,98% dan pada tahun 2024 sebesar 78.22% yang artinya ada kenaikan capaian kinerja sebesar 36.25% dari tahun sebelumnya.
2. Nilai APS usia 16-18 dimana pada tahun 2023 Nilai APS usia 16 -18 tahun sebesar 75.84% sedangkan pada tahun 2024 meningkat sebesar 76.29%, seperti yang kita ketahui bahwa terjadi peningkatan Nilai APS usia 16.-18 tahun sebesar 0.45% dari tahun sebelumnya.
3. Nilai APS Usia 4-18 tahun dimana pada tahun 2023 Nilai APS Usia 4 -18 tahun sebesar 75.84% sedangkan pada tahun 2024 meningkat menurun

56.24%, seperti yang kita ketahui bahwa terjadi penurunan Nilai APS Usia 4 -18 tahun sebesar 19.6% dari tahun sebelumnya.

Dari hasil capaian diatas perlu kita ketahui bahwa target tahun sebelumnya lebih rendah dari target tahun 2024, dimana untuk APS target di tahun 2023 yaitu 80% sedangkan target untuk tahun 2024 100 ,sehingga berpengaruh dengan capaian kinerja saat ini.

3.1.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah.

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Program pada dasarnya merupakan akumulasi dari berbagai kegiatan yang dihimpun dalam satu bentuk perencanaan berdasarkan potensi yang tersedia. Penetapan program dilakukan berdasarkan visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi serta kebijakan yang diharapkan akan terwujud. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dilakukan melalui program jangka pendek (Renja) serta program jangka menengah (RPJMD) yang di break down dalam bentuk Program dan kegiatan tertera pada Tabel 3.3.1 yaitu :

DINAS

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	OUTPUTE		OUTCOM E		SASARAN (PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN)
	INDIKATOR KINERJA	TARGE T KINERJ A	INDIKATO R KINERJ A	TARGET KINERJA	
1	2	3	4	5	6
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terlaksananya PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	100%			Dinas Pendidikan
X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah	3 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah	100%	Dinas Pendidikan
X.XX.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Dokumen	100%			Dinas Pendidikan
X.XX.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen	100%			Dinas Pendidikan
X.XX.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen	100%			Dinas Pendidikan
X.XX.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen	100%			Dinas Pendidikan
X.XX.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen	100%			Dinas Pendidikan
X.XX.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tercapainya Penyusunan Pelaporan	100%			Dinas Pendidikan
X.XX.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja	100%			Dinas Pendidikan
X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Keuangan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah	3 Dokumen	Tersedianya Dokumen Keuangan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

	X.XX.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji Pegawai yang di Bayarkan	5300 Orang			Dinas Pendidikan
	X.XX.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				Dinas Pendidikan
	X.XX.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				Dinas Pendidikan
	X.XX.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				Dinas Pendidikan
	X.XX.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Dinas Pendidikan
	X.XX.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				Dinas Pendidikan
	X.XX.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				Dinas Pendidikan
	X.XX.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				Dinas Pendidikan
	X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusnya Dokumen BMD di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen BMD di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah	100%	Dinas Pendidikan
	X.XX.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				Dinas Pendidikan
	X.XX.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				Dinas Pendidikan
	X.XX.01.1.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				Dinas Pendidikan
	X.XX.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				Dinas Pendidikan
	X.XX.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				Dinas Pendidikan
	X.XX.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				Dinas Pendidikan
	X.XX.01.1.03.07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				Dinas Pendidikan
	X.XX.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tersusnya Dokumen Pendapatan Daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Pendapatan Daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah	100%	Dinas Pendidikan

		X.XX.01.1.04.01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah				Dinas Pendidikan
		X.XX.01.1.04.02 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah				Dinas Pendidikan
		X.XX.01.1.04.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				Dinas Pendidikan
		X.XX.01.1.04.04 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah				Dinas Pendidikan
		X.XX.01.1.04.05 Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Kegiatan Pengolahan Data Retribusi Daerah				Dinas Pendidikan
		X.XX.01.1.04.06 Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Kegiatan Penetapan Wajib Retribusi Daerah				Dinas Pendidikan
		X.XX.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				Dinas Pendidikan
		X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunya Dokumen Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah	100%	Dinas Pendidikan
		X.XX.01.1.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				Dinas Pendidikan
		X.XX.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				Dinas Pendidikan
		X.XX.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				Dinas Pendidikan
		X.XX.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				Dinas Pendidikan
		X.XX.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				Dinas Pendidikan
		X.XX.01.1.05.06 Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Pensiun				Dinas Pendidikan
		X.XX.01.1.05.07 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				Dinas Pendidikan
		X.XX.01.1.05.08 Pemandahan Tugas ASN	Jumlah Kegiatan Pemandahan Tugas ASN				Dinas Pendidikan
		X.XX.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				Dinas Pendidikan
		X.XX.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				Dinas Pendidikan
		X.XX.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				Dinas Pendidikan

		X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan layanan administrasi umum perkantoran di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah	12 Kegiatan	Tersedianya layanan administrasi umum perkantoran di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah	100%	Dinas Pendidikan
		X.XX.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Dinas Pendidikan
		X.XX.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Dinas Pendidikan
		X.XX.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Dinas Pendidikan
		X.XX.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Dinas Pendidikan
		X.XX.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Dinas Pendidikan
		X.XX.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Dinas Pendidikan
		X.XX.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan/Material				Dinas Pendidikan
		X.XX.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu				Dinas Pendidikan
		X.XX.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Dinas Pendidikan
		X.XX.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				Dinas Pendidikan
		X.XX.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				Dinas Pendidikan
		X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah	10 Kegiatan	Tersedianya layanan Barang Milik Daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah	100%	Dinas Pendidikan
		X.XX.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Dinas Pendidikan
		X.XX.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Dinas Pendidikan
		X.XX.01.1.07.03 Pengadaan Alat Besar	Jumlah Kegiatan Pengadaan Alat Besar				Dinas Pendidikan

		X.XX.01.1.07.04 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				Dinas Pendidikan
		X.XX.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Kegiatan Pengadaan Mebel				Dinas Pendidikan
		X.XX.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Dinas Pendidikan
		X.XX.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya				Dinas Pendidikan
		X.XX.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud				Dinas Pendidikan
		X.XX.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Dinas Pendidikan
		X.XX.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Dinas Pendidikan
		X.XX.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Dinas Pendidikan
		X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah	28 Kegiatan	Tersedianya layanan Jasa Penunjang di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah	100%	Dinas Pendidikan
		X.XX.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Dinas Pendidikan
		X.XX.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Dinas Pendidikan
		X.XX.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Dinas Pendidikan
		X.XX.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Dinas Pendidikan
		X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah	10 Kegiatan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah	100%	Dinas Pendidikan
		X.XX.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Dinas Pendidikan
		X.XX.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Dinas Pendidikan

		X.XX.01.1.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar			Dinas Pendidikan	
		X.XX.01.1.09.04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat/Tak Bermotor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat/Tak Bermotor			Dinas Pendidikan	
		X.XX.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Mebel			Dinas Pendidikan	
		X.XX.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Dinas Pendidikan	
		X.XX.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			Dinas Pendidikan	
		X.XX.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud			Dinas Pendidikan	
		X.XX.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Dinas Pendidikan	
		X.XX.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Dinas Pendidikan	
		X.XX.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Dinas Pendidikan	
		X.XX.01.1.09.12 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah			Dinas Pendidikan	
		1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP Pada Jenjang Pendidikan Menengah (SMA, SMK) dan Jenjang Pendidikan Khusus	100%		Peningkatan Kualitas Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus	
		1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP Pada Jenjang Pendidikan Menengah Atas (%)	100%	Persentase SMA Yang Memenuhi SPM dan 8 SNP	100%	Jenjang Pendidikan SMA baik Negeri dan Swasta
		1.01.02.1.01.01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	31 Sekolah		Sarana Prasarana SMA	
		1.01.02.1.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah SMA yang Terpenuhi Penambahan Ruang Kelas Baru	31 Sekolah		Sarana Prasarana SMA	
		1.01.02.1.01.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	31 Sekolah		Sarana Prasarana SMA	
		1.01.02.1.01.04 Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	31 Sekolah		Sarana Prasarana SMA	
		1.01.02.1.01.05 Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	31 Sekolah		Sarana Prasarana SMA	

		1.01.02.1.01.06 Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	31 Sekolah		Sarana Prasarana SMA
		1.01.02.1.01.07 Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	31 Sekolah		Sarana Prasarana SMA
		1.01.02.1.01.08 Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	31 Sekolah		Sarana Prasarana SMA
		1.01.02.1.01.09 Pembangunan Ruang Laboratorium IPA	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pembangunan Ruang Laboratorium IPA	31 Sekolah		Sarana Prasarana SMA
		1.01.02.1.01.10 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	31 Sekolah		Sarana Prasarana SMA
		1.01.02.1.01.11 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pembangunan Perpustakaan Sekolah	31 Sekolah		Sarana Prasarana SMA
		1.01.02.1.01.12 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	31 Sekolah		Sarana Prasarana SMA
		1.01.02.1.01.13 Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pembangunan Asrama Sekolah	31 Sekolah		Sarana Prasarana SMA
		1.01.02.1.01.14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5 Sekolah		Sarana Prasarana SMA
		1.01.02.1.01.15 Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pembangunan Fasilitas Parkir	31 Sekolah		Sarana Prasarana SMA
		1.01.02.1.01.16 Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pembangunan Kantin Sekolah	31 Sekolah		Sarana Prasarana SMA
		1.01.02.1.01.17 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	31 Sekolah		Sarana Prasarana SMA
		1.01.02.1.01.18 Pembangunan Ruang/Sudut Baca	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pembangunan Ruang/Sudut Baca	20 Unit		Sarana Prasarana SMA
		1.01.02.1.01.19 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah SMA yang Terpenuhi Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	31 Sekolah		Sarana Prasarana SMA
		1.01.02.1.01.20 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah SMA yang Terpenuhi Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	31 Sekolah		Sarana Prasarana SMA
		1.01.02.1.01.21 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah SMA yang Terpenuhi Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	31 Sekolah		Sarana Prasarana SMA
		1.01.02.1.01.22 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah SMA yang Terpenuhi Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	31 Sekolah		Sarana Prasarana SMA
		1.01.02.1.01.23 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah SMA yang Terpenuhi Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	31 Sekolah		Sarana Prasarana SMA
		1.01.02.1.01.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah SMA yang Terpenuhi Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	31 Sekolah		Sarana Prasarana SMA
		1.01.02.1.01.25 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah SMA yang Terpenuhi Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	31 Sekolah		Sarana Prasarana SMA
		1.01.02.1.01.26 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA	Jumlah SMA yang Terpenuhi Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA	31 Sekolah		Sarana Prasarana SMA

		1.01.02.1.01.27 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah SMA yang Terpenuhi Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	31 Sekolah		Sarana Prasarana SMA
		1.01.02.1.01.28 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah SMA yang Terpenuhi Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	31 Sekolah		Sarana Prasarana SMA
		1.01.02.1.01.29 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah SMA yang Terpenuhi Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	31 Sekolah		Sarana Prasarana SMA
		1.01.02.1.01.30 Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah SMA yang Terpenuhi Rehabilitasi Asrama Sekolah	31 Sekolah		Sarana Prasarana SMA
		1.01.02.1.01.31 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah SMA yang Terpenuhi Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	20 Unit		Sarana Prasarana SMA
		1.01.02.1.01.32 Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Jumlah SMA yang Terpenuhi Rehabilitasi Fasilitas Parkir	31 Sekolah		Sarana Prasarana SMA
		1.01.02.1.01.33 Rehabilitasi Kantin Sekolah	Jumlah SMA yang Terpenuhi Rehabilitasi Kantin Sekolah	31 Sekolah		Sarana Prasarana SMA
		1.01.02.1.01.34 Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah SMA yang Terpenuhi Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	31 Sekolah		Sarana Prasarana SMA
		1.01.02.1.01.35 Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca	Jumlah SMA yang Terpenuhi Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca	31 Sekolah		Sarana Prasarana SMA
		1.01.02.1.01.36 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pengadaan Mebel Sekolah	31 Sekolah		Sarana Prasarana SMA
		1.01.02.1.01.37 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	31 Sekolah		Sarana Prasarana SMA
		1.01.02.1.01.38 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pengadaan Perlengkapan Sekolah	4 Sekolah		Sarana Prasarana SMA
		1.01.02.1.01.39 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	31 Sekolah		Sarana Prasarana SMA
		1.01.02.1.01.40 Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	31 Sekolah		Sarana Prasarana SMA
		1.01.02.1.01.41 Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik	31 Sekolah		Sarana Prasarana SMA
		1.01.02.1.01.42 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	31 Sekolah		Sarana Prasarana SMA
		1.01.02.1.01.43 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	31 Sekolah		Sarana Prasarana SMA
		1.01.02.1.01.44 Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	31 Sekolah		Sarana Prasarana SMA
		1.01.02.1.01.45 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas				
		1.01.02.1.01.46 Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	14 sekolah		Sarana Prasarana SMA
		1.01.02.1.01.47 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik			Peserta Didik SMA dan PTK SMA

		1.01.02.1.01.48 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah Dokumen Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	1 Kegiatan		Satuan Pendidikan Menengah Atas
		1.01.02.1.01.49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang mendapatkan pembinaan, pengembangan prestasi dibidang sains, dan seni olimpiade, olahraga	500 Siswa		Peserta Didik SMA dan PTK SMA
		1.01.02.1.01.50 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Tersedianya Jumlah Pendidik dan Tenaga kependidikan	611 PTK		PTK SMA
		1.01.02.1.01.51 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			Satuan Pendidikan Menengah Atas
		1.01.02.1.01.52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah sekolah yang mendapat Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	227 Sekolah		Satuan Pendidikan Menengah Atas
		1.01.02.1.01.53 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang tersalurkan Dana Bos	227 Sekolah		Satuan Pendidikan Menengah Atas
		1.01.02.1.01.54 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang tersalurkan Dana Bos	227 Sekolah		Satuan Pendidikan Menengah Atas
		1.01.02.1.01.55 Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah SMA yang Terpenuhi Pemeliharaan Mebel Sekolah	31 Sekolah		Sarana Prasarana SMA
		1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP Pada Jenjang Pendidikan Menengah Kejuruan (%)	100%	Persentase SMK Yang Memenuhi SPM dan 8 SNP	100%
		1.01.02.1.02.01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)			Sarana Prasarana SMK
		1.01.02.1.02.02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah SMK yang Terpenuhi Penambahan Ruang Kelas Sekolah	25 Sekolah		Sarana Prasarana SMK
		1.01.02.1.02.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah SMK yang Terpenuhi Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	25 Sekolah		Sarana Prasarana SMK
		1.01.02.1.02.04 Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah SMK yang Terpenuhi Pembangunan Ruang Praktik Siswa	25 Sekolah		Sarana Prasarana SMK
		1.01.02.1.02.05 Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah SMK yang Terpenuhi Pembangunan Ruang Laboratorium	25 Sekolah		Sarana Prasarana SMK
		1.01.02.1.02.06 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah SMK yang Terpenuhi Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	25 Sekolah		Sarana Prasarana SMK
		1.01.02.1.02.07 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah SMK yang Terpenuhi Pembangunan Perpustakaan Sekolah	25 Sekolah		Sarana Prasarana SMK
		1.01.02.1.02.08 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah SMK yang Terpenuhi Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	25 Sekolah		Sarana Prasarana SMK
		1.01.02.1.02.09 Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah SMK yang Terpenuhi Pembangunan Asrama Sekolah	25 Sekolah		Sarana Prasarana SMK
		1.01.02.1.02.10 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah SMK yang Terpenuhi Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	25 Sekolah		Sarana Prasarana SMK
		1.01.02.1.02.11 Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah SMK yang Terpenuhi Pembangunan Fasilitas Parkir	25 Sekolah		Sarana Prasarana SMK
		1.01.02.1.02.12 Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah SMK yang Terpenuhi Pembangunan Kantin Sekolah	25 Sekolah		Sarana Prasarana SMK

		1.01.02.1.02.13 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah SMK yang Terpenuhi Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	25 Sekolah		Sarana Prasarana SMK
		1.01.02.1.02.14 Pembangunan Ruang/Sudut Baca	Jumlah SMK yang Terpenuhi Pembangunan Ruang/Sudut Baca	25 Sekolah		Sarana Prasarana SMK
		1.01.02.1.02.15 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah SMK yang Terpenuhi Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	25 Sekolah		Sarana Prasarana SMK
		1.01.02.1.02.16 Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah SMK yang Terpenuhi Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	25 Sekolah		Sarana Prasarana SMK
		1.01.02.1.02.17 Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Jumlah SMK yang Terpenuhi Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	25 Sekolah		Sarana Prasarana SMK
		1.01.02.1.02.18 Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah SMK yang Terpenuhi Rehabilitasi Ruang Laboratorium	25 Sekolah		Sarana Prasarana SMK
		1.01.02.1.02.19 Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah SMK yang Terpenuhi Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	25 Sekolah		Sarana Prasarana SMK
		1.01.02.1.02.20 Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah SMK yang Terpenuhi Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	25 Sekolah		Sarana Prasarana SMK
		1.01.02.1.02.21 Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah SMK yang Terpenuhi Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula	25 Sekolah		Sarana Prasarana SMK
		1.01.02.1.02.22 Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah SMK yang Terpenuhi Rehabilitasi Asrama Sekolah	25 Sekolah		Sarana Prasarana SMK
		1.01.02.1.02.23 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah SMK yang Terpenuhi Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	25 Sekolah		Sarana Prasarana SMK
		1.01.02.1.02.24 Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Jumlah SMK yang Terpenuhi Rehabilitasi Fasilitas Parkir	25 Sekolah		Sarana Prasarana SMK
		1.01.02.1.02.25 Rehabilitasi Kantin Sekolah	Jumlah SMK yang Terpenuhi Rehabilitasi Kantin Sekolah	25 Sekolah		Sarana Prasarana SMK
		1.01.02.1.02.26 Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah SMK yang Terpenuhi Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	25 Sekolah		Sarana Prasarana SMK
		1.01.02.1.02.27 Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca	Jumlah SMK yang Terpenuhi Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca	25 Sekolah		Sarana Prasarana SMK
		1.01.02.1.02.28 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah SMK yang Terpenuhi Pengadaan Mebel Sekolah	25 Sekolah		Sarana Prasarana SMK
		1.01.02.1.02.29 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah SMK yang Terpenuhi Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	25 Sekolah		Sarana Prasarana SMK
		1.01.02.1.02.30 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah SMK yang Terpenuhi Pengadaan Perlengkapan Sekolah	25 Sekolah		Sarana Prasarana SMK
		1.01.02.1.02.31 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah SMK yang Terpenuhi Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			Sarana Prasarana SMK
		1.01.02.1.02.32 Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah SMK yang Terpenuhi Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah			Sarana Prasarana SMK
		1.01.02.1.02.33 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah SMK yang Terpenuhi Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			Sarana Prasarana SMK
		1.01.02.1.02.34 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah SMK yang Terpenuhi Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah			Sarana Prasarana SMK
		1.01.02.1.02.35 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah SMK yang Terpenuhi Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			Sarana Prasarana SMK

		1.01.02.1.02.36 Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah SMK yang Terpenuhi Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah				Sarana Prasarana SMK
		1.01.02.1.02.37 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah SMK yang Terpenuhinya Tersedianya P Biaya Personil Peserta Didik SMK Yang Putus Sekolah dan Tidak Mampu (Pemenuhan SPM)	5400			Peserta Didik SMK Yang Putus Sekolah dan Tidak Mampu
		1.01.02.1.02.38 Pengadaan AlatPraktik dan Peraga Siswa	Jumlah SMK yang Terpenuhi Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa				Sarana Prasarana SMK
		1.01.02.1.02.39 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terimplementasinya kurikulum pembelajaran secara maksimal pada Satuan Pendidikan SMK	185 Sekolah			Peserta Didik SMK dan PTK SMK
		1.01.02.1.02.40 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Dokumen Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	185 Sekolah			Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan
		1.01.02.1.02.41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah pembinaan, pengembangan prestasi dibidang sains, dan seni olimpiade, olahraga, sains, dan seni	2035			Peserta Didik SMK dan PTK SMK
		1.01.02.1.02.42 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Tersedianya Jumlah Pendidik dan Tenaga kependidikan	611 PTK			PTK SMK
		1.01.02.1.02.43 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Pengembangan dan Pembinaan Guru SMK	304			PTK SMK
		1.01.02.1.02.44 Pembangunan Bengkel/Unit Produksi	Jumlah SMK yang Terpenuhi Pembangunan Bengkel/Unit Produksi				Sarana Prasarana SMK
		1.01.02.1.02.45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Serta Manajemen Pengelolaan Pendidikan Menengah Kejuruan	185 Sekolah			Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan
		1.01.02.1.02.46 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang tersalurkan Dana Bos	185 Sekolah			Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan
		1.01.02.1.02.47 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang tersalurkan Dana Bos	185 Sekolah			Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan
		1.01.02.1.02.48 Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah SMK yang Terpenuhi Pemeliharaan Mebel Sekolah				Sarana Prasarana SMK
		1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP Pada Jenjang Pendidikan Khusus (%)	100%	Persentase SLB Yang Memenuhi SPM dan 8 SNP	100%	Jenjang Pendidikan Khusus baik Negeri dan Swasta
		1.01.02.1.03.01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)				Sarana Prasarana SLB
		1.01.02.1.03.02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Penambahan Ruang Kelas Sekolah				Sarana Prasarana SLB
		1.01.02.1.03.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				Sarana Prasarana SLB
		1.01.02.1.03.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				Sarana Prasarana SLB
		1.01.02.1.03.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pembangunan Perpustakaan Sekolah				Sarana Prasarana SLB
		1.01.02.1.03.06 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula				Sarana Prasarana SLB

		1.01.02.1.03.07 Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pembangunan Asrama Sekolah				Sarana Prasarana SLB
		1.01.02.1.03.08 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				Sarana Prasarana SLB
		1.01.02.1.03.09 Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pembangunan Fasilitas Parkir				Sarana Prasarana SLB
		1.01.02.1.03.10 Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pembangunan Kantin Sekolah				Sarana Prasarana SLB
		1.01.02.1.03.11 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah				Sarana Prasarana SLB
		1.01.02.1.03.12 Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pembangunan Ruang Laboratorium				Sarana Prasarana SLB
		1.01.02.1.03.13 Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas				Sarana Prasarana SLB
		1.01.02.1.03.14 Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)				Sarana Prasarana SLB
		1.01.02.1.03.15 Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)				Sarana Prasarana SLB
		1.01.02.1.03.16 Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)				Sarana Prasarana SLB
		1.01.02.1.03.17 Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)				Sarana Prasarana SLB
		1.01.02.1.03.18 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah				Sarana Prasarana SLB
		1.01.02.1.03.19 Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah SLB yang Terpenuhi Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				Sarana Prasarana SLB
		1.01.02.1.03.20 Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah				Sarana Prasarana SLB
		1.01.02.1.03.21 Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah				Sarana Prasarana SLB
		1.01.02.1.03.22 Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah SLB yang Terpenuhi Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula				Sarana Prasarana SLB
		1.01.02.1.03.23 Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Rehabilitasi Asrama Sekolah				Sarana Prasarana SLB
		1.01.02.1.03.24 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				Sarana Prasarana SLB
		1.01.02.1.03.25 Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Jumlah SLB yang Terpenuhi Rehabilitasi Fasilitas Parkir				Sarana Prasarana SLB
		1.01.02.1.03.26 Rehabilitasi Kantin Sekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Rehabilitasi Kantin Sekolah				Sarana Prasarana SLB
		1.01.02.1.03.27 Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah				Sarana Prasarana SLB
		1.01.02.1.03.28 Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah SLB yang Terpenuhi Rehabilitasi Ruang Laboratorium				Sarana Prasarana SLB

		1.01.02.1.03.29 Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah SLB yang Terpenuhi Rehabilitasi Ruang Pusat Anak Berkebutuhan Khusus			Sarana Prasarana SLB
		1.01.02.1.03.30 Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas	Jumlah SLB yang Terpenuhi Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas			Sarana Prasarana SLB
		1.01.02.1.03.31 Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Jumlah SLB yang Terpenuhi Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)			Sarana Prasarana SLB
		1.01.02.1.03.32 Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Jumlah SLB yang Terpenuhi Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita ©			Sarana Prasarana SLB
		1.01.02.1.03.33 Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Jumlah SLB yang Terpenuhi Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)			Sarana Prasarana SLB
		1.01.02.1.03.34 Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Jumlah SLB yang Terpenuhi Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras €			Sarana Prasarana SLB
		1.01.02.1.03.35 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pengadaan Mebel Sekolah			Sarana Prasarana SLB
		1.01.02.1.03.36 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah			Sarana Prasarana SLB
		1.01.02.1.03.37 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pengadaan Perlengkapan Sekolah			Sarana Prasarana SLB
		1.01.02.1.03.38 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			Sarana Prasarana SLB
		1.01.02.1.03.39 Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah			Sarana Prasarana SLB
		1.01.02.1.03.40 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			Sarana Prasarana SLB
		1.01.02.1.03.41 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah			Sarana Prasarana SLB
		1.01.02.1.03.42 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			Sarana Prasarana SLB
		1.01.02.1.03.43 Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah			Sarana Prasarana SLB
		1.01.02.1.03.44 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah SLB yang Terpenuhi Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus			Sarana Prasarana SLB
		1.01.02.1.03.45 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa			Sarana Prasarana SLB
		1.01.02.1.03.46 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terimplementasinya kurikulum pembelajaran secara maksimal pada Satuan Pendidikan SLB	30 Sekolah		Peserta Didik SLB dan PTK SLB
		1.01.02.1.03.47 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Tersedianya Dokumen Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	30 Sekolah		Sarana Prasarana SLB
		1.01.02.1.03.48 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terwujudnya pembinaan, pengembangan prestasi dibidang sains, dan seni olimpiade, olahraga, sains, dan seni	330		Peserta Didik SLB dan PTK SLB

		1.01.02.1.03.49 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Terlaksananya Pengembangan dan Pembinaan Guru SLB	94 Orang			PTK SLB
		1.01.02.1.03.50 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Terlaksananya Pengembangan dan Pembinaan Guru SLB	94 Orang			PTK SLB
		1.01.02.1.03.51 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Terlaksananya pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Serta Manajemen Pengelolaan Pendidikan Khusus	30 Sekolah			Satuan Pendidikan Khusus
		1.01.02.1.03.52 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang tersalurkan Dana Bos	30 Sekolah			Satuan Pendidikan Khusus
		1.01.02.1.03.53 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang tersalurkan Dana Bos	30 Sekolah			Satuan Pendidikan Khusus
		1.01.02.1.03.54 Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pemeliharaan Mebel Sekolah				Sarana Prasarana SLB
		1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Terlaksananya Pemenuhan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pada Jenjang Pendidikan Menengah (SMA, SMK) dan Jenjang Pendidikan Khusus (%)	100%			
		1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Dokumen Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	2 Dokumen	Terlaksananya Pembinaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	100%	Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
		1.01.03.1.01.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kegiatan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	2 Kegiatan			Peserta Didik SMA, SMK dan PTK SMA, SMK
		1.01.03.1.01.02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kegiatan Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah	2 Kegiatan			Peserta Didik SMA, SMK dan PTK SMA, SMK
		1.01.03.1.01.03 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				Peserta Didik SMA, SMK dan PTK SMA, SMK
		1.01.03.1.01.04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	2 Kegiatan			PTK SMA, SMK
		1.01.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan khusus	2 Dokumen	Terlaksananya Pembinaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan khusus	100%	Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan khusus
		1.01.03.1.02.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kegiatan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus				Peserta Didik SLB dan PTK SLB
		1.01.03.1.02.02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kegiatan Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus				Peserta Didik SLB dan PTK SLB

		1.01.03.1.02.03 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumla Kegiatan Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				Peserta Didik SLB dan PTK SLB
		1.01.03.1.02.04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumla Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus				PTK SLB
		1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pemerataan dan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	100%			
		1.01.04.1.01 Pemindehan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Dokumen Pemetaan distribusi PTK	2 Dokumen	Terpenuhinya Pemerataan dan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100%	Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		1.01.04.1.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	2 Kegiatan			PTK Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
		1.01.04.1.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	2 Kegiatan			PTK Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus

CABANG DINAS WILAYAH I S.D VI

CABANG DINAS WILAYAH I S.D VI						
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Persentase Terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP Pada Jenjang Pendidikan Menengah (SMA, SMK) dan Jenjang Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah I	100%			Peningkatan Kualitas Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah I
1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		Persentase Terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP Pada Jenjang Pendidikan Menengah Atas di Cabang Dinas Wilayah I (%)	100%	Persentase SMA Yang Memenuhi SPM dan 8 SNP di Cabang Dinas Wilayah I	100%	Jenjang Pendidikan SMA baik Negeri dan Swasta di Cabang Dinas Wilayah I
	1.01.02.1.01.47 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				Peserta Didik SMA dan PTK SMA
	1.01.02.1.01.48 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah Dokumen Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	227 Sekolah			Satuan Pendidikan Menengah Atas
	1.01.02.1.01.49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang mendapatkan pembinaan, pengembangan prestasi di bidang sains, dan seni olimpiade, olahraga	2497 Siswa			Peserta Didik SMA dan PTK SMA
	1.01.02.1.01.50 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Tersedianya Jumlah Pendidik dan Tenaga kependidikan	611 PTK			PTK SMA
	1.01.02.1.01.51 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				Satuan Pendidikan Menengah Atas
	1.01.02.1.01.52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah sekolah yang mendapat Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	227 Sekolah			Satuan Pendidikan Menengah Atas
1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		Persentase Terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP Pada Jenjang Pendidikan Menengah Kejuruan (%) di Cabang Dinas Wilayah I (%)	100%	Persentase SMK Yang Memenuhi SPM dan 8 SNP di Cabang Dinas Wilayah I (%)	100%	Jenjang Pendidikan SMK baik Negeri dan Swasta di Cabang Dinas Wilayah I
	1.01.02.1.02.39 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terimplementasinya kurikulum pembelajaran secara maksimal pada Satuan Pendidikan SMK	185 Sekolah			Peserta Didik SMK dan PTK SMK

		1.01.02.1.02.40 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Dokumen Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	185 Sekolah			Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan
		1.01.02.1.02.41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah pembinaan, pengembangan prestasi dibidang sains, dan seni olimpiade, olahraga, sains, dan seni	2035			Peserta Didik SMK dan PTK SMK
		1.01.02.1.02.42 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Tersedianya Jumlah Pendidik dan Tenaga kependidikan	611 PTK			PTK SMK
		1.01.02.1.02.43 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Pengembangan dan Pembinaan Guru SMK	304			PTK SMK
		1.01.02.1.02.45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Serta Manajemen Pengelolaan Pendidikan Menengah Kejuruan	185 Sekolah			Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan
		1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP Pada Jenjang Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah I (%)	100%	Persentase SLB Yang Memenuhi SPM dan 8 SNP di Cabang Dinas Wilayah I (%)	100%	Jenjang Pendidikan Khusus baik Negeri dan Swasta di Cabang Dinas Wilayah I
		1.01.02.1.03.47 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Tersedianya Dokumen Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	30 Sekolah			Sarana Prasarana SLB
		1.01.02.1.03.48 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terwujudnya pembinaan, pengembangan prestasi dibidang sains, dan seni olimpiade, olahraga, sains, dan seni	330			Peserta Didik SLB dan PTK SLB
		1.01.02.1.03.49 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Terlaksananya Pengembangan dan Pembinaan Guru SLB	94 Orang			PTK SLB
		1.01.02.1.03.50 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Terlaksananya Pengembangan dan Pembinaan Guru SLB	94 Orang			PTK SLB
		1.01.02.1.03.51 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Terlaksananya pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Serta Manajemen Pengelolaan Pendidikan Khusus	30 Sekolah			Satuan Pendidikan Khusus
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terlaksananya PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PADA KANTOR CABANG DINAS WILAYAH I	100%			CABANG DINAS WILAYAH I
		X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH I	3 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH I	100%	CABANG DINAS WILAYAH I
		X.XX.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen	100%			CABANG DINAS WILAYAH I

		X.XX.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen	100%			CABANG DINAS WILAYAH I
		X.XX.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen	100%			CABANG DINAS WILAYAH I
		X.XX.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen	100%			CABANG DINAS WILAYAH I
		X.XX.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tercapainya Penyusunan Pelaporan	100%			CABANG DINAS WILAYAH I
		X.XX.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja	100%			CABANG DINAS WILAYAH I
		X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunya Dokumen Keuangan di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH I	3 Dokumen	Tersedianya Dokumen Keuangan di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH I	100%	CABANG DINAS WILAYAH I
		X.XX.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				CABANG DINAS WILAYAH I
		X.XX.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				CABANG DINAS WILAYAH I
		X.XX.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				CABANG DINAS WILAYAH I
		X.XX.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				CABANG DINAS WILAYAH I
		X.XX.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				CABANG DINAS WILAYAH I
		X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunya Dokumen Administrasi Kepegawaian di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH I	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH I	100%	CABANG DINAS WILAYAH I
		X.XX.01.1.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				CABANG DINAS WILAYAH I
		X.XX.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				CABANG DINAS WILAYAH I
		X.XX.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				CABANG DINAS WILAYAH I
		X.XX.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				CABANG DINAS WILAYAH I
		X.XX.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				CABANG DINAS WILAYAH I
		X.XX.01.1.05.06 Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Pensiun				CABANG DINAS WILAYAH I
		X.XX.01.1.05.07 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				CABANG DINAS WILAYAH I

		X.XX.01.1.05.08 Pemindahan Tugas ASN	Jumlah Kegiatan Pemindahan Tugas ASN				CABANG DINAS WILAYAH I
		X.XX.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				CABANG DINAS WILAYAH I
		X.XX.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				CABANG DINAS WILAYAH I
		X.XX.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				CABANG DINAS WILAYAH I
		X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan layanan administrasi umum perkantoran diLingkungan CABANG DINAS WILAYAH I	12 Kegiatan	Tersedianya layanan administrasi umum perkantoran di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH I	100%	CABANG DINAS WILAYAH I
		X.XX.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				CABANG DINAS WILAYAH I
		X.XX.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				CABANG DINAS WILAYAH I
		X.XX.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				CABANG DINAS WILAYAH I
		X.XX.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor				CABANG DINAS WILAYAH I
		X.XX.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				CABANG DINAS WILAYAH I
		X.XX.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				CABANG DINAS WILAYAH I
		X.XX.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan/Material				CABANG DINAS WILAYAH I
		X.XX.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu				CABANG DINAS WILAYAH I
		X.XX.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				CABANG DINAS WILAYAH I
		X.XX.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				CABANG DINAS WILAYAH I
		X.XX.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				CABANG DINAS WILAYAH I
		X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH I	10 Kegiatan	Tersedianya layanan Barang Milik Daerah di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH I	100%	CABANG DINAS WILAYAH I
		X.XX.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				CABANG DINAS WILAYAH I

	X.XX.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				CABANG DINAS WILAYAH I
	X.XX.01.1.07.03 Pengadaan Alat Besar	Jumlah Kegiatan Pengadaan Alat Besar				CABANG DINAS WILAYAH I
	X.XX.01.1.07.04 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				CABANG DINAS WILAYAH I
	X.XX.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Kegiatan Pengadaan Mebel				CABANG DINAS WILAYAH I
	X.XX.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				CABANG DINAS WILAYAH I
	X.XX.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya				CABANG DINAS WILAYAH I
	X.XX.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud				CABANG DINAS WILAYAH I
	X.XX.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				CABANG DINAS WILAYAH I
	X.XX.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				CABANG DINAS WILAYAH I
	X.XX.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				CABANG DINAS WILAYAH I
	X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH I	28 Kegiatan	Tersedianya layanan Jasa Penunjang di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH I	100%	CABANG DINAS WILAYAH I
	X.XX.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				CABANG DINAS WILAYAH I
	X.XX.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				CABANG DINAS WILAYAH I
	X.XX.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				CABANG DINAS WILAYAH I
	X.XX.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				CABANG DINAS WILAYAH I
	X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH I	10 Kegiatan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH I	100%	CABANG DINAS WILAYAH I
	X.XX.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
	X.XX.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				CABANG DINAS WILAYAH I
	X.XX.01.1.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				CABANG DINAS WILAYAH I

		X.XX.01.1.09.04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				CABANG DINAS WILAYAH I
		X.XX.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Mebel				CABANG DINAS WILAYAH I
		X.XX.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				CABANG DINAS WILAYAH I
		X.XX.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				CABANG DINAS WILAYAH I
		X.XX.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				CABANG DINAS WILAYAH I
		X.XX.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				CABANG DINAS WILAYAH I
		X.XX.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				CABANG DINAS WILAYAH I
		X.XX.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				CABANG DINAS WILAYAH I

Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah sebagai berikut:

Tabel 3.3.2
Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir Renstra 2026 (Renstra)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Nilai Rapor Pendidikan	62,58	70,07	89,31
2		Nilai APS Usia 16 – 18	76,29	100	76,29
3		Nilai APS Usia 4 – 18	56,24	100	56,24
Sumber Data : Subag perencanaan dan Program Disdik Prov.Sulteng					
#Target nilai raport pendidikan http://ringkas.kemdikbud.go.id/lampiranData2025SPM					

Sesuai tabel diatas dapat kita lihat bahwa untuk realisasi tahun 2024 pada indikator kinerja Nilai rapor pendidikan sebesar 62.58% dengan target nilai reoport pendidikan tahun 2026 sebesar 70.07% maka terdapat tingkat kemajuan sebesar 89.31%, sedangkan untuk indikator kinerja Nilai APS usia 16-18 tahun sebesar 76.29% dengan target jangka menengah yang ada pada renstra sebesar 100% maka terdapat tingkat kemajuan sebesar 76.29% kemudian diikuti indikator kinerja Nilai APS usia 4-18 tahun sebesar 56.24% dengan target jangka menengah yang ada pada renstra sebesar 100% maka terdapat tingkat kemajuan sebesar 56.24%

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

Penguatan Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, Pemerintah yang kapabel,

serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Kemendikbudristek telah menetapkan indikator prioritas Standar Pelayanan Minimum dari indikator Profil Pendidikan Tahun 2023 bagi pemerintah daerah sebagai indikator yang perlu diprioritaskan untuk dibenahi terlebih dahulu.

Untuk itu, Kemendikbudristek secara terus menerus melakukan berbagai inisiatif yang tujuannya adalah untuk mengoptimalkan platform Rapor Pendidikan agar menjadi satu-satunya sumber data pendidikan yang dapat dipergunakan untuk semua pihak, dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Kemendikbudristek dan Kemendagri telah menetapkan delapan (8) indikator prioritas yang ada pada platform Rapor Pendidikan sebagai indikator prioritas Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pendidikan. Kedelapan indikator ini akan digunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Daerah bidang pendidikan dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal. Indikator prioritas ini menjadi dasar Pemerintah Daerah dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan.

Untuk melihat perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 pada Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi IKU Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Tengah dengan Standar Nasional pada tabel berikut:

Tabel 3.1.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

No	Indikator Kinerja		2024			
			Target	Realisasi	Capaian	Standar Nasional
			(%)	(%)	(%)	(%)
1	2		3			
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Nilai Rapor Pendidikan	80	62,58	78,23	100,00
2		Nilai APS Usia 16 - 18	100	76,29	76,29	100,00
3		Nilai APS Usia 4 - 18	100	56,24	56,24	100,00

Berdasarkan table 3.1.4 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah untuk indikator Nilai Rapor Pendidikan ,Nilai APS Usia 16-18 tahun dengan capaian 76.29% dan Nilai APS usia 4-18 tahun dengan capaian sebesar 56.24%, yang mana capaiannya melebihi target Renstra dengan capaian rata-rata sebesar 69.68% di tahun 2024 walaupun belum mencapai standar nasional yaitu 100%, terdapat selisih capaian sebesar 30.32%.

3.1.5 Analisis Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Secara umum capaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan atau mencapai target yang telah ditentukan dan sasaran strategis (resntra) ataupun target RPJMD. Hal ini bisa dilihat capaian Indikator Kinerja Utama maupun Perjanjian Kinerja tahun 2024.

Dengan demikian Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta alternatif solusi yang telah dilakukan tidak diuraikan secara spesifik karena tidak ada permasalahan serius yang dihadapi Dinas Pendidikan Sulawsi Tengah pada Tahun 2024. Penjelasan lebih rinci sebagaimana tersaji dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.1.5
Perbandingan capaian realisasi Tahun 2023, tahun 2024, Nilai SAKIP, Indeks Pendidikan dengan Standar Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Target (Renstra)	Standar Nasional	Capaian (%)
1	2	3	3		4	6
Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Nilai Rapor Pendidikan	-	62,58	80	-	78,23
	Nilai APS Usia 16 - 18	-	76,29	100	-	76,29
	Nilai APS Usia 4 - 18	-	56,24	100	-	56,24
	INDEKS PENDIDIKAN	67,22	70,04	81,44	-	
	Nilai SAKIP	72,25	-	-	72,05	100,28

Sumber data : Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Subag perencanaan Disdik Tahun 2024

Nilai Rapor Pendidikan Tahun 2024 dengan capaian sebesar 78.23, Nilai APS Usia 16-18 tahun dengan capaian 76.29% dan Nilai APS 4-18 Tahun memiliki capaian yaitu sebesar 56.24 % tiga indikator tersebut ditarik dari data Dapodik dan Rapor pendidikan dimana ketiga indikator tersebut melebihi dari target capaian tahun 2024, dapat pula kita lihat pada tabel diatas bahwa nilai Indeks pendidikan tahun 2024 lebih tinggi dibanding indeks pendidikan tahun sebelumnya ,dimana indeks pendidikan tahun 2023 sebesar 67.22% sedangkan nilai indeks pendidikan di tahun 2024 sebesar 70.02%, kemudian pada Indikator Nilai (Kategori Nilai) SAKIP adalah sebesar 72.25 (BB), dari target standar Nasional 72.05 (B) yang direncanakan di dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.28%, dan Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Ketercapaian indikator ini tidak lain dengan adanya komunikasi dan kerja sama yang baik antara pihak sekolah-sekolah yang dalam naungan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, yang mempunyai komitmen yang sama yaitu peningkatan akses dan kualitas pendidikan, serta pelayanan yang baik kepada masyarakat demi kepentingan pendidikan, sehingga capaian kinerja tiap tahunnya mendapat predikat sangat baik.

Analisis penyebab keberhasilan serta kegagalan kinerja Dinas Pendidikan provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada kinerja Program serta kegiatan yang ada pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan permasalahan

pembangunan daerah serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode satu tahun kedepan secara terencana melalui sumber pembiayaan baik APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN.



Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2024 (sd. Triwulan I, II, III dan TW IV)

Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi Tahun 2021 - 2026	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2024	Realisasi Kinerja pada Triwulan I,II,dan III																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2024 (%)	
								I		II		III		IV		13 = 9 + 10 +11+12		14 = 13/8 X 100%								
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
				Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	1 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	NDEKS RB PERANGKAT DAERAH	Indeks	70,05	197.065.916.000	70	197.065.916.000	100	%	802.675.554.216	15	146.139.664.848	25	352.213.604.543	30,00	4.329.466.631	30	245.671.765.216	100	748.354.501.238.000	100,0	93,233		
	Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah	1 01 01 1.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	INDEKS PROFESIONAL ASN PERANGKAT DAERAH						3	Dokumen	2.967.856.794	0,55	453.169.060	0,55	408.290.720	1	1.043.121.010	1,00	851.783.445	3,10	2.756.364.235	103	93		
	Tertaksananya Kegiatan peningkatan Nilai SAKIP, SDM dan Penganggaran Provinsi Sulawesi Tengah	1 01 01 1.01 01	Sub. Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	18,00	7.422.615.200	6	1.699.965.292	3	Dokumen	2.066.356.950	1	419.769.060	1	166.316.320	0,55	564.643.260	0,55	711.120.877	3	1.861.849.517	103	90		
	Tertaksananya Kegiatan peningkatan Nilai SAKIP, SDM dan Penganggaran Provinsi Sulawesi Tengah	1 01 01 1.01 02	Sub. Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA	Dokumen	6,00	2.978.976.000	2	2.292.033.215	1	Dokumen	44.000.000	0,55	15.800.000	0	-	0,15	2.400.000	0,55	24.450.000	1	42.650.000	125	97		
	Tertaksananya Kegiatan peningkatan Nilai SAKIP, SDM dan Penganggaran Provinsi Sulawesi Tengah	1 01 01 1.01 01	Sub. Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6,00	3.971.968.000	2	725.087.612	1	Dokumen	857.499.844	0,15	17.600.000	0,55	241.974.400	0,55	476.077.750	0,15	116.212.568	1	851.864.718	140	99		
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	1 01 06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP) PERANGKAT DAERAH						1	Kegiatan	3.028.732.780		-	0,25	667.950.000	0,55	1.283.277.457	0,25	771.911.187	1,05	2.723.138.644	105	90		
	Terselenggaranya penyediaan peralatan perlengkapan kantor	1 01 06 1.01 02	Sub. Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		6,00	2.482.480.000	2	1.391.443.000	1	pkt	2.175.908.800	0	-	0,25	667.950.000	0,55	1.083.000.000	0,25	356.634.000	1	2.107.584.000	105	97		
	Terselenggaranya Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 01 06 1.01 09	Sub. Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		6,00	4.964.960.000	2	1.341.624.188	1	Laporan	852.823.900		0	-	0,55	200.277.457	0,55	415.277.187	1	615.554.644	110	72			
	Meningkatnya kualitas perencanaan, Pengukuran, evaluasi & pelaporan	1 01 08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH						100	%	7.125.942.261		-	25	2.276.963.027	35	1.900.238.298	50,00	2.736.352.827	110,00	6.913.554.152	110	97		
	Terselenggaranya penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1 01 08 1.01 04	Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		6,00	15.143.128.000	2	9.109.094.540	1	Laporan	7.125.942.261		0,55	2.276.963.027	0,15	1.900.238.298	0,55	2.736.352.827	1	6.913.554.152	125	97			
	Tertaksananya kegiatan Rekonsiliasi dan penyusunan laporan BMD	1 01 03 1.01 05	Sub. Kegiatan : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		6,00	13.901.888.000	2	2.188.309.998	1	laporan	507.469.850	0,5	103.070.000	0	-	0,15	53.625.150	0,55	350.521.276	1,20	507.216.426	120	100		
	Meningkatnya penyelesaian Tindakan/ut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	1 01 03	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	TLHP BPK DAN APIP PERANGKAT DAERAH						3	Laporan	788.221.393.451	0,55	145.571.633.325	1,25	348.796.532.694		-	1,25	240.274.725.743	3,05	734.642.891.762	102	93		
	Terselenggaranya Pemberian gaji dan tunjangan	1 01 02 1.01 01	Sub. Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		381600,00	5.938.402.490.624	#####	1.209.687.785.912	63.600	org	788.221.393.451	27.000	145.571.633.325	9.000	348.796.532.694			27.000,00	240.274.725.743	63.000	734.642.891.762	99	93		
	Meningkatnya pengawasan kearsipan internal perangkat daerah	1 01 09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	TINGKAT DIGITALISASI ARSIP PERANGKAT DAERAH						100	%	824.159.080	15	11.792.463	25	63.868.102	15	49.204.716	45,00	686.470.738	100,00	811.336.019	100	98		
	Tertaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang	1 01 09 1.01 01	Sub. Kegiatan : Penyediaan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas, Jabatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		60,00	2.482.480.000,00			10	unit	340.880.000	1	9.186.395	3	59.215.041	1	48.496.011	5,00	218.927.420	10	335.824.867	100	99		
	Tertaksananya Kegiatan Pemeliharaan Alat dan mesin	1 01 09 1.01 06	Sub. Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		108,00	844.043.200,00	36	267.460.000,00	18	unit	57.220.000	3	2.606.068	4	4.653.061	1	708.705	10,00	45.043.318	18	53.011.152	100	93		
	Tertaksananya Kegiatan Pemeliharaan Gedung/Bangunan	1 01 09 1.01 09	Sub. Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		6,00	844.043.200,00			1	Gedung	426.059.080	0	0	0	-	0	-	1,02	422.500.000	1	422.500.000	102	99		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RRPD Provinsi Tahun 2022 sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Provinsi Tahun 2024	Realisasi Kinerja pada Trivulnial I,II,dan III								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDP Provinsi tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Keterangan					
						7			8		9		10		11		12		13 = 9 + 10 + 11 + 12		14 = 13 / 8 X 100%		17	18		
						K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9 + 10 + 11 + 12	14 = 13 / 8 X 100%	17	18											
				Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
	MENINGKATKAN PARTISIPASI SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS	1 01 02 1.03	Kegiatan	PERSENTASE PENINGKATAN PENDUDUK ANAK DISABILITAS YG MENGETANG PENDIDIKAN				100	%	18.183.479.342	20	22.770.000	30	2.455.387.340	20	8.856.121.270	30,00	6.246.365.092	100	17.580.643.702	100	97				
	terselenggaranya pemberian bantuan peserta didik yg kurang mampu dan kebutuhan sarana penunjang pendidikan	1 01 02 1.03 045	Sub. Kegiatan	Pengadaan Alat Pakik dan Pesga Siswa	Jumlah paket sarana penunjang pendidikan yang disalurkan	pkt	180,00	14.894.880.000			30	pkt	792.626.561			-	0	-	28,00	714.449.750	28	714.449.750	93	90	DAK SESEUAI RISES POKIR	
	terselenggaranya pemberian bantuan sarana penunjang pengelolan satuan pendidikan	1 01 02 1.03 036	Sub. Kegiatan	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah paket yang disalurkan	pkt	180,00	14.894.880.000			30	pkt	349.050.831			-	0	-	30,00	348.648.800	30	348.648.800	100	100		
	Terkelompoknya Pelatihan dan Sosialisasi Guru Penggerak	1 01 02 1.03 050	Sub. Kegiatan	Pengembangan Kapir pendidik dan Tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah pendidik yang mengikuti pelatihan guru penggerak	org	180,00	4.964.960.000	60	1.065.058.502	30	org	172.835.200			-	28	121.866.060	8,00	46.754.200	36	168.620.260	120	98		
	Tersedianya guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	1 01 02 1.03 049	Sub. Kegiatan	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi Satuan pendidikan inklusif	Jumlah Guru Pembimbing Khusus pada Sekolah Inklusif	org	180,00	2.978.976.000	60	558.867.000	30	org	176.741.650	0	-	0	-	30,21	164.103.500	-	30	164.103.500	101	93		
	Terkelompoknya Lomba OSN, FLSN dan Lomba Keterampilan Siswa Anak Berkebutuhan Khusus	1 01 02 1.03 049	Sub. Kegiatan	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Peserta didik yang mengikuti lomba sesuai bakat/minat anak berkebutuhan khusus	peserta didik	600,00	2.978.976.000	200	546.725.695	100	peserta didik	313.130.250			28,21	92.672.440	21,32	59.549.810	50,00	154.247.952	100	306.470.202	100	98	
	Terbitnya warga negara usia 4 - 18 tahun penyandang disabilitas yang bersekolah	1 01 02 1.03 080	Sub. Kegiatan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Khusus	Dokumen	6,00	2.978.976.000			1	Dokumen	214.533.900	0,45	22.770.000	0,55	175.303.900	0	0,15	11.450.000	1	209.523.900	115	98		
	terselenggaranya penyaluran dana BOS	1 01 02 1.03 053	Sub. Kegiatan	Pengalokasian Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	jumlah laporan satuan pendidikan penerima dana BOS	peserta didik	180,00	22.501.198.720	60	8.568.080.000	30	peserta didik	8.586.449.200			12	2.187.411.000	10	4.964.834.800	8,00	1.292.923.200	30	8.445.169.000	100	98	
	Terkelompoknya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	1 01 02 1.03 052	Sub. Kegiatan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah sekolah Pendidikan Khusus yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidik	180,00	2.978.976.000	60	6.933.190.545	30	Satuan Pendidik	5.849.511.800			20	3.545.767.100	10,34	1.949.291.240	30	5.495.058.340	101	94			
		01 02 1.02 014	Sub. Kegiatan	Pemantauan Sarana, Pasarana dan Utilitas Sekolah			756,00		252		126	pkt	1.728.599.950					126,00	1.728.599.950	126	1.728.599.950	100	100			
	Meningkatnya program kurikulum merdeka pada satuan pendidikan menengah	1 01 03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	persentase satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang melaksanakan kurikulum merdeka belajar	%				100	%	106.984.400			2	106.983.400	100			100	106.983.400	100	100			
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan silabus Muatan Lokal	1 01 03 1.01	Kegiatan	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Persentase pemenuhan kebutuhan silabus muatan lokal					100	%				2	106.983.400				2	106.983.400	100	100			
	Tersedianya silabus muatan lokal	1 01 03 1.01 002	Sub. Kegiatan	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Silabus muatan lokal yang tersedia	Dokumen	12,00	2.482.480.000	4		2	Dokumen	106.984.400			2	106.983.400			-	-	2	106.983.400	100	100	
	Meningkatnya ketersediaan pendidik pada satuan pendidikan kewenangan provinsi	1 01 04		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Indeks Distribusi guru	%				100	%	2.376.271.100	20	841.732.762	30	140.685.978	20	138.756.664	30,00	1.153.009.020	100,00	2.271.184.424	100	96		
	Tersedianya data kebutuhan pendidik pada satuan pendidikan kewenangan Provinsi	1 01 04 1.01	Kegiatan	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi	Persentase satuan pendidikan yang terpenuhi data kebutuhan pendikiknya					100	%	1.188.135.550	20	420.866.381	30	70.342.989	20	67.878.332	30,00	576.504.510	100,00	1.135.592.212	100	96		
	Terkelompoknya Keg. Simtek Pra Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) bag PTK yang belum bersertifikat pendidik Bagi Tenaga Pendidik Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus tahun 2024	1 01 04 1.01 001	Sub. Kegiatan	Pelatihan dan Penetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (SMA)	Jumlah guru tipe B yang mengikuti Keg. Simtek Pra Program Pendidikan Profesi Guru (PPG)	org	528,00	2.482.480.000	176	1.753.472.906	88	org	700.000.000	46,00	141.322.530	21,00	70.342.989	13	67.878.332	20,00	388.539.074	100	668.102.925	114	95	
	Terkelompoknya Pendistribusian kebutuhan guru mata pelajaran pada satuan pendidikan kewenangan provinsi	1 01 04 1.01 002	Sub. Kegiatan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (SMK)	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Distribusi Guru pada satuan pendidikan kewenangan provinsi	Dokumen	6,00	2.482.480.000	2	1.736.214.961	1	Dokumen	488.135.550	0,55	279.543.851	-	-	0	0,55	187.945.436	1	467.489.287	110	96		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi Tahun 2021 - 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun 2022 sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2024				Realisasi Kinerja pada Triwulan I, II dan III				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Keterangan			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		%	Terdapat Lembar	
CABANG DINAS WILAYAH I (SATU)																								
	Meningkatnya akses pendidikan	1 01 06	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	70,05	197.065.916.000	70	197.065.916.000	100	%	590.539.674	20	129.540.700	25	167.217.790	30,00	178.924.800	30	134.859.696	105	610.542.986.000	105,0	103,387
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	1 01 06 1 01	Kegiatan - Administrasi Umum Perangkat Daerah	INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP) PERANGKAT DAERAH						1	Laporan	268.942.500	0,15	89.042.000	0,15	89.042.000	0,25	50.730.000	0,55	31.738.000	1,1	260.552.000	110	97
	Terselenggaranya Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 01 06 1 01 09	Sub. Kegiatan - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		6,00	844.043.200	2		1	Laporan	268.942.500	0,15	89.042.000	0,15	89.042.000	0,25	50.730.000	0,55	31.738.000	1	260.552.000	110	97
	Meningkatnya kualitas perencanaan, Pengukuran, evaluasi & pelaporan	1 01 08	Kegiatan - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH						1	Laporan	321.597.174	0,5	147.709.700	0	-	0,55	139.918.500	0,15	30.381.000	1,2	318.009.200	120	99
	Terselenggaranya penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1 01 08 1 01 04	Sub. Kegiatan - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		6,00	844.043.200	2	369.201.000	1	Laporan	321.597.174	0,5	147.709.700	0	-	0,55	139.918.500	0,15	30.381.000	1	318.009.200	120	99
	Meningkatnya akses pendidikan	1 01 2	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase SPM dan SNP yang tercapai pada satuan pendidikan SMA, SMK, dan pendidikan khusus	%					100	%	119.754.650	20	2.627.500	30	7.077.500	20	45.466.800	30,00	63.367.350	100,00	118.539.150	100	99
	Meningkatnya akses terhadap layanan pendidikan SMA	1 01 2 1 01	Kegiatan - Pengelolaan Pendidikan Menengah Atas	PERSENTASE PENURUNAN ANGKA PUTUS SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SMA						100	%	34.229.500	20	-	30	4.450.000	20	19.902.000	30,00	9.662.000	100	34.014.000	100	99
	Tertindakannya Lomba OSN, FLSN dan Lomba Keterampilan Siswa SMA	1 01 02 1 01 014	Sub. Kegiatan - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Peserta didik yang mengikuti lomba sesuai bakat/minat SMA	Peserta Didik	600,00	848.342.400	200		100	Peserta Didik	9.810.000		0	100,00	9.662.000		100	9.662.000	100	9.662.000	100	98	
	Tertindakannya Pelatihan dan Sosialisasi Guru Penggerak	1 01 02 1 01 050	Sub. Kegiatan - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah pendidik yang mengikuti pelatihan guru penggerak	mgmp	84,00	848.342.400	28		14	mgmp	19.969.500		14	19.902.000	-	-	14	19.902.000	100	100	100	100	
	Tertindakannya Pembinaan Pengelola Rapor Pendidikan	1 01 02 1 01 052	Sub. Kegiatan - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti Pembinaan Pengelola Rapor Pendidikan	Satuan Pendidik	1362,00	848.342.400	454	223.152.000	227	Satuan Pendidik	4.450.000		227	4.450.000	-	-	227	4.450.000	100	100	100	100	
	Meningkatnya akses terhadap layanan pendidikan SMK	1 01 02 1 02	Kegiatan - Pengelolaan Pendidikan Menengah Kejuruan	PERSENTASE PENURUNAN ANGKA PUTUS SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SMK						100	%	34.229.500	20	-	30	-	20	19.902.000	30,00	14.112.000	100	34.014.000	100	99
	Tertindakannya Lomba OSN, FLSN dan Lomba Keterampilan Siswa SMK	1 01 02 1 02 049	Sub. Kegiatan - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Peserta didik yang mengikuti lomba sesuai bakat/minat SMK	Peserta Didik	600,00	848.342.400	200		100	Peserta Didik	9.810.000		0	100,00	9.662.000		100	9.662.000	100	9.662.000	100	98	
	Tertindakannya Pelatihan dan Sosialisasi Guru Penggerak	1 01 02 1 02 050	Sub. Kegiatan - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah pendidik yang mengikuti pelatihan guru penggerak	mgmp	84,00	848.342.400	28		14	mgmp	19.969.500		14	19.902.000	-	-	14	19.902.000	100	100	100	100	
	Tertindakannya Pembinaan Pengelola Rapor Pendidikan	1 01 02 1 02 052	Sub. Kegiatan - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti Pembinaan Pengelola Rapor Pendidikan	satuan pendidik	1110,00	848.342.400	370	223.152.000	185	satuan pendidik	4.450.000		0	-	0	-	185,00	4.450.000	185	4.450.000	100	100	
CABANG DINAS WILAYAH II (DUA)																								
	Meningkatnya akses pendidikan	1 01 06	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	70,05	197.065.916.000	70	197.065.916.000	100	%	301.659.200	15	40.498.700	25	78.175.790	30,00	88.390.800	30	84.559.696	100	291.624.986	100,0	96,674
	Meningkatnya kualitas perencanaan, Pengukuran, evaluasi & pelaporan	1 01 08	Kegiatan - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH						1	Laporan	301.659.200		40.498.700		78.175.790		88.390.800		84.559.696		291.624.986		
	Terselenggaranya penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1 01 08 1 01 001	Sub. Kegiatan - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6,00	844.043.200	2	421.052.385	1	Laporan	301.659.200	0,15	40.498.700	0,25	78.175.790	0,32	88.390.800	0,32	84.559.696	1	291.624.986	104	97
	Meningkatnya akses pendidikan	1 01 02	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase SPM dan SNP yang tercapai pada satuan pendidikan SMA, SMK, dan pendidikan khusus	%					100	%	122.793.700	20	20.723.000	30	20.723.000	20	73.881.900	30,00	7.160.550	100,00	122.488.450	100	100
	Meningkatnya akses terhadap layanan pendidikan SMA	1 01 2 1 01	Kegiatan - Pengelolaan Pendidikan Menengah Atas	PERSENTASE PENURUNAN ANGKA PUTUS SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SMA						227	uan Pendik	61.709.150	53	6.744.000	53	6.744.000	56	45.050.200	65,00	3.020.200	227	61.558.400	100	100
	Tertindakannya Pembinaan Pengelola Rapor Pendidikan	1 01 02 1 01 014	Sub. Kegiatan - Pembinaan kelembagaan dan manajemen SMA	Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti Pembinaan Pengelola Rapor Pendidikan	Satuan Pendidik	1362,00	848.342.400	454	268.706.375	227	Satuan Pendidik	61.709.150	53	6.744.000	53	6.744.000	56	45.050.200	65,00	3.020.200	227	61.558.400	100	100
	Meningkatnya akses terhadap layanan pendidikan SMK	1 01 02 1 02	Kegiatan - Pengelolaan Pendidikan Menengah Kejuruan	PERSENTASE PENURUNAN ANGKA PUTUS SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SMK						185	uan Pendik	61.084.550	43	13.979.000	43	13.979.000	74	28.831.700	25,00	4.140.350	185	60.930.050	100	100
	Tertindakannya Pembinaan Pengelola Rapor Pendidikan	1 01 02 1 02 052	Sub. Kegiatan - Pembinaan kelembagaan dan manajemen SMK	Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti Pembinaan Pengelola Rapor Pendidikan	Satuan Pendidik	1110,00	848.342.400	370	241.816.600	185	Satuan Pendidik	61.084.550	43	13.979.000	43	13.979.000	74	28.831.700	25,00	4.140.350	185	60.930.050	100	100
CABANG DINAS WILAYAH III (TIGA)																								
	Meningkatnya akses pendidikan	1 01 06	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	70,05	197.065.916.000	70	197.065.916.000	100	%	259.287.700	15	19.913.900	25	19.913.900	30,00	117.791.300	30	100.211.300	100	287.830.400	100,0	99,438
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	1 01 6	Kegiatan - Administrasi Umum Perangkat Daerah	INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP) PERANGKAT DAERAH						1	Dokumen	85.525.150		2.627.500		2.627.500		25.564.800		53.705.350		84.525.150		
	Terselenggaranya Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 01 06 1 01 002	Sub. Kegiatan - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	6,00	844.043.200	2		1	Dokumen	37.777.250	0,15	1.453.550	0,15	1.453.550	0,55	20.800.050	0,25	13.670.100	1	37.377.250	110	99
	Meningkatnya kualitas perencanaan, Pengukuran, evaluasi & pelaporan	1 01 08	Kegiatan - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH						1	Laporan	173.762.500	0,15	17.286.400	0,15	17.286.400	0,55	92.226.500	0,27	46.505.950	1,12	173.305.250	112	100
	Terselenggaranya penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1 01 08 1 01 04	Sub. Kegiatan - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6,00	844.043.200	2	471.897.625	1	Laporan	173.762.500	0,15	17.286.400	0,15	17.286.400	0,55	92.226.500	0,27	46.505.950	1	173.305.250	112	100
	Meningkatnya akses pendidikan	1 01 02	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase SPM dan SNP yang tercapai pada satuan pendidikan SMA, SMK, dan pendidikan khusus	%					100	%	157.772.150	20	-	30	63.810.600	20	60.396.050	30,00	33.530.500	100,00	157.737.150	100	100
	Meningkatnya akses terhadap layanan pendidikan SMA	1 01 2 1 01	Kegiatan - Pengelolaan Pendidikan Menengah Atas	PERSENTASE PENURUNAN ANGKA PUTUS SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SMA						227	uan pendik	78.063.250		-	97	31.905.300	130	46.157.950	-	-	227	78.063.250	100	100
	Tertindakannya Pembinaan Pengelola Rapor Pendidikan	1 01 02 1 01 014	Sub. Kegiatan - Pembinaan kelembagaan dan manajemen SMA	Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti Pembinaan Pengelola Rapor Pendidikan	satuan pendidik	1362,00	848.342.400	454	114.062.525	227	satuan pendidik	78.063.250		-	97	31.905.300	130	46.157.950	-	-	227	78.063.250	100	100
	Meningkatnya akses terhadap layanan pendidikan SMK	1 01 2 1 01	Kegiatan - Pengelolaan Pendidikan Menengah Kejuruan	PERSENTASE PENURUNAN ANGKA PUTUS SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SMK						185	uan pendik	79.708.900		-	92	31.905.300	45	14.238.100	48,00	33.530.500	185	79.673.900	100	100
	Tertindakannya Pembinaan Pengelola Rapor Pendidikan	1 01 02 1 01 014	Sub. Kegiatan - Pembinaan kelembagaan dan manajemen SMK	Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti Pembinaan Pengelola Rapor Pendidikan	satuan pendidik	1110,00	848.342.400	370	118.382.275	185	satuan pendidik	79.708.900		-	92	31.905.300	45	14.238.100	48,00	33.530.500	185	79.673.900	100	100

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Regulasi/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan) /Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi Tahun 2021 - 2026	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi s/d RKPD Provinsi Tahun 2022 sampai		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2024	Realisasi Kinerja pada Triwulan I, II, dan III				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 14 = 13/9 x 100%	Keterangan											
						6	7		I		II		13 = 9 + 10 + 11	14	15													
									K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp							
CABANG DINAS WILAYAH IV (EMPAT)																												
	Meningkatnya akses pendidikan	1 01 06	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	70,05	197.065.916.000	70	197.065.916.000	100	%	301.847.850	15	-	25	30,00	159.436.700	30	138.310.817	100	297.747.517	100,0	98,642					
	Meningkatnya kualitas perencanaan, Pengukuran, evaluasi & pelaporan	1 01 2 1.01	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH					1	Dokumen	301.847.850					0,55	159.436.700	0,55	138.310.817	1,1	297.747.517	110	99				
	Terselenggaranya penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1 01 08 1.01 04	Sub. Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dokumen	6,00	844.043.200	2	350.204.058	1	Dokumen	301.847.850				0,55	159.436.700	0,55	138.310.817	1	297.747.517	110	99				
	Meningkatnya akses pendidikan	1 01 02	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase SPM dan SNP yang tercapai pada satuan pendidikan SMA, SMK, dan pendidikan khusus	%					100	%	127.421.000	20	47.342.100	30	47.342.100	20	32.736.450	30,00	350	100,00	127.421.000	100	100				
	Meningkatnya akses terhadap layanan pendidikan SMA	1 01 2 1.01	Kegiatan	Pengelolaan Pendidikan Menengah Atas	PERSENTASE PENURUNAN ANGA PUTUS SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SMA					227	satuan pendidikan	63.558.500	78	23.532.700	81	23.532.700	65	16.492.850	3,00	250	227	63.558.500	100	100				
	Tertaskananya Pembinaan Pengelola Rapor Pendidikan	1 01 02 1.01 014	Sub. Kegiatan	Pembinaan kelembagaan dan manajemen SMA	Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti Pembinaan Pengelola Rapor Pendidikan	satuan pendidikan	1362,00	848.342.400	454	74.855.700	227	satuan pendidikan	63.558.500	78	23.532.700	81	23.532.700	65	16.492.850	3,00	250	227	63.558.500	100	100			
	Meningkatnya akses terhadap layanan pendidikan SMK	1 01 2 1.01	Kegiatan	Pengelolaan Pendidikan Menengah Kejuruan	PERSENTASE PENURUNAN ANGA PUTUS SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SMK					185	satuan pendidikan	63.862.500	68	23.809.400	71	23.809.400	46	16.243.600	-	100	185	63.862.500	100	100				
	Tertaskananya Pembinaan Pengelola Rapor Pendidikan	1 01 02 1.01 014	Sub. Kegiatan	Pembinaan kelembagaan dan manajemen SMK	Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti Pembinaan Pengelola Rapor Pendidikan	satuan pendidikan	1110,00	848.342.400	370	80.811.700	185	satuan pendidikan	63.862.500	68	23.809.400	71	23.809.400	46	16.243.600	-	100	185	63.862.500	100	100			
CABANG DINAS WILAYAH V (LIMA)																												
	Meningkatnya akses pendidikan	1 01 06	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	70,05	197.065.916.000	70	197.065.916.000	100	%	337.316.295	15	87.340.289	25	15.908.000	30,00	27.272.000	30	193.441.570	100	323.961.859	100,0	96,041				
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	1 01 06	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP) PERANGKAT DAERAH					1	Laporan	158.163.750	0,15	15.908.000	0,15	15.908.000	0,25	27.272.000	0,55	93.449.150	1	152.537.150	100	96				
	Terselenggaranya Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 01 06 1.01 09	Sub. Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6,00	844.043.200	2	1	Laporan	121.650.000	0,15	15.908.000	0,15	15.908.000	0,25	27.272.000	0,55	60.220.000	1	119.308.000	110	98				
	Meningkatnya kualitas perencanaan, Pengukuran, evaluasi & pelaporan	1 01 08 1.01 09	Sub. Kegiatan	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	6,00	844.043.200	2	1	Dokumen	36.513.750						-	1,00	33.229.150	1	33.229.150	100	91				
	Terselenggaranya penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1 01 08 1.01 04	Sub. Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6,00	844.043.200	2	453.512.168	1	Laporan	179.152.545	0,45	71.432.289	0	-	0	0,55	99.992.420	1	171.424.709	100	96				
	Meningkatnya akses pendidikan	1 01 02	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase SPM dan SNP yang tercapai pada satuan pendidikan SMA, SMK, dan pendidikan khusus	%					100	%	41.798.000	20	-	30	-	20	-	30,00	36.898.000	100,00	36.898.000	100	88				
	Meningkatnya akses terhadap layanan pendidikan SMA	1 01 2 1.01	Kegiatan	Pengelolaan Pendidikan Menengah Atas	PERSENTASE PENURUNAN ANGA PUTUS SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SMA					227	satuan pendidikan	20.899.000						0	-	227,00	19.099.000	227	19.099.000	100	91			
	Tertaskananya Pembinaan Pengelola Rapor Pendidikan	1 01 02 1.01 014	Sub. Kegiatan	Pembinaan kelembagaan dan manajemen SMA	Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti Pembinaan Pengelola Rapor Pendidikan	satuan pendidikan	1362,00	848.342.400	454	83.956.650	227	satuan pendidikan	20.899.000					0	-	227,00	19.099.000	227	19.099.000	100	91			
	Meningkatnya akses terhadap layanan pendidikan SMK	1 01 2 1.01	Kegiatan	Pengelolaan Pendidikan Menengah Kejuruan	PERSENTASE PENURUNAN ANGA PUTUS SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SMK					185	satuan pendidikan	20.899.000						0	-	185,00	17.799.000	185	17.799.000	100	85			
	Tertaskananya Pembinaan Pengelola Rapor Pendidikan	1 01 02 1.01 014	Sub. Kegiatan	Pembinaan kelembagaan dan manajemen SMK	Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti Pembinaan Pengelola Rapor Pendidikan	satuan pendidikan	1110,00	848.342.400	370	71.215.150	185	satuan pendidikan	20.899.000					0	-	185,00	17.799.000	185	17.799.000	100	85			
CABANG DINAS WILAYAH VI (ENAM)																												
	Meningkatnya akses pendidikan	1 01 06	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	70,05	197.065.916.000	70	197.065.916.000	100	%	328.676.423	15	-	25	114.919.951	30,00	64.390.397	30	146.990.631	100	326.300.979	100,0	99,277				
	Meningkatnya kualitas perencanaan, Pengukuran, evaluasi & pelaporan	1 01 08	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH					1	Laporan	301.380.423						0,45	109.099.951	0,15	56.760.397	0,55	134.070.031	1,15	299.930.379	115	100	
	Terselenggaranya penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1 01 08 1.01 04	Sub. Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6,00	844.043.200	2	363.131.100	1	Laporan	219.872.423	0,45	88.529.951	0,15	39.699.197	0,55	90.615.431	1	218.844.579	115	100					
	Terselenggaranya Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 01 06 1.01 09	Sub. Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6,00	844.043.200	2	90.200.000	1	Laporan	81.508.000	0,24	20.570.000	0,25	17.061.200	0,55	43.454.600	1	81.085.800	104	99					
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	1 01 06	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP) PERANGKAT DAERAH					1	Dokumen	27.296.000			0,21	5.820.000	0,35	7.630.000	0,55	12.920.600	1,11	26.370.600	111	97				
	Meningkatnya akses pendidikan	1 01 02	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase SPM dan SNP yang tercapai pada satuan pendidikan SMA, SMK, dan pendidikan khusus	%					100	%	99.630.000	20	-	30	-	20	40.680.000	30,00	52.910.000	100,00	93.590.000	100	94				
	Meningkatnya akses terhadap layanan pendidikan SMA	1 01 2 1.01	Kegiatan	Pengelolaan Pendidikan Menengah Atas	PERSENTASE PENURUNAN ANGA PUTUS SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SMA					227	satuan pendidikan	49.815.000						102	20.340.000	125,00	26.455.000	227	46.795.000	100	94			
	Tertaskananya Pembinaan Pengelola Rapor Pendidikan	1 01 02 1.01 014	Sub. Kegiatan	Pembinaan kelembagaan dan manajemen SMA	Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti Pembinaan Pengelola Rapor Pendidikan	satuan pendidikan	1362,00	848.342.400	454	105.172.000	227	satuan pendidikan	49.815.000					102	20.340.000	125,00	26.455.000	227	46.795.000	100	94			
	Meningkatnya akses terhadap layanan pendidikan SMK	1 01 2 1.01	Kegiatan	Pengelolaan Pendidikan Menengah Kejuruan	PERSENTASE PENURUNAN ANGA PUTUS SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SMK					185	satuan pendidikan	49.815.000						82	20.340.000	103,00	26.455.000	185	46.795.000	100	94			
	Tertaskananya Pembinaan Pengelola Rapor Pendidikan	1 01 02 1.01 014	Sub. Kegiatan	Pembinaan kelembagaan dan manajemen SMK	Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti Pembinaan Pengelola Rapor Pendidikan	satuan pendidikan	1110,00	848.342.400	370	105.172.000	185	satuan pendidikan	49.815.000					82	20.340.000	103,00	26.455.000	185	46.795.000	100	94			
Jumlah																												
Rata-rata capaian kinerja (%)																												
Predikat kinerja																												
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : perencanaan penyusunan pelaksanaan																												
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja : pergeseran waktu pelaksanaan																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Percepatan Proses Pelaksanaan																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan																												

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Dinas Pendidikan provinsi Sulawesi Tengah merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah didukung sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana yang cukup memadai. Dari sisi jumlah, cukup tersedia sumberdaya aparatur untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pendidikan. Namun demikian perlu adanya peningkatan kapasitas karena dalam pelaksanaannya sumberdaya aparatur tersebut tidak didukung kompetensi yang memadai sesuai bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Terkait keterbatasan sarana dan prasarana telah merealisasikan sejumlah peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kegiatan operasional dan pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pendidikan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Pengelolaan Pendidikan Menengah. Anggaran yang dialokasikan adalah sejumlah Rp. 1.289.892.767.425,00 dengan realisasi Rp. 1.220.703.426.052,00 atau dengan persentase 94.64% Pada tahun anggaran 2024, program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah dapat berjalan dengan baik antara lain disebabkan adanya Efisiensi Penggunaan Sumber Daya utamanya Sumberdaya Aparatur. Dengan kapasitas sumber daya aparatur yang baik di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, maka terdapat beberapa tugas jabatan yang dilaksanakan oleh staf/fungsional Sekretariat maupun bidang yang juga merangkap sebagai pelaksana tugas jabatan pada Sub Bagian maupun bidang. Sekalipun pada akhirnya capaian kinerja berhasil diraih sesuai target. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel tingkat efisiensi capaian realisasi di bawah ini.

Tabel 3.1.6

Tingkat efisiensi terhadap capaian realisasi Tahun Anggaran 2024

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
					Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	INDEXIS RB PERANGKAT DAERAH	Indeks	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	100	100	802.675.554.216	748.354.501.238.000	93,2	6,8
	Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah	INDEXIS PROFESIONAL ASN PERANGKAT DAERAH	Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	3,10	103	2.967.856.794	2.756.364.235	92,9	10,5
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	INDEXIS PELAYANAN PUBLIK (IPP) PERANGKAT DAERAH	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	1,05	105	3.028.732.780	2.723.138.644	89,9	15,1
	Meningkatnya kualitas perencanaan, Pengukuran, evaluasi & pelaporan	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	110,00	110	7.125.942.261	6.913.554.152	97,0	13,0
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	1,20	120	507.469.850	507.216.426	100,0	20,0
	Meningkatnya penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	TLHP BPK DAN APIP PERANGKAT DAERAH (TLHP)	Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3	3,05	102	788.221.383.451	794.642.891.762	93,2	8,5

Meningkatnya pengawasan kearsipan internal perangkat daerah	TINGKAT DIGITALISASI ARSIP PERANGKAT DAERAH		Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100,00	100	824.159.080	811.336.019	98,4	1,6
Meningkatnya akses terhadap layanan pendidikan	Persentase SPM dan SNP yang tercapai pada satuan pendidikan SMA, SMK, dan pendidikan khusus	%		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	100	100,00	100	483.184.892.609	472.889.413.299	97,9	2,1
Meningkatnya akses terhadap layanan pendidikan SMA	PERSENTASE PENURUNAN ANGKA PUTUS SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SMA		Kegiatan	Pengelolaan Pendidikan Menengah Atas	100	100	100	229.678.941.360	223.327.115.104	97,2	2,8
Meningkatnya akses terhadap layanan pendidikan SMK	PERSENTASE PENURUNAN ANGKA PUTUS SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SMK		Kegiatan	Pengelolaan Pendidikan Menengah Kejuruan	100	100	100	235.322.471.907	231.981.654.493	98,6	1,4
MENINGKATNYA PARTISIPASI SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS	PERSENTASE PENINGKATAN PENDUDUK ANAK DISABILITAS YG MENGENYAM PENDIDIKAN		Kegiatan	Pengelolaan Pendidikan Menengah Pendidikan Khusus dan Inovasi Pendidikan	100	100	100	18.183.479.342	17.580.643.702	96,7	3,3
Meningkatnya program kurikulum merdeka pada satuan pendidikan menengah	persentase satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang melaksanakan kurikulum merdeka belajar	%		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	100	100	100	106.984.400	106.933.400	100,0	0,0
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan silabus Muatan Lokal	Persentase pemenuhan kebutuhan silabus muatan lokal		Kegiatan	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	100	100	100	106.984.400	106.933.400	100,0	0,0
Meningkatnya ketersediaan pendidik pada satuan pendidikan kewenangan provinsi	Indeks Distribusi guru	%		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	100	100,00	100	2.376.271.100	2.271.184.424	95,6	4,4
Tersedianya data kebutuhan pendidik pada satuan pendidikan kewenangan Provinsi	Persentase satuan pendidikan yang terpenuhi data kebutuhan pendidiknya		Kegiatan	Penyusunan Daftar dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi	100	100,00	100	1.188.135.550	1.135.592.212	95,6	4,4
CABANG DINAS WILAYAH I (SATU)											
Meningkatnya akses pendidikan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	105	105	590.539.674	610.542.986.000	103,4	1,6
Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP) PERANGKAT DAERAH		Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	1,1	110	268.942.500	260.552.000	96,9	13,1
Meningkatnya kualitas perencanaan, Pengukuran, evaluasi & laporan	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH		Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	1,2	120	321.597.174	318.009.200	98,9	21,1
Meningkatnya akses pendidikan	Persentase SPM dan SNP yang tercapai pada satuan pendidikan SMA, SMK, dan pendidikan khusus	%		Program Pengelolaan Pendidikan	100	100,00	100	119.754.650	118.539.150	99,0	1,0
Meningkatnya akses terhadap layanan pendidikan SMA	PERSENTASE PENURUNAN ANGKA PUTUS SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SMA		Kegiatan	Pengelolaan Pendidikan Menengah Atas	100	100	100	34.229.500	34.014.000	99,4	0,6
Meningkatnya akses terhadap layanan pendidikan SMK	PERSENTASE PENURUNAN ANGKA PUTUS SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SMK		Kegiatan	Pengelolaan Pendidikan Menengah Kejuruan	100	100	100	34.229.500	34.014.000	99,4	0,6
CABANG DINAS WILAYAH II (DUA)											
Meningkatnya akses pendidikan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	100	100	301.659.200	291.624.966	96,7	3,3
Meningkatnya kualitas perencanaan, Pengukuran, evaluasi & laporan	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH		Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	301.659.200	291.624.966	96,7	3,3
Meningkatnya akses pendidikan	Persentase SPM dan SNP yang tercapai pada satuan pendidikan SMA, SMK, dan pendidikan khusus	%		Program Pengelolaan Pendidikan	100	100,00	100	122.793.700	122.488.450	99,8	0,2
Meningkatnya akses terhadap layanan pendidikan SMA	PERSENTASE PENURUNAN ANGKA PUTUS SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SMA		Kegiatan	Pengelolaan Pendidikan Menengah Atas	227	227	100	61.709.150	61.558.400	99,8	0,2
Meningkatnya akses terhadap layanan pendidikan SMK	PERSENTASE PENURUNAN ANGKA PUTUS SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SMK		Kegiatan	Pengelolaan Pendidikan Menengah Kejuruan	185	185	100	61.084.550	60.930.050	99,7	0,3
CABANG DINAS WILAYAH III (TIGA)											
Meningkatnya akses pendidikan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	100	100	259.287.700	257.830.400	99,4	0,6
Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP) PERANGKAT DAERAH		Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1		-	85.525.150	84.525.150	98,8	98,8
Meningkatnya kualitas perencanaan, Pengukuran, evaluasi & laporan	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH		Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	1,12	112	173.762.550	173.305.250	99,7	12,3
Meningkatnya akses pendidikan	Persentase SPM dan SNP yang tercapai pada satuan pendidikan SMA, SMK, dan pendidikan khusus	%		Program Pengelolaan Pendidikan	100	100,00	100	157.772.150	157.737.150	100,0	0,0
Meningkatnya akses terhadap layanan pendidikan SMA	PERSENTASE PENURUNAN ANGKA PUTUS SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SMA		Kegiatan	Pengelolaan Pendidikan Menengah Atas	227	227	100	78.063.250	78.063.250	100,0	-
Meningkatnya akses terhadap layanan pendidikan SMK	PERSENTASE PENURUNAN ANGKA PUTUS SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SMK		Kegiatan	Pengelolaan Pendidikan Menengah Kejuruan	185	185	100	79.708.900	79.673.900	100,0	0,0
CABANG DINAS WILAYAH IV (EMPAT)											
Meningkatnya akses pendidikan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	100	100	301.847.850	297.747.517	98,6	1,4
Meningkatnya kualitas perencanaan, Pengukuran, evaluasi & laporan	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH		Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	1,1	110	301.847.850	297.747.517	98,6	11,4
Meningkatnya akses pendidikan	Persentase SPM dan SNP yang tercapai pada satuan pendidikan SMA, SMK, dan pendidikan khusus	%		Program Pengelolaan Pendidikan	100	100,00	100	127.421.000	127.421.000	100,0	-
Meningkatnya akses terhadap layanan pendidikan SMA	PERSENTASE PENURUNAN ANGKA PUTUS SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SMA		Kegiatan	Pengelolaan Pendidikan Menengah Atas	227	227	100	63.558.500	63.558.500	100,0	-
Meningkatnya akses terhadap layanan pendidikan SMK	PERSENTASE PENURUNAN ANGKA PUTUS SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SMK		Kegiatan	Pengelolaan Pendidikan Menengah Kejuruan	185	185	100	63.862.500	63.862.500	100,0	-
CABANG DINAS WILAYAH V (LIMA)											
Meningkatnya akses pendidikan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	100	100	337.316.295	323.961.859	96,0	4,0
Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP) PERANGKAT DAERAH		Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	1	100	158.163.750	152.537.150	96,4	3,6
Meningkatnya kualitas perencanaan, Pengukuran, evaluasi & laporan	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH		Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	1	100	179.152.545	171.424.709	95,7	4,3
Meningkatnya akses pendidikan	Persentase SPM dan SNP yang tercapai pada satuan pendidikan SMA, SMK, dan pendidikan khusus	%		Program Pengelolaan Pendidikan	100	100,00	100	41.798.000	36.898.000	88,3	11,7
Meningkatnya akses terhadap layanan pendidikan SMA	PERSENTASE PENURUNAN ANGKA PUTUS SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SMA		Kegiatan	Pengelolaan Pendidikan Menengah Atas	227	227	100	20.899.000	19.099.000	91,4	8,6
Meningkatnya akses terhadap layanan pendidikan SMK	PERSENTASE PENURUNAN ANGKA PUTUS SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SMK		Kegiatan	Pengelolaan Pendidikan Menengah Kejuruan	185	185	100	20.899.000	17.799.000	85,2	14,8
CABANG DINAS WILAYAH VI (ENAM)											
Meningkatnya akses pendidikan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	100	100	328.676.423	326.300.979	99,3	0,7
Meningkatnya kualitas perencanaan, Pengukuran, evaluasi & laporan	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH		Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	1,15	115	301.380.423	299.930.379	99,5	15,5
Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP) PERANGKAT DAERAH		Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	1,11	111	27.296.000	26.370.600	96,6	14,4
Meningkatnya akses pendidikan	Persentase SPM dan SNP yang tercapai pada satuan pendidikan SMA, SMK, dan pendidikan khusus	%		Program Pengelolaan Pendidikan	100	100,00	100	99.630.000	93.590.000	93,9	6,1
Meningkatnya akses terhadap layanan pendidikan SMA	PERSENTASE PENURUNAN ANGKA PUTUS SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SMA		Kegiatan	Pengelolaan Pendidikan Menengah Atas	227	227	100	49.815.000	46.795.000	93,9	6,1
Meningkatnya akses terhadap layanan pendidikan SMK	PERSENTASE PENURUNAN ANGKA PUTUS SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SMK		Kegiatan	Pengelolaan Pendidikan Menengah Kejuruan	185	185	100	49.815.000	46.795.000	93,9	6,1

Sumber Data : Subag Program dan Perencanaan Disdik Prov.Sulteng

3.1.7 Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis program/ kegiatan merupakan sarana bagi organisasi untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima, yaitu dengan kata lain merupakan informasi mengenai keberhasilan ataupun kegagalan organisasi dalam melaksanakan amanahnya.

Dalam analisis ini dijelaskan proses dan nuansa pencapaian sasaran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) dari masing-masing pejabat struktural maupun fungsional yang telah dibuat sesuai pendukung program/ kegiatan yang telah dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Adapun analisis terhadap program/kegiatan yang mendukung keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian Perjanjian Kinerja Dinas pendidikan Tahun Anggaran 2024 Tahun dapat diketahui dalam Laporan Kinerja yang telah disusun masing-masing pelaksana program/kegiatan.

Tabel 3.1.7
Program/ Kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI		SILVA
			Keuangan	%	
	TOTAL KESELURUHAN	1.289.892.767.425	1.220.703.426.052	94,64	67.489.050.783
	1	2	3	4	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	804.794.881.016	746.571.487.141	92,77	58.223.393.875
	- Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.967.856.794	2.756.364.235	92,87	211.492.559
	- Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	793.013.544.561	735.354.169.091	92,73	57.659.375.470
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.306.575.661	8.072.117.307	97,18	234.458.354
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	398.100.000	388.836.508	97,67	9.263.492
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	483.802.766.459	472.889.413.299	97,74	10.913.353.160
	- Kegiatan : Pengelola Pendidikan Menengah Atas	229.987.215.760	223.327.115.104	97,10	6.660.100.656
	- Kegiatan : PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	235.632.071.357	231.981.654.493	98,45	3.650.416.864
	- Kegiatan : pengelolaan pendidikan Khusus dan Inovasi Pendidikan	18.183.479.342	17.580.643.702	96,68	602.835.640
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	106.984.400	106.933.400	99,95	51.000
	- Kegiatan : PTK MULOK	106.984.400	106.933.400	99,95	51.000
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.188.135.550	1.135.592.212	95,58	52.543.338
	- Kegiatan : PTK PENATAAN	700.000.000	668.102.925	95,44	31.897.075
	- Kegiatan : PERITUNGAN	488.135.550	467.489.287	95,77	20.646.263

Sumber Data : Subag Perencanaan dan Program Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa secara total keseluruhan realisasi anggaran tahun yaitu sebesar 1.220.703.426.052 atau 94.64% dari total anggaran sebesar Rp. 1.289.892.767.425, capaian realisasi ini terdiri dari 4 (Empat program) yaitu

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
2. Program Pengelolaan Pendidikan;
3. Program Pengembangan Kurikulum;dan
4. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

serta terdapat 10 (Sepuluh) kegiatan yang terdiri dari :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Pengelola Pendidikan Menengah Atas
6. Pengelola Pendidikan Menengah Kejuruan
7. Pengelolaan pendidikan Khusus dan Inovasi Pendidikan
8. PTK Mulok
9. PTK penataan pendidik dan tenaga kependidikan
10. Peritungan pendidik dan tenaga kependidikan

Perlu diketahui bahwa realisasi tertinggi ada pada Program Kurikulum dengan capaian realisasi sebesar 99.95% yang diikuti oleh Program Pengelolaan Pendidikan dengan capaian realisasi sebesar 97.39% selanjutnya ada pada Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan capaian sebesar 95.58% dan Program penunjang urusan pemerintah daerah dengan capaian sebesar 92,98 %. Dari capain proram tersebut terdapat capaian realisasi kegiatan yang tertinggi yaitu kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dengan capaian sebesar 99.95 % dan yang terendah ada pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan capaian sebesar 92.73%.

Keberhasilan program kurikulum dengan kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal pendidikan menengah dengan capaian sebesar 99.95% adanya dukungan dari Sumber Daya aparatur Bidang PTK Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah dan tenaga Pendidik Kabupaten/Kota yang menjadi peserta pada kegiatan Workshop Penyusunan

Silabus Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) Pada Jenjang Pendidikan Menengah, dan kegagalan pada Program Penunjang urusan pemerintah daerah dengan capaian sebesar 92.98% terdapat pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah dengan capaian realisasi 92.73%, di mana kegiatan tersebut merupakan gaji dari ASN, Pendidik, tenaga kependidikan serta PPPK dalam lingkup dinas pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah yang mana ketidakberhasilan atau kegagalan tersebut merupakan selisih dari golongan, tunjangan, sertifikasi guru (TPG/TKG PNSD) serta tamsil

3.1.8 Program dan Kegiatan yang mendukung dalam peningkatan Standar Pelayanan Minimum

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah suatu dokumen yang bertujuan untuk memberikan acuan untuk melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian serta pengawasan dan pertanggung jawaban penyelenggaraan pelayanan. Selain itu Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sama terkait definisi operasional, indikator kinerja, ukuran/satuan, pembilang dan penyebut, perhitungan, sumber data, langkah kegiatan dan kebutuhan sumber daya manusia. Hal ini diharapkan dengan adanya dokumen SPM maka dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan, ketanggapan kebutuhan dalam melakukan pelayanan, pembiayaan pengembangan pelayanan, kuantitas dan perluasan jangkauan pengguna. Setelah Standar Pelayanan Minimal (SPM) dijalankan dengan baik maka akan berdampak pada kepuasan pengguna layanan dan kemandirian dalam pemberian layanan.

Prinsip dalam menyusun dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini mengacu pada program pencapaian target di setiap tahunnya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dibebankan kepada anggaran PPK-Badan Layanan Umum Daerah dan APBD. Komponen dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri dari :

1. Jenis Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan pelayanan yang ada
2. Indikator pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
3. Perhitungan standar kebutuhan pelayanan sesuai dengan jenis Standar Pelayanan Minimal (SPM)
4. Standar pelayanan yang telah dicapai

5. Penyusunan rencana pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM)
6. Penanggung jawab kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan jenis layanan

Komponen-komponen di atas sebenarnya telah dijelaskan dalam dokumen Renstra secara umum. Namun, dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang lebih detail dan terukur dirasa masih perlu untuk disusun sebagai acuan dalam program kegiatan yang dilaksanakan di suatu instansi demi terwujudnya pelayanan yang baik sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Akan tetapi, khusus untuk SPM bidang Pendidikan Dasar, karena indikator yang digunakan lebih bersifat seperti kriteria teknis, maka proses penyusunan program/kegiatan sedikit berbeda dengan prosedur yang diuraikan. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan melalui simulasi penyusunan program SPM Pendidikan Dasar dibawah ini. Program dan kegiatan yang mendukung dalam pencapaian target SPM Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.8
Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian SPM

PROGRAM / KEGIATAN / SUB. KEGIATAN			PAGU	REALISASI	CAPAIAN
			Sesudah Perubahan	Keu	
			Rp.	Rp.	
1	2	3	4	5	6
BIDANG PEMBINAAN SMA			218.578.988.945	192.379.889.106	88,01
-	Sub Kegiatan :	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (DAK SMA)	64.075.259.212	50.950.715.846	79,52
-	Sub Kegiatan :	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	7.956.139.083	6.722.030.280	84,49
-	Sub Kegiatan :	Penyiapan dan Evaluasi Tindak Lanjut satuan Pendidikan Menengah Atas	810.349.450	806.529.150	99,53
-	Sub Kegiatan :	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	144.202.563.600	132.403.258.000	91,82
-	Sub Kegiatan :	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas (Cabdiswil I)	155.300.500	149.707.500	96,40
-	Sub Kegiatan :	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas (Cabdiswil II)	61.709.800	61.709.800	100
-	Sub Kegiatan :	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas (Cabdiswil III)	55.777.700	55.777.700	100

PROGRAM / KEGIATAN / SUB. KEGIATAN	PAGU		REALISASI	CAPAIAN
	Sesudah Perubahan		Keu	
	Rp.	Rp.	Rp.	
1	2	3	4	%
- Sub Kegiatan :	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas (Cabdiswil IV)	56.194.800	56.194.800	100
- Sub Kegiatan :	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas (Cabdiswil V)	30.755.700	30.755.700	100
- Sub Kegiatan :	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas (Cabdiswil VI)	49.999.450	31.370.650	62,74
- Sub Kegiatan :	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (SMA)	1.124.939.650	1.111.839.680	98,84
BIDANG PEMBINAAN SMK		253.479.709.109	230.783.686.849	91,05
- Sub Kegiatan :	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	136.098.630	130.076.200	95,57
- Sub Kegiatan :	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	933.203.470	912.069.383	97,74
- Sub Kegiatan :	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	601.338.090	595.637.528	99,05
- Sub Kegiatan :	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (SMK)	1.399.999.800	1.385.095.132	98,94
- Sub Kegiatan :	Pengembangan Karir Pendidik & Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan SMK	149.999.834	149.509.834	99,67
- Sub Kegiatan :	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	584.483.736	552.485.476	94,53
- Sub Kegiatan :	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (DAK SMK)	162.735.851.399	146.350.016.125	89,93
- Sub Kegiatan :	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	82.631.285.600	77.015.783.900	93,20
- Sub Kegiatan :	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan (Cabdiswil I)	149.070.850	141.214.500	94,73
- Sub Kegiatan :	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan (Cabdiswil II)	86.084.550	86.084.550	100
- Sub Kegiatan :	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan (Cabdiswil III)	57.404.850	57.404.850	100

PROGRAM / KEGIATAN / SUB. KEGIATAN	PAGU		REALISASI	CAPAIAN
	Sesudah Perubahan		Keu	
	Rp.	Rp.	Rp.	
1	2	3	4	5
- Sub Kegiatan :	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan (Cabdiswil IV)	54.077.150	54.077.150	100
- Sub Kegiatan :	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan (Cabdiswil V)	30.811.700	30.811.700	100
- Sub Kegiatan :	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan (Cabdiswil VI)	49.999.450	18.629.150	37,26
- Sub Kegiatan :	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SARPRAS)	3.880.000.000	3.304.791.371	85,18
BIDANG PKLK		19.359.746.699	18.167.667.382	93,84
- Sub Kegiatan :	Pengembangan Karir pendidik dan kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	706.896.550	695.202.001	98,35
- Sub Kegiatan :	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	553.743.450	549.761.450	99,28
- Sub Kegiatan :	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (PKLK)	388.037.200	376.648.770	97,07
- Sub Kegiatan :	Penyediaan Pendidik dan tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	192.802.000	192.393.000	99,79
- Sub Kegiatan :	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	6.287.811.199	5.916.040.795	94,09
- Sub Kegiatan :	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (DAK PKLK)	423.447.300	422.478.300	99,77
- Sub Kegiatan :	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	8.568.080.000	8.130.227.000	94,89
- Sub Kegiatan :	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (DAK SMK)	2.238.929.000	1.884.916.066	84,19

Sumber Data : Sub. Bagian Perencanaan dan Program Tahun 2023

Tabel 3.1.9
Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM)
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3	4			5
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					76.06%
1 .	Pendidikan Menengah					73.91%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	58.95%
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		360514	265663	94851	73.69%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					14.95%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	74.77%
	SMA					
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	104.71	-4.71	100.00%
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	75.84	24.16	75.84%
	3 . Angka partisipasi murni	%	100	71.68	28.32	71.68%
	4 . Kemampuan literasi	Nilai	80	44.64	35.36	55.80%
	5 . Kemampuan numerasi	Nilai	80	34.86	45.14	43.58%
	6 . Perbedaan skor literasi	Nilai	80	2.83	77.17	3.54%
	7 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	1.67	1.13	0.54	67.66%
	8 . Indeks iklim keamanan	Nilai	100	67.33	32.67	67.33%
	9 . Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	80	67.43	12.57	84.29%
	10 . Proporsi PTK bersertifikat	%	100	90.2	9.8	90.20%
	11 . Pengalaman pelatihan guru	%	80	17.1	62.9	21.38%
	SMK					
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	104.71	-4.71	100.00%
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	75.84	24.16	75.84%
	3 . Angka partisipasi murni	%	100	71.68	28.32	71.68%
	4 . Kemampuan literasi	%	80	36.85	43.15	46.06%
	5 . Kemampuan numerasi	Nilai	80	29.16	50.84	36.45%
	6 . Tingkat penyerapan lulusan SMK	Nilai	90	80.86	9.14	89.84%
	7 . Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	Nilai	80	65	15	81.25%
	8 . Perbedaan skor literasi	Nilai	40	1.87	38.13	4.68%
	9 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	20	0.52	19.48	2.60%
	10 . Indeks iklim keamanan	Nilai	60	65.89	-5.89	100.00%
	11 . Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	60	65.27	-5.27	100.00%
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	100	90.45	9.55	90.45%
	13 . Pengalaman pelatihan guru	%	80	9.7	70.3	12.13%

Sumber Data : E-SPM (KEMENDAGRI) Tahun 2024

Atas dasar peraturan Permendikbudristek nomor 32 tahun 2022 , Pendidikan juga wajib memiliki Standar pelayanan minimal, tentang Standar pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan yang mengatur tentang Jenis dan penerima pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, pencapaian SPM Pendidikan dan Pelaporan serta evaluasi.

Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023 berfokus kepada kualitas pembelajaran, kualitas lingkungan sekolah, partisipasi dan kualitas pendidik. Contoh Indikator: Literasi, numerasi, iklim keamanan, Kebinekaan, inklusivitas.

3.2 Realisasi Anggaran

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran dari pengelolaan keuangan organisasi dikaitkan dengan pusat pertanggungjawaban. Menurut Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dinyatakan bahwa kinerja keuangan adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pengelolaan keuangan atas pelaksanaan suatu kegiatan program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi pemerintah daerah (Mahsun, 2013).

Berdasarkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah jumlah anggaran untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp.1.289.894.659.425,-(*Satu Triliun Dua ratus Delapan Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam ratus Lima puluh Sembilan Ribu Empat ratus Dua Puluh Lima Rupiah*) yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2.1
Rencana Belanja Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN	RENCANA	%
1	2	3	
A	BELANJA OPERASI	Rp 1.105.129.722.983	85,68
1	Belanja Pegawai	Rp 789.317.353.451,12	71,42
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 208.118.470.807,00	18,83
3	Belanja Hibah	Rp 107.693.898.725,00	9,74
B	BELANJA MODAL	Rp 184.764.936.442	14,32
1	Belanja Modal Tanah	Rp 1.702.500.000,00	0,92
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 54.015.436.944,00	29,23
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 117.268.965.172,00	63,47
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 11.778.034.326,00	6,37
	JUMLAH	Rp 1.289.894.659.425	100

Sumber Data : Subag Perencanaan dan Program Disdik Prov.Sulteng Tahun 2024

Dapat dilihat pada table di atas bahwa terdapat 85.68 % adapada alokasi Belanja operasi terdiri dari Belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta dana hibah, perlu diketahui bahwa pada belanja pegawai terdiri dari gaji pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah serta gaji pendidik dan tenaga kependidikan SMA/ SMK sederajat yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah serta terdapat pula sertifikasi pendidik (Guru).

Alokasi anggaran belanja barang dan jasa tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.2
Realisasi berdasarkan Belanja Operasi dan Belanja Modal

NO	URAIAN	PAGU	REALISASI	%
1	2	3	4	
A	BELANJA OPERASI	Rp 1.105.129.722.983	Rp 1.045.331.249.972,00	94,59
1	Belanja Pegawai	Rp 789.317.353.451,12	Rp 735.692.291.762,00	93,21
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 208.118.470.807,00	Rp 205.111.926.453,00	98,56
3	Belanja Hibah	Rp 107.693.898.725,00	Rp 104.527.031.757,00	97,06
B	BELANJA MODAL	Rp 184.764.936.442	Rp 172.618.979.241,00	93,43
1	Belanja Modal Tanah	Rp 1.702.500.000,00	Rp 1.702.500.000,00	100,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 54.015.436.944,00	Rp 52.358.247.979,00	96,93
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 117.268.965.172,00	Rp 106.783.402.936,00	91,06
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 11.778.034.326,00	Rp 11.774.828.326,00	99,97

Sumber Data : Subag Perencanaan dan Program Disdik Prov.Sulteng Tahun 2024

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah capaian realisasi belanja operasional sebesar Rp 1.045.331.249.972,- (94.59%) dari pagu sebesar Rp. 1.105.129.722.983,- artinya terdapat selisih pagu yang tidak tercapai sebesar Rp. 59.798.473.011, - (5.41%) , dan perlu juga diketahui bahwa capaian realisasi belanja operasional terdiri dari realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 735.692.291.762,- dengan persentase capaian 93.21% seperti yang terlihat pada table diatas bahwa persentase capaian realisasi belanja pegawai masih lebih kecil dari persentase capaian realisasi hibah sebesar Rp. 104.527.031.757,- (97.06%), dan capaian belanja Barang dan jasa masih lebih besar di banding capaian realsaisai belanja hibah yaiutu sebesar Rp. 205.111.926.453,- atau dengan persentase 98.56%. Selanjutnya terdapat capaian realsiasi belanja modal sebesar 172.218.979.241 (93.43) dari pagu sebesar 184.764.936.442, artinya terdapat selisih capaian yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp. 12.145.957.201,- (6.57%), dengan rincian capaian realisasi yang terdiri dari realisasi belanja modal tanah sebesar Rp. 1.702.500.000,- (100%), kemudian realisasi belanja modal peralatan mesin sebesar Rp. 52.358.247.979,- (96.93%), diikuti dengan realisasi belanja Gedung dan bangunan sebesar Rp. 106.783.402.936,- (91.06%) dan realisasi belanja modal asset dan tetap lainnya sebesar Rp. 11.774.828.326,- (99.97%), dimana persentase capaian realisasi belanja paling tinggi terdapat pada belanja modal tanah dan persentase realisasi capaian paling rendah terdapat pada belanja modal Gedung dan bangunan. Dapat pula dilihat pada rincian program/Kegiatan dan per sub kegiatan dibawah ini :

Tabel 3.2.3
Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Tahun 2024

URAIAN	PAGU	REALISASI		SILVA	
		KEUANGAN	FISIK		
1	2	3		4	
TOTAL KESELURUHAN	1.289.892.767.425	1.220.703.426.052	94,64	98,73	67.489.050.783
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	802.675.554.216	745.617.897.900	92,89	99,58	57.057.656.316
- Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	2.967.856.794	2.756.364.235	92,87	94,29	211.492.559
- Sub. Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	2.066.356.950	1.861.849.517	90,10	91,80	204.507.433
- Sub. Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	44.000.000	42.650.000	96,93	100	1.350.000
- Sub. Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan	857.499.844	851.864.718	99,34	100	5.635.126
- Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	792.183.655.161	738.295.495.832	93,20	100	50.673.322.790
- Sub. Kegiatan : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik	507.469.850	507.216.426	99,95	100	253.424
- Sub. Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	426.059.080	422.500.000	99,16	100	3.559.080
- Sub. Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.175.908.880	2.107.584.000	96,86	100	68.324.880
- Sub. Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	788.221.393.451	734.642.891.762	93,20	100	50.363.665.150
- Sub. Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	852.823.900	615.303.644	72,15	72	237.520.256
- Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	7.125.942.261	4.177.201.325	58,62	58,62	2.948.740.936
- Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.125.942.261	6.913.554.152	97,02	97,02	212.388.109
- Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	398.100.000	388.836.508	97,67	97,7	9.263.492
- Sub. Kegiatan : Penyediaan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	340.880.000	335.824.867	98,52	98,5	5.055.133
- Sub. Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.220.000	53.011.641	92,65	92,6	4.208.359
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	483.184.892.609	471.160.813.349	97,51	97,4	10.289.804.670
- Kegiatan : Pengelola Pendidikan Menengah Atas	229.678.941.360	223.327.115.104	97,23	97,5	6.351.826.256
- Sub. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana, dan Utilitas	71.722.736.534	69.398.773.512	96,76	96,8	2.323.963.022
- Sub. Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen sekolah	4.099.999.700	4.098.990.200	99,98	100,00	1.009.500
- Sub. Kegiatan : Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi	699.999.950	695.118.976	99,30	100,00	4.880.974
- Sub. Kegiatan : Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	6.149.729.958	3.100.255.533	50,41	67,48	3.049.474.425
- Sub. Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan	1.636.999.875	728.436.850	44,50	8,99	908.563.025
- Sub. Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	200.000.000	199.482.000	99,74	100	518.000
- Sub. Kegiatan : Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	810.000.000	790.234.940	97,56	100	19.765.060
- Sub. Kegiatan : Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	144.359.475.343	144.315.823.093	99,97	99,97	43.652.250
- Kegiatan : PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH	235.322.471.907	231.981.654.493	98,58	98	3.335.142.774
- Sub. Kegiatan : PEMBANGUNAN RUANG PRAKTIK SISWA	145.939.276.643	142.872.386.513	97,90	97	3.066.890.130
- Sub. Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	354.109.900	353.552.850	99,84	100	557.050
- Sub. Kegiatan : Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi	330.573.250	324.705.985	98,23	100,00	192.625
- Sub. Kegiatan : Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	953.433.925	935.278.040	98,10	96	18.155.885
- Sub. Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.661.592.516	1.647.341.732	99,14	100	14.250.784
- Sub. Kegiatan : Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	204.685.000	195.490.772	95,51	100	9.194.228
- Sub. Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.998.605.100	3.835.827.160	95,93	100,00	162.777.940
- Sub. Kegiatan : Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah	203.199.950	202.664.950	99,74	100,00	535.000
- Sub. Kegiatan : Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa	698.317.000	697.433.140	99,87	100	883.860
- Sub. Kegiatan : Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	901.811.963	899.324.850	99,72	100,0	2.487.113
- Sub. Kegiatan : Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	302.679.050	301.127.750	99,49	100	1.551.300
- Sub. Kegiatan : Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	79.774.187.610	79.716.520.751	99,93	100	57.666.859
- Kegiatan : pengelolaan pendidikan Khusus dan Inovasi	18.183.479.342	15.852.043.752	87,18	84	602.835.640
- Sub. Kegiatan : Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	792.626.561	714.449.750	90,14	91	78.176.811
- Sub. Kegiatan : Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	349.050.831	348.648.800	99,88	100	402.031
- Sub. Kegiatan : Pengembangan Karir pendidik dan Tenaga	172.835.200	168.620.260	97,56	100	4.214.940
- Sub. Kegiatan : Penyediaan pendidik dan tenaga Kependidikan bagi	176.741.650	164.103.500	92,85	96	12.638.150
- Sub. Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan manajemen Sekolah	5.849.511.800	5.495.058.340	93,94	83	354.453.460
- Sub. Kegiatan : Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	313.130.250	306.470.202	97,87	100	6.660.048
- Sub. Kegiatan : Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi	214.533.900	209.523.900	97,66	100	5.010.000
- Sub. Kegiatan : Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.728.599.950	1.728.599.950	100,00	100	-
- Sub. Kegiatan : Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	8.586.449.200	8.445.169.000	98,35	98	141.280.200
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.295.119.950	1.242.525.612	95,94	84	52.594.338
- Kegiatan : PTK MULOK	106.984.400	106.933.400	99,95	100	51.000
- Sub. Kegiatan : Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan	106.984.400	106.933.400	99,95	100	51.000
- Kegiatan : PTK PENATAAN	700.000.000	668.102.925	95,44	100	31.897.075
- Sub. Kegiatan : Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga	700.000.000	668.102.925	95,44	100	31.897.075
- Kegiatan : PERITUNGAN	488.135.550	467.489.287	95,77	57	20.646.263
- Sub. Kegiatan : Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga	488.135.550	467.489.287	95,77	57	20.646.263

URAIAN	PAGU	REALISASI			SILVA
		KEUANGAN	FISIK		
1	2	3		4	
CABDIS 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	590.539.674	578.561.200	97,97	100	11.978.474
- Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	268.942.500	260.552.000	96,88	100	8.390.500
- Sub. Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	268.942.500	260.552.000	96,88	100	8.390.500
- Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	321.597.174	318.009.200	98,88	100	3.587.974
- Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	321.597.174	318.009.200	98,88	100	3.587.974
Program Pengelolaan Pendidikan	68.459.000	68.028.000	99,37	100	34.435.000
- Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	34.229.500	34.014.000	99,37	100	4.665.500
- Sub. Kegiatan : Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	9.810.000	9.662.000	98,49	100	148.000
- Sub. Kegiatan : Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga	19.969.500	19.902.000	99,66	100	67.500
- Sub. Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	4.450.000	4.450.000	100,00	100	4.450.000
- Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah	34.229.500	34.014.000	99,37	100	29.769.500
- Sub. Kegiatan : Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	9.810.000	9.662.000	98,49	100	9.800.000
- Sub. Kegiatan : Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga	19.969.500	19.902.000	99,66	100	19.969.500
- Sub. Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	4.450.000	4.450.000	100,00	100	-
CABDIS 2 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	301.659.200	291.624.986	96,67	100	10.034.214
- Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	301.659.200	291.624.986	96,67	100	10.034.214
- Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	301.659.200	291.624.986	96,67	100	10.034.214
Program Pengelolaan Pendidikan	122.793.700	122.488.450	99,75	100	305.250
- Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	61.709.150	61.558.400	99,76	100	150.750
- Sub. Kegiatan : Kegiatan Rakor SMA Kab. Donggala	20.565.600	20.565.600	100,00	100	-
- Sub. Kegiatan : Kegiatan Rakor SMA Kab. Parigi Moutong	23.741.100	23.741.100	100,00	99	-
- Sub. Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	17.402.450	17.251.700	99,13	100	150.750
- Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah	61.084.550	60.930.050	99,75	100	154.500
- Sub. Kegiatan : Kegiatan Rakor SMK Kab. Donggala	21.162.800	21.162.800	100,00	99	-
- Sub. Kegiatan : Kegiatan Rakor SMK Kab. Parigi Moutong	21.797.900	21.797.900	100,00	100	-
- Sub. Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	18.123.850	17.969.350	99,15	100	154.500
CABDIS 3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	259.287.700	257.830.400	99,44	100	1.457.300
- Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	37.777.250	37.377.250	98,94	100	400.000
- Sub. Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	37.777.250	37.377.250	98,94	100	400.000
- Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	221.510.450	220.453.150	99,52	100	1.057.300
- Sub. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	47.747.900	47.147.900	98,74	100	600.000
- Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	173.762.550	173.305.250	99,74	100	457.300
Program Pengelolaan Pendidikan	157.772.150	157.737.150	99,98	100	15.000
- Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	78.063.250	78.063.250	100,00	100	-
- Sub. Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	78.063.250	78.063.250	100,00	100	-
- Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah	79.708.900	79.673.900	99,96	100	15.000
- Sub. Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	79.708.900	79.673.900	99,96	100	15.000
CABDIS 4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	301.847.850	297.747.517	98,64	100	4.100.333
- Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	301.847.850	297.747.517	98,64	100	4.100.333
- Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	301.847.850	297.747.517	98,64	100	4.100.333
Program Pengelolaan Pendidikan	127.421.000	127.420.650	100,00	100	350
- Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	63.558.500	63.558.250	100,00	100	250
- Sub. Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	63.558.500	63.558.250	100,00	100	250
- Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah	63.862.500	63.862.400	100,00	100	100
- Sub. Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	63.862.500	63.862.400	100,00	100	100
CABDIS 5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	337.316.295	323.961.859	96,04	73	13.354.436
- Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	121.650.000	119.308.000	98,07	49	2.342.000
- Sub. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	121.650.000	119.308.000	98,07	49	2.342.000
- Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	36.513.750	33.229.150	91,00	39	3.284.600
- Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.513.750	33.229.150	91,00	39	3.284.600
- Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	179.152.545	171.424.709	95,69	97	7.727.836
- Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	179.152.545	171.424.709	95,69	97	7.727.836
Program Pengelolaan Pendidikan	41.798.000	36.898.000	88,28	100	4.900.000
- Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	20.899.000	19.099.000	91,39	100	1.800.000
- Sub. Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	20.899.000	19.099.000	91,39	100	1.800.000
- Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah	20.899.000	17.799.000	85,17	100	3.100.000
- Sub. Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	20.899.000	17.799.000	85,17	100	3.100.000
CABDIS 6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	328.676.081	326.300.979	99,28	100	2.375.102
- Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	219.872.081	218.844.579	99,53	100	1.027.502
- Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	219.872.081	218.844.579	99,53	100	1.027.502
- Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.296.000	26.370.600	96,61	100	925.400
- Sub. Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	27.296.000	26.370.600	96,61	100	925.400
- Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	81.508.000	81.085.800	99,48	100	422.200
- Sub. Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	81.508.000	81.085.800	99,48	100	422.200
Program Pengelolaan Pendidikan	99.630.000	93.590.000	93,94	100	6.040.000
- Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	49.815.000	46.795.000	93,94	100	3.020.000
- Sub. Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	49.815.000	46.795.000	93,94	100	3.020.000
- Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah	49.815.000	46.795.000	93,94	100	3.020.000
- Sub. Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	49.815.000	46.795.000	93,94	100	3.020.000

3.3 Inovasi Pendidikan

1. SIKOLA (inovator : Yudiawati V Windarrusliana, SKM., M.Kes)



Pendidikan memiliki peran sentral dalam upaya pengentasan kemiskinan, dan SIKOLA (Sistem Aplikasi Kompetensi Lulusan) muncul sebagai alat inovatif yang dapat memberikan kontribusi signifikan dalam hal ini. Berikut adalah beberapa cara di mana SIKOLA dapat berperan dalam pengentasan kemiskinan:

1. Pemerataan Akses Pendidikan

SIKOLA dapat digunakan untuk mengidentifikasi daerah atau kelompok yang menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan berkualitas. Dengan data yang diperoleh melalui sistem ini, upaya dapat difokuskan untuk memastikan bahwa pendidikan berkualitas dapat diakses secara merata oleh semua lapisan masyarakat.

2. Penekanan pada Keterampilan yang Dibutuhkan di Pasar Kerja

SIKOLA tidak hanya mengukur pencapaian akademis, tetapi juga keterampilan praktis dan soft skills yang dibutuhkan di dunia kerja. Ini membantu menciptakan lulusan yang lebih siap untuk memasuki pasar kerja, meningkatkan peluang mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

3. Kolaborasi dengan Industri Lokal

Dengan melibatkan industri lokal dalam pengembangan kurikulum dan penilaian melalui SIKOLA, pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja setempat. Ini tidak hanya menciptakan lulusan yang lebih relevan secara profesional, tetapi juga meningkatkan peluang pekerjaan dan penghasilan bagi mereka.

4. Mengukur Kinerja Pendidikan

SIKOLA memberikan alat untuk mengukur kinerja pendidikan secara lebih holistik. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pencapaian dan keterampilan lulusan, dapat dilakukan perbaikan yang terarah dan efektif dalam sistem pendidikan.

5. Pemberdayaan Masyarakat

SIKOLA dapat digunakan sebagai alat untuk melibatkan orangtua, komunitas, dan siswa dalam proses pendidikan. Melibatkan mereka secara aktif dapat meningkatkan dukungan sosial untuk pendidikan, yang merupakan faktor penting dalam mengatasi kendala ekonomi dan sosial yang menyebabkan kemiskinan.

Melalui fokus pada akses, relevansi, dan kualitas pendidikan, SIKOLA memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan. Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan memanfaatkan teknologi untuk mengukur dan meningkatkan kinerja pendidikan, SIKOLA menjadi alat penting dalam menciptakan peluang yang lebih adil dan berkelanjutan bagi semua warga.

Kebijakan pemerintahpun hadir dalam rangka untuk mengentaskan kemiskinan melalui Supertax Deduction yang akan memberikan keringanan pajak kepada pihak Perusahaan dan Dunia Industri yang berinvestasi di Dunia Pendidikan.

2. Pengembangan Website Belajar Guru SLB Melalui Learning Manajemen System (LMS); (inovator : Nurseha, S.Sos.,M.Si)



Pada dasarnya SLB merupakan pendidikan formal bagi anak cacat atau berkebutuhan khusus yaitu : penderita tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa dan tunalaras. Sekolah luar Biasa (SLB) memiliki perbedaan yang cukup jelas dengan sekolah biasa pada umumnya. Sekolah Luar Biasa (SLB) diselenggarakan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, , sedangkan sekolah biasa bagi anak normal. Tidak hanya siswa yang diajarkan saja yang khusus, sedangkan sekolah biasa bagi anak normal. Tidak hanya siswa yang diajarkan saja yang khusus, disekolah luar biasa juga memerlukan kurikulum, metode dan guru yang mengajarnya juga khusus, sehingga dapat membantu dalam proses pembentukan karakter anak yang berkebutuhan kusus. Terdapat mata pelajaran Program Kebutuhan Khusus yang bertujuan untuk membantu

anak memaksimalkan indra yang dimilinya dan mengatasi keterbatasannya.

Berikut adalah tujuan program masing-masing kebutuhan khusus:

1. Tunanetra: pengembangan orientasi, mobilitas, sosial, dan komunikasi,
2. Tunarungu: pengembangan komunikasi, persepsi bunyi, dan irama
3. Tunagrahita: pengembangan diri
4. Tunadaksa: pengembangan diri dan gerak
5. Autis: pengembangan komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku.

Berdasarkan hasil evaluasi awal tahun 2024 menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi pendidik SLB belum banyak dilakukan, baik oleh sekolah, oleh Dinas Pendidikan maupun oleh lembaga luar seperti BPMP. Hal tersebut berdampak pada rendahnya kompetensi pendidik SLB yang selanjutnya berimplikasi pada rendahnya mutu pendidikan satuan pendidikan. Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu dilakukan pembinaan secara terintegrasi, multi strategi dan berkesinambungan peningkatan kompetensi pendidik SLB berbasis pelatihan lintas strategi (PELITAS). Berdasarkan hal tersebut maka nama proyek perubahan : **PENINGKATAN KOMPETENSI PENDIDIK SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) BERBASIS PELITAS DI SULAWESI TENGAH** yang sekaligus menjadi Inovasi : **Pengembangan Website Belajar Guru SLB Melalui Learning Management System.**

3.4 Penghargaan

1.1.1 Bidang Pembinaan SMK



**Kegiatan Lomba Kompetensi Siswa SMK tingkat Nasional di Lampung
Pemenang Karate Juara III Komite Perorangan 53 Kg Putri dan
Pemenang Karate Juara III Komite Perorangan 61 Kg Putra**



**Bersama Ibu Hj. Uriani Hasan, S.Sos.,M.Si
(Perwakilan Dinas pendidikan Prov.Sulteng)**



**Kegiatan Lomba Kompetensi Siswa SMK tingkat Nasional di Lampung
Peraih Perunggu kategori teknologi Otomotif Mobil**

1.1.2 Bidang Pembinaan SMA



Kegiatan Minat , Bakat dan kreativitas Siswa SMA tingkat Nasional di Jakarta Lomba OSN Tingkat Nasional, Peraih Medali Perak bidang Geografi, berasal dari SMAS AL Azhar mandiri Palu



Foto Bersama seluruh peserta lomba OSN Bidang Geografi

1.1.3 SD/SMP



Kegiatan Festival dan Lomba Seni Siswa Tingkat nasional di Jakarta Juara 2 Kategori Pantomim tingkat SMP



**Kegiatan Festival dan Lomba Seni Siswa Tingkat nasional di Jakarta
Juara Harapan 3 Kategori Pantomim tingkat SD**



Foto Bersama Pemenang lomba dan perwakilan Dinas Pendidikan prov.Sulteng Disdik



**Kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa di Jakarta
Juara 2 Kategori Renang tingkat SMP**



Foto Bersama seluruh Pemenang lomba dan perwakilan Dinas Pendidikan prov.Sulteng Disdik



**Kegiatan Olimpiade Sains nasional(OSN) di Jakarta
Juara 1 Kategori Atletik tingkat SMP**

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 ini merupakan laporan yang diharapkan menjadi sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang pencapaian target kinerja. Untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian kinerja sesuai dengan amanat yang telah menjadi janji Dinas Pendidikan Provinsi yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah Tahun 2024 dengan Gubernur Sulawesi Tengah.

Untuk itu diharapkan agar laporan ini dapat menjadi bahan masukan dan mendorong Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah agar berusaha sungguh-sungguh sehingga dapat mewujudkan lembaga yang dikenal berkualitas baik dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur pendidikan. Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung berjalannya sasaran strategis tersebut.

Secara umum sasaran strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024 relatif baik dan berhasil. Tingkat keberhasilan tersebut terbukti dari besarnya capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan. Sesuai pengukuran kinerja, dari sebanyak 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis, rata-rata capaian kinerjanya tinggi di tahun 2024. Namun demikian tetap diperlukan adanya evaluasi lebih lanjut terhadap proses perencanaan program dan penganggaran dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam matriks Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah 2021 – 2026.

Secara umum keseluruhan capaian kinerja tersebut di atas telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah untuk selalu meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa-masa mendatang.

4.2 Saran

1. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat, dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumberdaya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan.
2. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang sudah ditetapkan dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
3. Perlu adanya sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan output maupun outcomes kegiatan yang bersangkutan.

Demikian laporan kinerja ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Esselon II, III dan IV Tahun 2024 (terlampir)





PERJANJIAN KINERJA

PERUBAHAN

DINAS PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN

PROVINSI SULAWESI TENGAH

PROVINSI SULAWESI

TENGAHTAHUN 2024

JUNI 2024





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, S.KM., M.Kes**
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **H. RUSDY MASTURA**
Jabatan : Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi keuangan dan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2024

PIHAK KEDUA,
GUBERNUR

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

H. RUSDY MASTURA

YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, S.KM., M.Kes

NIP. 19670712 199003 2 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1.1 Nilai Rapor Pendidikan 1.2 Nilai APS Usia 16 - 18 1.3 Nilai APS Usia 4 - 18	70.00 80.00 80.00

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 802.676.454.216	APBN, APBD
2.	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 483.185.884.609	APBN, APBD
3.	Program Pengembangan Kurikulum	Rp. 106.984.400	APBD
4.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 1.188.135.550	APBD

Palu, 2024

PIHAK KEDUA,
GUBERNUR

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

H. RUSDY MASTURA

YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, S.KM., M.Kes

NIP. 19670712 199003 2 013

ESSELON III



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dr. ASRUL ACHMAD, S.Pd., M.Si**
Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, S.KM., M.Kes**
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi keuangan dan fisik perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2024

PIHAK PERTAMA,
SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dr. ASRUL ACHMAD, S.Pd. M.Si
NIP. 19701010 199803 1 010

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, S.KM., M.Kes
NIP. 19670712 199003 2 013

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	1.1 Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	71,00
		- Indeks Reformasi Hukum Perangkat Daerah	
		- Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	
		- Indeks SPBE Perangkat Daerah	
		- Tingkat Digitalisasi Arsip Perangkat Daerah	
		- Indeks Tata Kelola PBJ Perangkat Daerah	
		- Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	
		- TLHP BPK dan APIP Perangkat Daerah	
		- Nilai SAKIP Perangkat Daerah	

No	Nama Program/ Kegiatan		Anggaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)		(3)	(4)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp	802.676.454.216	APBD
	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	2.967.856.794	APBD
	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	788.221.393.451	APBD
	- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp	507.469.850	APBD
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	3.028.732.780	APBD
	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	7.125.942.261	APBD
	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	825.059.080	APBD

Palu, 2024

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PIHAK PERTAMA,
SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, S.KM., M.Kes

Dr. ASRUL ACHMAD, S.Pd. M.Si

NIP. 19670712 199003 2 013

NIP. 19701010 199803 1 010



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **M. YUNUS, SE**
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan SMA
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, S.KM., M.Kes**
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi keuangan dan fisik perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2024

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, S.KM., M.Kes
NIP. 19670712 199003 2 013

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG PEMBINAAN SMA
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

M. YUNUS, SE
NIP. 19760821 200801 1 006

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHANTAHUN 2024
 BIDANG PEMBINAAN SMA
 DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	MENINGKATNYA PARTISIPASI SATUAN PENDIDIKAN	PERSENTASE PENINGKATAN ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH	100
		- persentase peningkatan akses terhadap layanan pendidikan SMA	
		- PPDB Online	
		- Perlengkapan Sekolah	
		- % pemenuhan kebutuhan SMA	
		- % penyerapan BOSNAS	
		- % penyerapan BOSDA	
		- % penduduk putus sekolah jenjang SMA yg mengikuti paket C	
		- % sekolah menengah atas yang ditingkatkan utilitasnya	
2	Meningkatnya Nilai Rapor Pendidikan	Persentase Peningkatan Nilai Rapor Pendidikan Menengah Atas	100
		- Persentase Peningkatan Angka Putus Sekolah Jenjang Satuan Pendidikan SMA	
		- Persentase Peningkatan Literasi dan Numerasi	

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PROGRAM PENGELOLAAN	229.678.941.360	APBD, APBN
	- Pengelolaan pendidikan menengah Atas	229.678.941.360	APBD, APBN

Palu, 2024

PIHAK KEDUA,
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 PROVINSI SULAWESI TENGAH

YUDIAWATI WINDARRUSLIANA, S.K.M., M.Kes
 NIP. 19670712 199003 2 013

PIHAK PERTAMA,
 KEPALA BIDANG PEMBINAAN SMA
 DINAS PENDIDIKAN
 PROVINSI SULAWESI TENGAH

M. YUNUS, SE
 NIP. 19760821 200801 1 006



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ZULFIKAR IS PAUDI, S.Pd., M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan SMK
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, S.KM., M.Kes**
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi keuangan dan fisik perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2024

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, S.KM., M.Kes
NIP. 19670712 199003 2 013

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG PEMBINAAN SMK
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

ZULFIKAR IS PAUDI, S.Pd., M.Si
NIP. 19731115 199801 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
 BIDANG PEMBINAAN SMK
 DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	MENINGKATNYA PARTISIPASI SATUAN PENDIDIKAN	Persentase peningkatan angka partisipasi sekolah jenjang satuan pendidikan SMK	
		- persentase peningkatan akses terhadap layanan pendidikan SMK	
		- %penyerapan BOSNAS/BOSDA	
		- % sekolah menengah kejuruan yang ditingkatkan sarana prasarana dan utilitasnya	
2	Meningkatnya Nilai Rapor Pendidikan	Persentase Peningkatan Nilai Rapor Pendidikan Menengah Kejuruan	
		persentase lulusan SMK yg diterima - Dunia Usaha dan Dunia Industri	

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	235.323.463.907	APBD, APBN
	- Pengelolaan pendidikan menengah Kejuruan	235.323.463.907	APBD,APBN

Palu, 2024

PIHAK KEDUA,
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 PROVINSI SULAWESI TENGAH



YUDIAWATIV. WINDARRUSLIANA. S.KM., M.Kes
 NIP. 19670712 199003 2 013

PIHAK PERTAMA,
 KEPALA BIDANG PEMBINAAN SMK
 DINAS PENDIDIKAN
 PROVINSI SULAWESI TENGAH



ZULFIKAR IS PAUDI, S.Pd., M.Si
 NIP. 19731115 199801



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NURSEHA, S.Sos., M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan PKLK dan Inovasi Pendidikan
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, S.KM., M.Kes**
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**

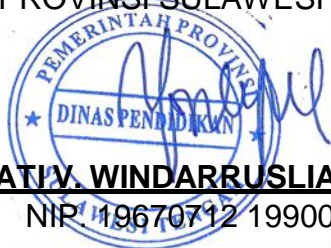
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi keuangan dan fisik perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2024

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, S.KM., M.Kes
NIP. 19670712 199003 2 013

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG PEMBINAAN PKLK
DAN INOVASI PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NURSEHA, S.Sos., M.Si
NIP. 19730315 199403 2 005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
 BIDANG PEMBINAAN PKLK DAN INOVASI PENDIDIKAN
 DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	MENINGKATNYA PARTISIPASI SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS	PERSENTASE PENINGKATAN PENDUDUK ANAK DISABILITAS YG	100
		persentase peningkatan akses terhadap layanan pendidikan KHUSUS	
		- %penyerapan BOSNAS	
		- %Siswa pendidikan khusus yang ditingkatkan	
2	MENINGKATNYA NILAI RAPOR PENDIDIKAN PADA PENDIDIKAN KHUSUS	PERSENTASE PENINGKATAN NILAI RAPORT PENDIDIKAN PADA PENDIDIKAN KHUSUS	100
		Persentase Kebutuhan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada sekolah pendidikan Khusus	
		- %Ketrampilan Siswa pendidikan khusus yang ditingkatkan	

No	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENGELOLAAN	18.183.479.342	APBD, APBN
	- Pengelolaan Pendidikan Khusus	18.183.479.342	APBD,APBN

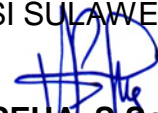
Palu, 2024

PIHAK KEDUA,
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 PROVINSI SULAWESI TENGAH



YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, S.K.M., M.Kes
 NIP. 19670712 199003 2 013

PIHAK PERTAMA,
 KEPALA BIDANG PEMBINAAN PKLK
 DAN INOVASI PENDIDIKAN
 DINAS PENDIDIKAN
 PROVINSI SULAWESI TENGAH



NURSEHA, S.Sos., M.Si
 NIP. 19730315 199403 2



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUNASIR, SE., MM**
Jabatan : Kepala Bidang PTK
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, S.KM., M.Kes**
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi keuangan dan fisik perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2024

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, S.KM., M.Kes
NIP. 19670712 199003 2 013

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG PTK
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

MUNASIR, SE., MM
NIP. 19861017 201503 1 003

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BIDANG PEMBINAAN PTK
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kompetensi Guru	Persentase guru Sekolah Menengah - Persentase Guru Penggerak	100
2	Meningkatnya ketersediaan	Indeks Distribusi guru - Persentase satuan pendidikan yang terpenuhi data kebutuhan pendidikannya	100
3	Sinkronisasi dan validasi data sertifikasi guru	persentase guru yang sudah tersertifikasi - persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik (serdik)	100
4	Meningkatnya program kurikulum merdeka pada satuan pendidikan menengah	persentase satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang melaksanakan kurikulum merdeka - Persentase pemenuhan kebutuhan silabus muatan lokal	100

No	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Pemindahan Pendidik dan Tenaga - Kependidikan Lintas Kab/ Kota dalam 1 (satu) Provinsi	1.188.135.550 1.188.135.550	APBD APBD
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURUKULUM - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	106.984.400 106.984.400	APBD APBD

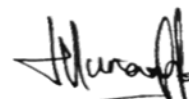
Palu, 2024

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, S.KM., M.Kes
NIP. 19670712 199003 2 013

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG PTK
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



MUNASIR, SE., MM
NIP. 19861017 201503 1 003



PERJANJIAN KERJA SAMA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **KRISTI ARIA PRATAMA, SH., M.Si**
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah I
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, S.KM., M.Kes**
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi keuangan dan fisik perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2024

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, S.KM., M.Kes
NIP. 19670712 199003 2 013

PIHAK PERTAMA,
KEPALA CABANG DINAS
PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH I
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KRISTI ARIA PRATAMA, SH., M.Si
NIP. 19870521 201101 1 004

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH II
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)	100
		- Persentase Pemenuhan kebutuhan data sekolah melalui MKKS	
2	MENINGKATNYA PARTISIPASI SATUAN PENDIDIKAN	PERSENTASE PENURUNAN ANGKA PUTUS SEKOLAH JENJANG MENENGAH	100
		Persentase ketersediaan data - urusan bidang pendidikan menengah Atas	
		Persentase ketersediaan data - urusan bidang pendidikan menengah Kejuruan	

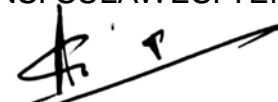
No	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	590.539.674	APBD
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	268.942.500	APBD
	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	321.597.174	APBD
2	PROGRAM PENGELOLAAN	68.459.000	APBD
	- Pengelolaan pendidikan Menengah Atas	34.229.500	APBD
	- Pengelolaan pendidikan Menengah Kejuruan	34.229.500	APBD

Palu, 2024

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, S.KM., M.Kes
NIP. 19670712 199003 2 013

PIHAK PERTAMA,
KEPALA CABANG DINAS
PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH I
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


KRISTYARIA PRATAMA, SH., M.Si
NIP. 19870521 201101 1



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SARIFAH, S.Pd., M.Pd**
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah II
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, S.KM., M.Kes**
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi keuangan dan fisik perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2024

PIHAK PERTAMA,
KEPALA CABANG DINAS
PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH II
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

SARIFAH, S.Pd., M.Pd
NIP. 19800816 200801 2 017

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, S.KM., M.Kes
NIP. 19670712 199003 2 013

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH III
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)	100
		- Persentase Pemenuhan kebutuhan data sekolah melalui MKKS	
2	MENINGKATNYA PARTISIPASI SATUAN PENDIDIKAN	PERSENTASE PENURUNAN ANGKA PUTUS SEKOLAH JENJANG MENENGAH	100
		- Persentase ketersediaan data urusan bidang pendidikan menengah Atas	
		- Persentase ketersediaan data urusan bidang pendidikan menengah Kejuruan	

No	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	301,659,200	APBD
	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	301,659,200	APBD
2	PROGRAM PENGELOLAAN	122,793,700	APBD
	- Pengelolaan pendidikan Menengah Atas	61,709,150	APBD
	- Pengelolaan pendidikan Menengah Kejuruan	61,084,550	APBD

Palu, 2024

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, S.KM., M.Kes
NIP. 19670712 199003 2 013

PIHAK PERTAMA,
KEPALA CABANG DINAS
PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH II
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



SARIFAH, S.Pd., M.Pd
NIP. 19800816 200801



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ALWI ACHMAD MUSA, S.Sos**
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah III
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : **YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, S.KM., M.Kes**
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua**,

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi keuangan dan fisik perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2024

PIHAK PERTAMA,
KEPALA CABANG DINAS
PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH III
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

ALWI ACHMAD MUSA, S.Sos
NIP. 19710516 200502 1 003

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, S.KM., M.Kes
NIP. 19670712 199003 2 013

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH III
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)	100
		- Persentase Pemenuhan kebutuhan data sekolah melalui MKKS	
2	MENINGKATNYA PARTISIPASI SATUAN PENDIDIKAN	PERSENTASE PENURUNAN ANGKA PUTUS SEKOLAH JENJANG MENENGAH	100
		Persentase ketersediaan data	
		- urusan bidang pendidikan menengah Atas	
		Persentase ketersediaan data	
		- urusan bidang pendidikan menengah Kejuruan	

No	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	259,287,700	APBD
	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	37,777,250	APBD
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	47,747,900	APBD
	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	173,762,550	APBD
2	PROGRAM PENGELOLAAN	157,772,150	APBD
	- Pengelolaan pendidikan Menengah Atas	78,063,250	APBD
	- Pengelolaan pendidikan Menengah Kejuruan	79,708,900	APBD

Palu, 2024

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PIHAK PERTAMA,
KEPALA CABANG DINAS
PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH III
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



YUDIAWATI WINDARRUSLIANA, S.KM., M.Kes
NIP. 19670712 199003 2 013

ALWI ACHMAD MUSA, S.Sos
NIP. 19710516 200502 1 003



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SOFIAN, SE., MM**
Jabatan : Plt. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah IV
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : **YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, S.KM., M.Kes**
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua**,

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi keuangan dan fisik perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2024

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, S.KM., M.Kes
NIP. 19670712 199003 2 013

PIHAK PERTAMA,
KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN
MENENGAH WILAYAH IV
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

SOFIAN, SE., MM
NIP. 19690830 200012 1 005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH IV
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)	100
		- Persentase Pemenuhan kebutuhan data sekolah melalui MKKS	
2	MENINGKATNYA PARTISIPASI SATUAN PENDIDIKAN	PERSENTASE PENURUNAN ANGKA PUTUS SEKOLAH JENJANG MENENGAH	100
		Persentase ketersediaan data - urusan bidang pendidikan menengah Atas	
		Persentase ketersediaan data - urusan bidang pendidikan menengah Kejuruan	

No	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	301.847.850	APBD
	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	301.847.850	APBD
2	PROGRAM PENGELOLAAN	127,421,000	APBD
	- Pengelolaan pendidikan Menengah Atas	63,558,500	APBD
	- Pengelolaan pendidikan Menengah Kejuruan	63,862,500	APBD

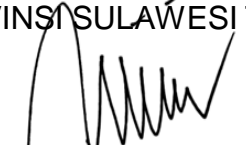
Palu, 2024

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, S.KM., M.Kes
NIP. 19670712 199003 2 013

PIHAK PERTAMA,
KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN
MENENGAH WILAYAH IV
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



SOFIAN, SE., MM
NIP. 19690830 200012 1 005



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YASSER MASULILI, S.Ag**
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah V
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, S.KM., M.Kes**
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi keuangan dan fisik perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2024

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, S.KM., M.Kes
NIP. 19670712 199003 2 013

PIHAK PERTAMA,
KEPALA CABANG DINAS
PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH V
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

YASSER MASULILI, S.Ag
NIP. 19770320 200501 1 003

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH V
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)	100
		- Persentase Pemenuhan kebutuhan data sekolah melalui MKKS	
2	MENINGKATNYA PARTISIPASI SATUAN PENDIDIKAN	PERSENTASE PENURUNAN ANGKA PUTUS SEKOLAH JENJANG MENENGAH	100
		Persentase ketersediaan data - urusan bidang pendidikan menengah Atas	
		Persentase ketersediaan data - urusan bidang pendidikan menengah Kejuruan	

No	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	337,316,295	APBD
-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	36.513.750	APBD
-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	121.650.000	APBD
-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	179.152.545	APBD
2	PROGRAM PENGELOLAAN	41,798,000.0	APBD
-	Pengelolaan pendidikan Menengah Atas	20,899,000.0	APBD
-	Pengelolaan pendidikan Menengah Kejuruan	20,899,000.0	APBD

Palu, 2024

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, S.KM., M.Kes
NIP. 19670712 199003 2 013

PIHAK PERTAMA,
KEPALA CABANG DINAS
PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH V
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

YASSER MASULILI, S.Ag
NIP. 19770320 200501 1 003



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FITRIYAH IHWANI, S.Sos., MM**
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah VI
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, S.KM., M.Kes**
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi keuangan dan fisik perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2024

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, S.KM., M.Kes
NIP. 19670712 199003 2 013

PIHAK PERTAMA,
KEPALA CABANG DINAS
PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH VI
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

FITRIYAH IHWANI, S.Sos., MM
NIP. 19720717 200003 2 006

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH VI
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)	100
		- Persentase Pemenuhan kebutuhan data sekolah melalui MKKS	
2	MENINGKATNYA PARTISIPASI SATUAN PENDIDIKAN	PERSENTASE PENURUNAN ANGKA PUTUS SEKOLAH JENJANG MENENGAH	100
		Persentase ketersediaan data - urusan bidang pendidikan menengah Atas	
		Persentase ketersediaan data - urusan bidang pendidikan menengah Kejuruan	

No	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	328.676.081	APBD
-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27,296,000	APBD
-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	81,508,000	APBD
-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	219,872,081	APBD
2	PROGRAM PENGELOLAAN	99,630,000	APBD
-	Pengelolaan pendidikan Menengah Atas	49,815,000	APBD
-	Pengelolaan pendidikan Menengah Kejuruan	49,815,000	APBD

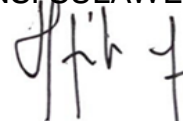
Palu, 2024

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, S.KM., M.Kes
NIP. 19670712 199003 2 013

PIHAK PERTAMA,
KEPALA CABANG DINAS
PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH VI
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



FITRIYAH IHWANI, S.Sos., MM
NIP. 19720717 200003 2 006

ESSELON IV

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **I. NURFAIDAH, SE., M.Si**
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Perencanaan dan Program

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **Dr. ASRUL ACHMAD, S.Pd., M.Si**
Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**

Pihak Pertama berjanji :

3. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
4. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi keuangan dan fisik perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2024

PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dr. ASRUL ACHMAD, S.Pd. M.Si
NIP. 19701010 199803 1 010

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SUB. BAGIAN
PERENCANAAN DAN PROGRAM
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

I. NURFAIDAH, SE., M.Si
NIP. 19770922 200901 2 003

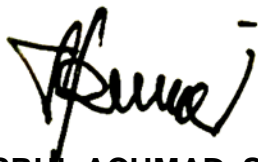
**SUB. BAGIAN PERENCANAAN DAN PROGRAM
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya kegiatan Rekonsiliasi dan penyusunan laporan BMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100
2	Terlaksananya Kegiatan peningkatan Nilai SAKIP, SDM dan Penganggaran Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100
3	Terlaksananya Kegiatan peningkatan Nilai SAKIP, SDM dan Penganggaran Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100
4	Terlaksananya Kegiatan peningkatan Nilai SAKIP, SDM dan Penganggaran Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100
5	Terlaksananya Kegiatan peningkatan Nilai SAKIP, SDM dan Penganggaran Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100
6	Terlaksananya Kegiatan peningkatan Nilai SAKIP, SDM dan Penganggaran Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.066.356.950	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	44.000.000	APBD
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	857.499.844	APBD

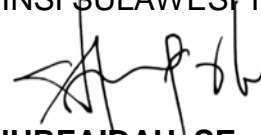
Palu, 2024

PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Dr. ASRUL ACHMAD, S.Pd. M.Si
NIP. 19701010 199803 1 010

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SUB. BAGIAN
PERENCANAAN DAN PROGRAM
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



I. NURFAIDAH, SE., M.Si
NIP. 19770922 200901 2 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SYAFWAN, SE., MM**
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Keuangan dan Aset

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **Dr. ASRUL ACHMAD, S.Pd., M.Si**
Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi keuangan dan fisik perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dr. ASRUL ACHMAD, S.Pd. M.Si
NIP. 19701010 199803 1 010

Palu, 2024

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SUB. BAGIAN
KEUANGAN DAN ASET
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

SYAFWAN, SE., MM
NIP. 197703229 200012 1 001

**SUB. BAGIAN KEUANGAN DAN ASET
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

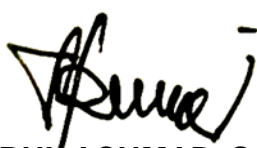
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Bangunan	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara	100
2	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Alat dan mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100
3	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Gedung/Bangunan	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor yang Dipelihara	100
4	Terselenggaranya Pemberian gaji dan tunjangan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	100
5	Terlaksananya kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	100


No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	788.221.393.451	APBD
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	426.959.080	APBD
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.175.908.880	APBD
4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	507.469.850	APBD

Palu, 2024

PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SUB. BAGIAN
KEUANGAN DAN ASET
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


Dr. ASRUL ACHMAD, S.Pd. M.Si
NIP. 19701010 199803 1 010


SYAFWAN, SE., MM
NIP. 197703229 200012 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ZAINUL AKFAR, S.Pd.T., M.Pd**
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **Dr. ASRUL ACHMAD, S.Pd., M.Si**
Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi keuangan dan fisik perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2024

PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dr. ASRUL ACHMAD, S.Pd. M.Si
NIP. 19701010 199803 1 010

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SUB. BAGIAN
KEPEGAWAIAN DAN UMUM
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

ZAINUL AKFAR, Pd.T., M.Pd
NIP. 19800317 200701 1 019

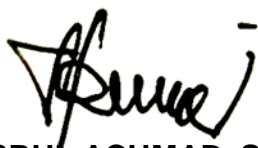
**SUB. BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100
2	Terselenggaranya penyediaan peralatan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100
3	Terselenggaranya penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	852.823.900	APBD
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.125.942.261	APBD
3	Penyediaan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	340.880.000	APBD
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.220.000	APBD

Palu, 2024

PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Dr. ASRUL ACHMAD, S.Pd. M.Si
NIP. 19701010 199803 1 010

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SUB. BAGIAN
KEPEGAWAIAN DAN UMUM
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



ZAINUL AKFAR, Pd.T., M.Pd
NIP. 19800317 200701 1 019

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :



Nama : **INDRIYANI, SE**
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Tata Usaha
Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah I
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **KRISTI ARIA PRATAMA, SH., M.Si**
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah I
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi keuangan dan fisik perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2024

PIHAK KEDUA,
KEPALA CABANG DINAS
PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH I
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KRISTI ARIA PRATAMA, SH., M.Si
NIP. 19670712 199003 2 013

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SUB. BAGIAN TATA USAHA
CABANG DINAS PENDIDIKAN
MENENGAH WILAYAH I
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

INDRIYANI, SE
NIP. 19690626 199503 2 008

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
SUB. BAGIAN TATA USAHA
CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH I
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersinkronisasinya Mutu Pendidikan di Cabdis DIKMEN WIL.I	Jumlah Kepala SMA/SMK/SLB yang Mengikuti Rakor	100 Sekolah
2	Termonitoringnya Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian (UKK), Ujian Sekolah (US), Asesment Nasional Berbasis Komputer (ANBK).	Jumlah Pelaksanaan Monev UKK, US, dan ANBK di Sekolah	100%

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	268.942.500	APBD
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	321.597.174	APBD

Palu, 2024

PIHAK KEDUA,
 KEPALA CABANG DINAS
 PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH I
 DINAS PENDIDIKAN
 PROVINSI SULAWESI TENGAH



KRISTI ARIA PRATAMA, SH., M.Si
 NIP. 19670712 199003 2 013

PIHAK PERTAMA,
 KEPALA SUB. BAGIAN TATA USAHA
 CABANG DINAS PENDIDIKAN
 MENENGAH WILAYAH I
 DINAS PENDIDIKAN
 PROVINSI SULAWESI TENGAH



INDRIYANI, SE
 NIP. 19690626 199503 2 008

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **TASNIMA, SE**
Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan SMA
Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah I
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **KRISTI ARIA PRATAMA, SH., M.Si**
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah I
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi keuangan dan fisik perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2024

PIHAK KEDUA,
KEPALA CABANG DINAS
PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH I
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KRISTI ARIA PRATAMA, SH., M.Si
NIP. 19670712 199003 2 013

PIHAK PERTAMA,
Plt. KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMA
CABANG DINAS PENDIDIKAN
MENENGAH WILAYAH I
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

ARIFIN, S.Si., MM
NIP. 19751112 200801 1 007

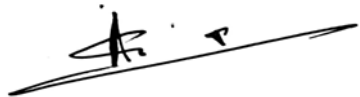
**SEKSI PEMBINAAN SMA
CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH I
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Tervalidasinya Data Siswa Penerima PIP Wilayah I	Jumlah Data Siswa Penerima PIP Wilayah I yang tervalidasi	10.606 Siswa
	Terseleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) di Wilayah I	Jumlah Siswa yang mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) di Wilayah I	20 Siswa
	Terseleksinya Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) di Wilayah I	Jumlah Siswa yang mengikuti Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) di Wilayah I	72 Siswa
	Terbinanya Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)	Jumlah MGMP yang terbina	14 MGMP
	Terverifikasinya Data Laporan Bulanan Sekolah	Jumlah SMA yang terverifikasi Data Laporan Bulanan di Wilayah I	52 Satuan Pendidikan (SMA)

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	9.810.000	APBD
2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	19.969.500	APBD
3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	4.450.000	APBD

Palu, 2024

PIHAK KEDUA,
KEPALA CABANG DINAS
PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH I
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



KRISTI ARIA PRATAMA, SH., M.Si
NIP. 19670712 199003 2 013

PIHAK PERTAMA,
Plt. KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMA
CABANG DINAS PENDIDIKAN
MENENGAH WILAYAH I
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



ARIFIN, S.Si, MM
NIP. 19751112 200801 1 007

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HASNIATI, SE**
Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan SMK
Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah I
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : **KRISTI ARIA PRATAMA, SH., M.Si**
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah I
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua**,

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi keuangan dan fisik perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2024

PIHAK KEDUA,
KEPALA CABANG DINAS
PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH I
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KRISTI ARIA PRATAMA, SH., M.Si
NIP. 19670712 199003 2 013

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMK
CABANG DINAS PENDIDIKAN
MENENGAH WILAYAH I
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

HASNIATI, SE., MM
NIP. 19770525 200502 2 002

**SEKSI PEMBINAAN SMK
CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH I
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Tervalidasinya Data Siswa Penerima PIP Wilayah I	Jumlah Data Siswa Penerima PIP Wilayah I yang tervalidasi	4.070 Siswa
	Terseleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) di Wilayah I	Jumlah Siswa yang mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) di Wilayah I	20 Siswa
	Terseleksinya Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) di Wilayah I	Jumlah Siswa yang mengikuti Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) di Wilayah I	28 Siswa
	Terbinanya Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)	Jumlah MGMP yang terbina	14 MGMP
	Terverifikasinya Data Laporan Bulanan Sekolah	Jumlah SMK yang terverifikasi Data Laporan Bulanan di Wilayah I	34 Satuan Pendidikan (SMK)

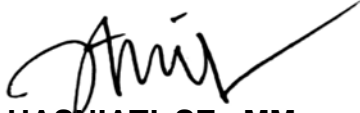
No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	9.810.000	APBD
2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	19.969.500	APBD
3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	4.450.000	APBD

Palu, 2024

PIHAK KEDUA,
KEPALA CABANG DINAS
PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH I
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


KRISTI ARIA PRATAMA, SH., M.Si
NIP. 19670712 199003 2 013

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMK
CABANG DINAS PENDIDIKAN
MENENGAH WILAYAH I
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


HASNIATI, SE., MM
NIP. 19770525 200502 2 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :



Nama : **DENI, SKM**
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Tata Usaha
Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah II
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **SARIFAH, S.Pd., M.Pd**
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah II
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi keuangan dan fisik perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2024

PIHAK KEDUA,
KEPALA CABANG DINAS
PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH II
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

SARIFAH, S.Pd., M.Pd
NIP. 19800816 200801 2 017

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SUB. BAGIAN TATA USAHA
CABANG DINAS PENDIDIKAN
MENENGAH WILAYAH II
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENI, SKM
NIP. 19800402 200701 1 006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
SUB. BAGIAN TATA USAHA
CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH II
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersinkronisasinya Mutu Pendidikan di Cabdis DIKMEN WIL.I	Jumlah Kepala SMA/SMK/SLB yang Mengikuti Rakor	100 Sekolah
2	Termonitoringnya Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian (UKK), Ujian Sekolah (US), Asesment Nasional Berbasis Komputer (ANBK).	Jumlah Pelaksanaan Monev UKK, US, dan ANBK di Sekolah	100%

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp301.659.200	APBD

Palu, 2024

PIHAK KEDUA,
 KEPALA CABANG DINAS
 PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH II
 DINAS PENDIDIKAN
 PROVINSI SULAWESI TENGAH

PIHAK PERTAMA,
 KEPALA SUB. BAGIAN TATA USAHA
 CABANG DINAS PENDIDIKAN
 MENENGAH WILAYAH II
 DINAS PENDIDIKAN
 PROVINSI SULAWESI TENGAH

SARIFAH. S. Pd., M. Pd
 NIP. 19800816 200801 2 017

DENI. SKM
 NIP. 19800402 200701 1 006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HARTIAN I. WOLINGALO, S.Pd., M.Pd**
Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan SMA
Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah II
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : **SARIFAH, S.Pd., M.Pd**
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah II
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua**,

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi keuangan dan fisik perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2024

PIHAK KEDUA,
KEPALA CABANG DINAS
PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH II
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

SARIFAH, S.Pd., M.Pd
NIP. 19800816 200801 2 017

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMA
CABANG DINAS PENDIDIKAN
MENENGAH WILAYAH II
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

HARTIAN I. WOLINGALO, S.Pd., M.Pd
NIP. 19761111 200604 1 021

**SEKSI PEMBINAAN SMA
CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH II
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Tervalidasinya Data Siswa Penerima PIP Wilayah I	Jumlah Data Siswa Penerima PIP Wilayah I yang tervalidasi	10.606 Siswa
	Terseleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) di Wilayah I	Jumlah Siswa yang mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) di Wilayah I	20 Siswa
	Terseleksinya Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) di Wilayah I	Jumlah Siswa yang mengikuti Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) di Wilayah I	72 Siswa
	Terbinanya Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)	Jumlah MGMP yang terbina	14 MGMP
	Terverifikasinya Data Laporan Bulanan Sekolah	Jumlah SMA yang terverifikasi Data Laporan Bulanan di Wilayah I	52 Satuan Pendidikan (SMA)

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Rp61.709.150	APBD

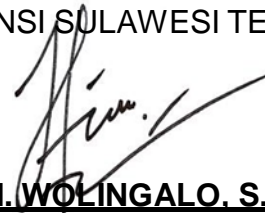
Palu, 2024

PIHAK KEDUA,
KEPALA CABANG DINAS
PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH II
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



SARIFAH, S.Pd., M.Pd
NIP. 19800816 200801 2 017

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMA
CABANG DINAS PENDIDIKAN
MENENGAH WILAYAH II
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



HARTIAN I. WOLINGALO, S.Pd., M.Pd
NIP. 19761111 200604 1 021

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ETTY BUDI SETIAWATY, S.Pi**
Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan SMK
Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah II
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : **SARIFAH, S.Pd., M.Pd**
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah II
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua**,

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi keuangan dan fisik perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2024

PIHAK KEDUA,
KEPALA CABANG DINAS
PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH II
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

SARIFAH, S.Pd., M.Pd
NIP. 19800816 200801 2 017

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMK
CABANG DINAS PENDIDIKAN
MENENGAH WILAYAH II
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

ETTY BUDI SETIAWATY, S.Pi
NIP. 19780415 200801 2 038

**SEKSI PEMBINAAN SMK
CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH II
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Tervalidasinya Data Siswa Penerima PIP Wilayah I	Jumlah Data Siswa Penerima PIP Wilayah I yang tervalidasi	4.070 Siswa
	Terseleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) di Wilayah I	Jumlah Siswa yang mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) di Wilayah I	20 Siswa
	Terseleksinya Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) di Wilayah I	Jumlah Siswa yang mengikuti Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) di Wilayah I	28 Siswa
	Terbinanya Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)	Jumlah MGMP yang terbina	14 MGMP
	Terverifikasinya Data Laporan Bulanan Sekolah	Jumlah SMK yang terverifikasi Data Laporan Bulanan di Wilayah I	34 Satuan Pendidikan (SMK)

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Rp61.084.550	APBD

Palu, 2024

PIHAK KEDUA,
KEPALA CABANG DINAS
PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH II
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



SARIFAH, S.Pd., M.Pd
NIP. 19800816 200801 2 017

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMK
CABANG DINAS PENDIDIKAN
MENENGAH WILAYAH II
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



ETTY BUDI SETIAWATY, S.Pi
NIP. 19780415 200801 2 038

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HENDRAWAN BASO, SH**
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Tata Usaha
Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah III
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **ALWI ACHMAD MUSA, S.Sos**
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah III
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi keuangan dan fisik perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2024

PIHAK KEDUA,
KEPALA CABANG DINAS
PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH III
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

ALWI ACHMAD MUSA, S.Sos
NIP. 19710516 200502 1 003

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SUB. BAGIAN TATA USAHA
CABANG DINAS PENDIDIKAN
MENENGAH WILAYAH III
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

HENDRAWAN BASO, SH
NIP. 19800903 200801 1 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
SUB. BAGIAN TATA USAHA
CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH III
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersinkronisasinya Mutu Pendidikan di Cabdis DIKMEN WIL.I	Jumlah Kepala SMA/SMK/SLB yang Mengikuti Rakor	100 Sekolah
2	Termonitoringnya Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian (UKK), Ujian Sekolah (US), Asesment Nasional Berbasis Komputer (ANBK).	Jumlah Pelaksanaan Monev UKK, US, dan ANBK di Sekolah	100%

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp37.777.250	APBD
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp47.747.900	APBD
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp173.762.550	APBD

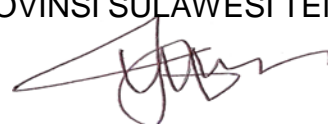
Palu, 2024

PIHAK KEDUA,
 KEPALA CABANG DINAS
 PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH III
 DINAS PENDIDIKAN
 PROVINSI SULAWESI TENGAH



ALWI ACHMAD MUSA. S.Sos
 NIP. 19710516 200502 1 003

PIHAK PERTAMA,
 KEPALA SUB. BAGIAN TATA USAHA
 CABANG DINAS PENDIDIKAN
 MENENGAH WILAYAH III
 DINAS PENDIDIKAN
 PROVINSI SULAWESI TENGAH



HENDRAWAN BASO. SH
 NIP. 19800903 200801 1 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DANIEL SURYA KRISNA, S.Hut., MP**
Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan SMA
Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah III
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **ALWI ACHMAD MUSA, S.Sos**
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah III
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi keuangan dan fisik perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2024

PIHAK KEDUA,
KEPALA CABANG DINAS
PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH III
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

ALWI ACHMAD MUSA, S.Sos
NIP. 19710516 200502 1 003

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMA
CABANG DINAS PENDIDIKAN
MENENGAH WILAYAH III
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

DANIEL SURYA KRISNA, S.Hut., MP
NIP. 19760207 201410 1 001


**SEKSI PEMBINAAN SMA
CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH III
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Tervalidasinya Data Siswa Penerima PIP Wilayah I	Jumlah Data Siswa Penerima PIP Wilayah I yang tervalidasi	10.606 Siswa
	Terseleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) di Wilayah I	Jumlah Siswa yang mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) di Wilayah I	20 Siswa
	Terseleksinya Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) di Wilayah I	Jumlah Siswa yang mengikuti Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) di Wilayah I	72 Siswa
	Terbinanya Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)	Jumlah MGMP yang terbina	14 MGMP
	Terverifikasinya Data Laporan Bulanan Sekolah	Jumlah SMA yang terverifikasi Data Laporan Bulanan di Wilayah I	52 Satuan Pendidikan (SMA)

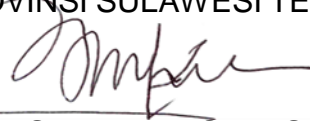
No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Rp78.063.250	APBD

Palu, 2024

PIHAK KEDUA,
KEPALA CABANG DINAS
PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH III
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


ALWI ACHMAD MUSA, S.Sos
NIP. 19710516 200502 1 003

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMA
CABANG DINAS PENDIDIKAN
MENENGAH WILAYAH III
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


DANIEL SURYA KRISNA, S.Hut., MP
NIP. 19760207 201410 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **UMAR SALEH PASAU, S.Pd**
Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan SMK
Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah III
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : **ALWI ACHMAD MUSA, S.Sos**
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah III
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua**,

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi keuangan dan fisik perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2024

PIHAK KEDUA,
KEPALA CABANG DINAS
PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH III
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

ALWI ACHMAD MUSA, S.Sos
NIP. 19710516 200502 1 003

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMK
CABANG DINAS PENDIDIKAN
MENENGAH WILAYAH III
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

UMAR SALEH PASAU, S.Pd
NIP. 19670712 199103 1 017


**SEKSI PEMBINAAN SMK
CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH III
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Tervalidasinya Data Siswa Penerima PIP Wilayah III	Jumlah Data Siswa Penerima PIP Wilayah III yang tervalidasi	4.070 Siswa
	Terseleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) di Wilayah III	Jumlah Siswa yang mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) di Wilayah III	20 Siswa
	Terseleksinya Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) di Wilayah III	Jumlah Siswa yang mengikuti Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) di Wilayah III	28 Siswa
	Terbinanya Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)	Jumlah MGMP yang terbina	14 MGMP
	Terverifikasinya Data Laporan Bulanan Sekolah	Jumlah SMK yang terverifikasi Data Laporan Bulanan di Wilayah III	34 Satuan Pendidikan (SMK)


No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Rp79.708.900	APBD

Palu, 2024

PIHAK KEDUA,
KEPALA CABANG DINAS
PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH III
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


ALWI ACHMAD MUSA, S.Sos
NIP. 19710516 200502 1 003

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMK
CABANG DINAS PENDIDIKAN
MENENGAH WILAYAH III
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


UMAR SALEH PASAU, S.Pd
NIP. 19670712 199103 1 017

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HAMZAH, S.Ag**
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Tata Usaha
Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah IV
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **SOFIAN, SE., MM**
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah IV
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi keuangan dan fisik perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2024

PIHAK KEDUA,
KEPALA CABANG DINAS
PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH IV
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

SOFIAN, SE., MM

NIP. 19690830 200012 1 005

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SUB. BAGIAN TATA USAHA
CABANG DINAS PENDIDIKAN
MENENGAH WILAYAH IV
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

HAMZAH, S.Ag

NIP. 19680506 199103 1 006


PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
SUB. BAGIAN TATA USAHA
CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH IV
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersinkronisasinya Mutu Pendidikan di Cabdis DIKMEN WIL.IV	Jumlah Kepala SMA/SMK/SLB yang Mengikuti Rakor	100 Sekolah
2	Termonitoringnya Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian (UKK), Ujian Sekolah (US), Asesment Nasional Berbasis Komputer (ANBK).	Jumlah Pelaksanaan Monev UKK, US, dan ANBK di Sekolah	100%

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp 301.847.850	APBD


Palu, 2024

PIHAK KEDUA,
 KEPALA CABANG DINAS
 PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH IV
 DINAS PENDIDIKAN
 PROVINSI SULAWESI TENGAH


SOFIAN, SE., MM

NIP. 19690830 200012 1 005

PIHAK PERTAMA,
 KEPALA SUB. BAGIAN TATA USAHA
 CABANG DINAS PENDIDIKAN
 MENENGAH WILAYAH IV
 DINAS PENDIDIKAN
 PROVINSI SULAWESI TENGAH


HAMZAH, S.Ag

NIP. 19680506 199103 1 006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YON NATAL MANGIMBO, S.Pd**
Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan SMA
Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah IV
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **SOFIAN, SE., MM**
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah IV
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi keuangan dan fisik perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2024

PIHAK KEDUA,
KEPALA CABANG DINAS
PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH IV
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

SOFIAN, SE., MM

NIP. 19690830 200012 1 005

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMA
CABANG DINAS PENDIDIKAN
MENENGAH WILAYAH IV
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

YON NATAL MANGIMBO, S.Pd

NIP. 19801224 200801 1 010

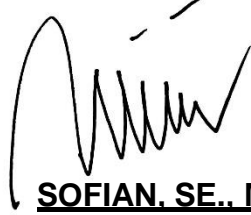
**SEKSI PEMBINAAN SMA
CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH IV
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Tervalidasinya Data Siswa Penerima PIP Wilayah IV	Jumlah Data Siswa Penerima PIP Wilayah IV yang tervalidasi	10.606 Siswa
	Terseleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) di Wilayah IV	Jumlah Siswa yang mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) di Wilayah IV	20 Siswa
	Terseleksinya Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) di Wilayah IV	Jumlah Siswa yang mengikuti Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) di Wilayah IV	72 Siswa
	Terbinanya Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)	Jumlah MGMP yang terbina	14 MGMP
	Terverifikasinya Data Laporan Bulanan Sekolah	Jumlah SMA yang terverifikasi Data Laporan Bulanan di Wilayah IV	52 Satuan Pendidikan (SMA)

No (1)	Sub Kegiatan (2)	Anggaran (3)	Keterangan (4)
1	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Rp63.558.500	APBD

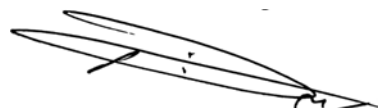
Palu, 2024

PIHAK KEDUA,
KEPALA CABANG DINAS
PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH IV
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



SOFIAN, SE., MM
NIP. 19690830 200012 1 005

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMA
CABANG DINAS PENDIDIKAN
MENENGAH WILAYAH IV
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



YON NATAL MANGIMBO, S.Pd
NIP. 19801224 200801 1 010

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SEHI NUNU, SE**
Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan SMK
Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah IV
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **SOFIAN, SE., MM**
Jabatan : Plt. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah IV
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi keuangan dan fisik perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2024

PIHAK KEDUA,
KEPALA CABANG DINAS
PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH IV
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

SOFIAN, SE., MM

NIP. 19690830 200012 1 005

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMK
CABANG DINAS PENDIDIKAN
MENENGAH WILAYAH IV
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

SEHI NUNU, SE

NIP. 19801224 200801 1 010

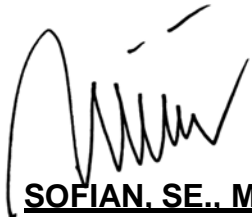
**SEKSI PEMBINAAN SMK
CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH IV
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Tervalidasinya Data Siswa Penerima PIP Wilayah IV	Jumlah Data Siswa Penerima PIP Wilayah IV yang tervalidasi	4.070 Siswa
	Terseleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) di Wilayah IV	Jumlah Siswa yang mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) di Wilayah IV	20 Siswa
	Terseleksinya Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) di Wilayah IV	Jumlah Siswa yang mengikuti Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) di Wilayah IV	28 Siswa
	Terbinanya Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)	Jumlah MGMP yang terbina	14 MGMP
	Terverifikasinya Data Laporan Bulanan Sekolah	Jumlah SMK yang terverifikasi Data Laporan Bulanan di Wilayah IV	34 Satuan Pendidikan (SMK)

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Rp63.862.500	APBD

Palu, 2024

PIHAK KEDUA,
KEPALA CABANG DINAS
PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH IV
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



SOFIAN, SE., MM

NIP. 19690830 200012 1 005

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMK
CABANG DINAS PENDIDIKAN
MENENGAH WILAYAH IV
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



SEHINUNU, SE

NIP. 19801224 200801 1 010

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RAMADHAN, S.Sos**
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Tata Usaha
Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah V
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : **YASSER MASULILI, S.Ag**
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah V
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua**,


Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi keuangan dan fisik perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2024

PIHAK KEDUA,
KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN
MENENGAH WILAYAH V
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


YASSER MASULILI, S.Ag
NIP. 19770320200501 1 003

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SUB. BAGIAN TATA USAHA
CABANG DINAS PENDIDIKAN
MENENGAH WILAYAH V
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


RAMADHAN, S.Sos
NIP. 19800709 200902 1 001


**SUB. BAGIAN TATA USAHA
CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH V
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersinkronisasinya Mutu Pendidikan di Cabdis DIKMEN WIL. V	Jumlah Kepala SMA/SMK/SLB yang Mengikuti Rakor	100 Sekolah
2	Termonitoringnya Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian (UKK), Ujian Sekolah (US), Asesment Nasional Berbasis Komputer (ANBK).	Jumlah Pelaksanaan Monev UKK, US, dan ANBK di Sekolah	100%

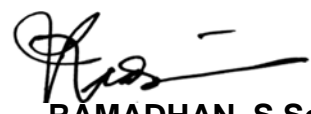
No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp 36.513.750	APBD
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 121.650.000	APBD
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 179.152.545	APBD

Palu, 2024

PIHAK KEDUA,
KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN
MENENGAH WILAYAH V
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


YASSER MASULILI, S.Ag
NIP. 19770320 200501 1 003

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SUB. BAGIAN TATA USAHA
CABANG DINAS PENDIDIKAN
MENENGAH WILAYAH V
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


RAMADHAN, S.Sos
NIP. 19800709 200902 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Hj. NURLINDA, SE**
Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan SMA
Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah V
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : **YASSER MASULILI, S.Ag**
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah V
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua**,

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi keuangan dan fisik perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2024

PIHAK KEDUA,
KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN
MENENGAH WILAYAH V
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


YASSER MASULILI, S.Ag
NIP. 19770320200501 1 003

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMA
CABANG DINAS PENDIDIKAN
MENENGAH WILAYAH V
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


Hj. NURLINDA, SE
NIP. 19670805 200701 2 026

**SEKSI PEMBINAAN SMA
CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH V
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Tervalidasinya Data Siswa Penerima PIP Wilayah V	Jumlah Data Siswa Penerima PIP Wilayah V yang tervalidasi	10.606 Siswa
	Terseleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) di Wilayah V	Jumlah Siswa yang mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) di Wilayah V	20 Siswa
	Terseleksinya Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) di Wilayah V	Jumlah Siswa yang mengikuti Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) di Wilayah V	72 Siswa
	Terbinanya Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)	Jumlah MGMP yang terbina	14 MGMP
	Terverifikasinya Data Laporan Bulanan Sekolah	Jumlah SMA yang terverifikasi Data Laporan Bulanan di Wilayah V	52 Satuan Pendidikan (SMA)

No (1)	Sub Kegiatan (2)	Anggaran (3)	Keterangan (4)
1	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Rp20.899.000	APBD

PIHAK KEDUA,
KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN
MENENGAH WILAYAH V
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

YASSER MASULILI, S.Ag
NIP. 19770320 200501 1 003

Palu, 2024
PIHAK PERTAMA,
KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMA
CABANG DINAS PENDIDIKAN
MENENGAH WILAYAH V
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Hi. NURLINDA, SE
NIP. 19670805 200701 2 026

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RAHMAWATI, S.Sos**
Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan SMK
Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah V
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **YASSER MASULILI, S.Ag**
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah V
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi keuangan dan fisik perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2024

PIHAK KEDUA,
KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN
MENENGAH WILAYAH V
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


YASSER MASULILI, S.Ag
NIP. 19770320 200501 1 003

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMK
CABANG DINAS PENDIDIKAN
MENENGAH WILAYAH V
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


RAHMAWATI, S.Sos
NIP. 19690102 199103 2 009

**SEKSI PEMBINAAN SMK
CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH V
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tervalidasinya Data Siswa Penerima PIP Wilayah V	Jumlah Data Siswa Penerima PIP Wilayah V yang tervalidasi	4.070 Siswa
2	Terseleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) di Wilayah V	Jumlah Siswa yang mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) di Wilayah V	20 Siswa
3	Terseleksinya Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) di Wilayah V	Jumlah Siswa yang mengikuti Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) di Wilayah V	28 Siswa
4	Terbinanya Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)	Jumlah MGMP yang terbina	14 MGMP
5	Terverifikasinya Data Laporan Bulanan Sekolah	Jumlah SMK yang terverifikasi Data Laporan Bulanan di Wilayah V	34 Satuan Pendidikan (SMK)

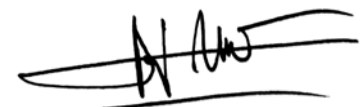
No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Rp20.899.000	APBD

Palu, 2024

PIHAK KEDUA,
KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN
MENENGAH WILAYAH V
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


YASSER MASULILI, S.Ag
NIP. 19770320 200501 1 003

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMK
CABANG DINAS PENDIDIKAN
MENENGAH WILAYAH V
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


RAHMAWATI, S.Sos
NIP. 19690102 199103 2 009

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BAHARUDIN, S.Pd**
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Tata Usaha
Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah VI
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **FITRIYAH IHWANI, S.Sos., MM**
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah VI
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi keuangan dan fisik perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2024

PIHAK KEDUA,
KEPALA CABANG DINAS
PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH VI
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


FITRIYAH IHWANI, S.Sos., MM
NIP. 19720717 200003 2 006

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SUB. BAGIAN TATA USAHA
CABANG DINAS PENDIDIKAN
MENENGAH WILAYAH VI
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


BAHARUDIN, S.Pd
NIP. 19770404 200904 1 001

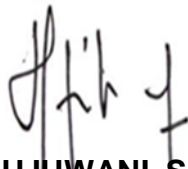
**SUB. BAGIAN TATA USAHA
CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH VI
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersinkronisasinya Mutu Pendidikan di Cabdis DIKMEN WIL. VI	Jumlah Kepala SMA/SMK/SLB yang Mengikuti Rakor	100 Sekolah
2	Termonitoringnya Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian (UKK), Ujian Sekolah (US), Asesment Nasional Berbasis Komputer (ANBK).	Jumlah Pelaksanaan Monev UKK, US, dan ANBK di Sekolah	100%

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp27.296.000	APBD
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp81.508.000	APBD
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp219.872.081	APBD

Palu, 2024

PIHAK KEDUA,
KEPALA CABANG DINAS
PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH VI
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



FITRIYAH IHWANI, S.Sos., MM
NIP. 19720717 200003 2 006

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SUB. BAGIAN TATA USAHA
CABANG DINAS PENDIDIKAN
MENENGAH WILAYAH VI
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



BAHARUDIN, S.Pd
NIP. 19770404 200904 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RAPIAH, SE**
Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan SMA
Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah VI
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : **FITRIYAH IHWANI, S.Sos., MM**
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah VI
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua**,

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi keuangan dan fisik perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2024

PIHAK KEDUA,
KEPALA CABANG DINAS
PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH VI
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


FITRIYAH IHWANI, S.Sos., MM
NIP. 19720717 200003 2 006

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMA
CABANG DINAS PENDIDIKAN
MENENGAH WILAYAH VI
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


RAPIAH, SE
NIP. 19691028 200604 2 008

**SEKSI PEMBINAAN SMA
CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH VI
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Tervalidasinya Data Siswa Penerima PIP Wilayah VI	Jumlah Data Siswa Penerima PIP Wilayah VI yang tervalidasi	10.606 Siswa
	Terseleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) di Wilayah VI	Jumlah Siswa yang mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) di Wilayah VI	20 Siswa
	Terseleksinya Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) di Wilayah VI	Jumlah Siswa yang mengikuti Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) di Wilayah VI	72 Siswa
	Terbinanya Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)	Jumlah MGMP yang terbina	14 MGMP
	Terverifikasinya Data Laporan Bulanan Sekolah	Jumlah SMA yang terverifikasi Data Laporan Bulanan di Wilayah VI	52 Satuan Pendidikan (SMA)

No (1)	Sub Kegiatan (2)	Anggaran (3)	Keterangan (4)
1	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Rp49.815.000	APBD

Palu, 2024

PIHAK KEDUA,
KEPALA CABANG DINAS
PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH VI
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


FITRIYAH IHWANI, S.Sos., MM
NIP. 19720717 200003 2 006

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMA
CABANG DINAS PENDIDIKAN
MENENGAH WILAYAH VI
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


RAPIH. SE
NIP. 19691028 200604 2 008

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SARWIS, SH., M.Si**
Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan SMK
Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah VI
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **FITRIYAH IHWANI, S.Sos., MM**
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah VI
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi keuangan dan fisik perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2024

PIHAK KEDUA,
KEPALA CABANG DINAS
PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH VI
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


FITRIYAH IHWANI, S.Sos., MM
NIP. 19720717 200003 2 006

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMK
CABANG DINAS PENDIDIKAN
MENENGAH WILAYAH VI
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


SARWIS, SH., M.Si
NIP. 19741009 200801 1 004

**SEKSI PEMBINAAN SMK
CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH VI
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tervalidasinya Data Siswa Penerima PIP Wilayah VI	Jumlah Data Siswa Penerima PIP Wilayah VI yang tervalidasi	4.070 Siswa
2	Terseleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) di Wilayah VI	Jumlah Siswa yang mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) di Wilayah VI	20 Siswa
3	Terseleksinya Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) di Wilayah VI	Jumlah Siswa yang mengikuti Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) di Wilayah VI	28 Siswa
4	Terbinanya Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)	Jumlah MGMP yang terbina	14 MGMP
5	Terverifikasinya Data Laporan Bulanan Sekolah	Jumlah SMK yang terverifikasi Data Laporan Bulanan di Wilayah VI	34 Satuan Pendidikan (SMK)

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Rp49.815.000	APBD

Palu, 2024

PIHAK KEDUA,
KEPALA CABANG DINAS
PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH VI
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


FITRIYAH IHWANI, S.Sos., MM
NIP. 19720717 200003 2 006

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMK
CABANG DINAS PENDIDIKAN
MENENGAH WILAYAH VI
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


SARWIS, SH., M.Si
NIP. 19741009 200801 1 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

